

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembangunan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa agar pembangunan yang dilaksanakan berjalan secara efektif, efisien, bersasaran, berkeadilan, serta dalam rangka mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyusun rencana pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan prioritas pembangunan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16));

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Perangkat Daerah adalah satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis;
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Pedoman bagi penyusunan dan penyesuaian RPJMD kabupaten/kota;
 - d. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021; dan
 - e. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi:
 - a. Buku
 1. BAB I Pendahuluan
 2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 3. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 4. BAB IV Analisis Isu Isu Strategis
 5. BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 6. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
 7. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 8. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 9. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 10. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
 - b. Program kegiatan strategis Gubernur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
- (5) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam atau perubahan kebijakan nasional, maka peraturan daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (7) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(7/183/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

Hj. AWI SUNDARI, S.H.
NIP. 19590818 198503 2 006

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir	Usuran	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2016		2017		2018		2019		2020					2021		
					Target	(Juta.Rp)	Target	(Juta.Rp)	Target	(Juta.Rp)	Target	(Juta.Rp)	Target	(Juta.Rp)				Target	(Juta.Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pada Program Urusan Rutin																				
						357.038		375.829		394.620		414.351		435.069		456.822				
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas administrasi	%	100%	100%	195.670	100%	205.968	100%	216.266	100%	227.080	100%	238.434	100%	250.355	100%	semua Usuran	Semua PD
	2	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Sarana	%	100%	100%	3.990	100%	4.200	100%	4.410	100%	4.631	100%	4.862	100%	5.105	100%	semua Usuran	Semua PD
	3	Pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan	%	100%	100%	9.768	100%	10.282	100%	10.796	100%	11.336	100%	11.903	100%	12.498	100%	semua Usuran	Semua PD
	4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	%	100%	100%	1.156	100%	1.217	100%	1.278	100%	1.342	100%	1.409	100%	1.479	100%	semua Usuran	Semua PD
	5	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Publik	%	100%	100%	2.282	100%	2.402	100%	2.522	100%	2.648	100%	2.781	100%	2.920	100%	semua Usuran	Semua PD
	6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur	%	100%	100%	38.406	100%	40.427	100%	42.448	100%	44.571	100%	46.799	100%	49.139	100%	semua Usuran	Semua PD
	7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	%	100%	100%	105.766	100%	111.333	100%	116.900	100%	122.745	100%	128.882	100%	135.326	100%	semua Usuran	Semua PD
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pada Program Urusan Non Urusan Pemerintahan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar)																				
		Pendidikan				1.9%	131.150	3.9%	248.019	1.2%	66.000	1.2%	66.000	1.2%	66.000	1.2%	66.000			
1	8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentasi Lulusan SMP masuk ke SMA	%	60	65	500	70	500	75	500	80	500	85	500	90	500	90	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA setingkat S2	%	0,9	2	6.000	3	11.025	3	6.000	4	6.000	5	6.000	6	6.000	6,09	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	10	Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan	Persentase lulusan sekolah melanjutkan pendidikan lebih tinggi	%	67,0	70	2.000	73	6.500	76	2.000	79	2.000	82	2.000	85	2.000	85	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	11	Peningkatan Kualitas Sekolah	Persentase sekolah yang terakreditasi	%	6,3	9	26.000	12	845	15	26.000	18	26.000	19	26.000	22	26.000	22,09	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	12	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki Sarpras memenuhi standar	%	6,28	11	12.500	17	212.650	23	12.500	29	12.500	35	12.500	41	12.500	40,7	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	13	Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)	Persentase Anak bisa menamatkan melalui jalur pendidikan non formal dan informal	%	2,0	3	69.150	4	1.499	5	4.000	6	4.000	7	4.000	8	4.000	8,0	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
9	14	Pendidikan Karakter	Persentase lulusan SD/MI yg khatam Al Qur'an	%	0	10	15.000	20	15.000	30	15.000	40	15.000	50	15.000	60	15.000	70	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	15	Pendidikan Khusus	APM Pendidikan Khusus	%	52,57		21.827												Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	16	Pendidikan Dasar (SD)	APM SD	%	52,57		86.909												Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	17	Pendidikan Dasar (SMP)	APK APM SMP	%	108,81	108,12			88.741										Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
1	18	Peningkatan Penerapan Teknologi Penerimaan	APK APM SMA/MA/SMK/MAK	%	79,52	79,70			866										Pendidikan	Disdik/ SPP PLH
		Kesehatan					898.401		820.807		538.292		528.292		508.292		488.292			
3	19	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penurunan Kasus/Wabah Penyakit menular	%	2	2	1.200	2	9.404	2	1.200	2	1.200	1	1.200	0	1.200	0	Kesehatan	Dinas kesehatan dan UPT
3			Persentase Penurunan Kasus Penyakit Tidak Menular	%			3.051												Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit
3	20	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	50	50	19.500	60	16.072	60	19.500	70	19.500	80	19.500	90	19.500	90	Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit
4	21	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kelembagaan Masyarakat bidang Kesehatan	%	0	0	-	20	5.915	40	500	60	500	80	500	100	500	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
2	22	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyediaan Tenaga Kesehatan masyarakat	%	50	60	18.000	65	4.848	70	18.000	75	18.000	80	18.000	85	18.000	85	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
4	23	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Penurunan Masyarakat Bermasalah Gizi	%	28	28	5.000	26	4.666	24	5.000	22	5.000	20	5.000	18	5.000	18	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
6	24	Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentasi Rumah Tangga memiliki tempat Pembuangan Sampah	%	60	65	5.000	70	1.435	75	5.000	80	5.000	85	5.000	90	5.000	90	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
3	25	Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Institusi Kesehatan yang dibina	%	100	100	300	100	3.202	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
3	26	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Bulukan	Porntasasi Sarana Pelayanan Yang memiliki	%	15	20	32.244												Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
4	27	Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Finansial Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non PBI	Persentase Jaminan kesehatan nasional dan kesehatan masyarakat	%	17	20,3	26.227												Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	28	Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya penggunaan obat Rasional	%	40	50	800	60	1.228	70	800	80	800	90	800	100	800	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	29	Standarisasi & Sertifikasi Layanan Kesehatan	Rasio Akreditasi Rumah Sakit	%	N/A	2	1.072		1.072		1.072		1.072		1.072		1.072		Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit

3			Jumlah Tenaga Medik, non medik yang tersertifikasi	%	N/A	N/A	4.341	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit
6	30	Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase Rumah Sakit yang memiliki Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	%	50	75	350.000	80	369.572	85	70.000	93	60.000	95	40.000	95	20.000	95	Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit
3	31	Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	%	100	100	394.720		394.720		394.720		394.720		394.720		394.720		Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit
4	32	Kemitraan layanan kesehatan	Persentase Peningkatan jaminan Kesehatan	%	100	100	22.000	100	8.674	100	22.000	100	22.000	100	22.000	100	22.000	100	Kesehatan	Dinas kesehatan, UPT, dan Rumah Sakit
3	33	Manajemen Kesehatan	Persentase Institusi Kesehatan yang alihbina	%	100	100	95												Kesehatan	Dinas kesehatan dan UPT
6	34	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Kulit	Persentase Rumah Sakit yang memiliki Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	%	0	20	10.000													Rumah Sakit
3	35	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio Akreditasi Rumah Sakit	%	1:(jumlah RS/ID)	2													Kesehatan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit
3	36	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penurunan Kasus/Wabah Penyakit menular	%	2	2	1.200												Kesehatan	Dinkes
3	37	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Tidak Menular	%			3.051												Kesehatan	Dinkes
2	38	Pala Hidup Sehat dan Bersih					600													
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						1.193.004		802.950		807.700		783.350		768.350		763.870				
34	39	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	66,09	72,22	14.400	77,53	15.500	82,4	15.500	100	10.500	100	10.500	100	10.500	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Dinas PUPR
34			Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Air Limbah Domestik yang memadai	%	28,5	33,83	400	38,74	400	44,12	400	100	400	100	400	100	400	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR; Dinkes
34			persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	9,2	7,7	400	6,2	400	4,7	400	0	400	0	400	0	400	0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR; Dinkes
34			Cakupan Pelayanan Pengangkutan Persampahan	%	46,95%	47,13%	200	49,23%	200	51,27%	250	54,91%	400	57,12%	400	60%	400	60%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR; BLHD
34			Persentase terbangunnya sarana dan prasarana Publik sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN (Sport)	%	20/36 = 55,6%	58,3%	10.000	72,3%	150.000	86,1%	100.000	94,4%	100.000	97,2%	25.000	100%	20	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
34			Persentase terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN	%	21/47 = 44,7%	53,2%	100.000	74,5%	100.000	83%	120.000	91,5%	100.000	97,9%	100.000	100%	120.000	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
60	40	Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jumlah Tampung Air Embung, Situ, Waduk yang dibangun	%	2	20	25.000	35	25.000	50	30.000	65	20.000	85	20.000	100	20.000	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
60			Persentase Luas Irigasi dan Rawa dalam Kondisi Baik	%	39,5	11	78.500	16,9	85.300	22,8	65.000	28,7	75.000	34,6	75.000	40,5	75.000	80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR; Dinas Pertanian TPH
60			Persentase Luas jaringan irigasi/rawa yang dikembangkan	%	49	7		27		51		51		51		51		100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR; Dinas Pertanian TPH
60			Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	28	40	20.000	52	20.000	64	20.000	76	20.000	88	30.000	100	30.000	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
60			Persentase penyediaan prasarana air baku	%	38	13		22		31		40		49		57		57	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
45	41	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Jalan dalam Kondisi Baik	%	85	85,5	400.000	86	400.000	87	450.000	88	450.000	88	500.000	91	500.000	91	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
45			Jembatan dalam Kondisi Baik	%	82	82,5		83		83,5		84		84,5		85		85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
34	42	Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Ruang	%	100	100	4.500	100	4.500	100	4.500	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR, Bappeda, Diskanlut, Dishut, BLHD
			Persentase Penetapan Produk Hukum Penataan Ruang	%	0	4		4		4		4		4		4				
34	43	Pengembangan Teknologi Konstruksi	Persentase pelayanan pemohon pengujian yang terlayani dengan saran prasarana yang ada	%	80%	100%	100	100%	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%	600	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
34	44	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase kenaikan jumlah SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	0% (827 org)	2%	750	2%	750	2%	750	2%	750	2%	750	2%	750	12%	Tenaga Kerja	Dinas PUPR, Disnakertrans
81	45	Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi layak	%	58	60	300	62	300	64	300	66	300	68	300	70	300	70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR; Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45	46	Pembangunan Jalan dan Jembatan					438.297												Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR

73	keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Porstentasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	%	15	20	175		175		175		175		175		175		175		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK		
74	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Porstentasi Peningkatan Kelembagaan Gender dan Anak	%	10	15	2.500	25	2.500	50	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK		
75	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak		%			154																	
76	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Porstentasi Peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan	%	63	65	2.500	67	1.600	69	2.500	71	2.500	73	2.500	75	2.500	75	2.500	75	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK		
77	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Porstentasi Peningkatan Peran dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	%	76	76	285		285		285		285		285		285		285		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK		
Pangan																							
79	Peningkatan Kemandirian Pangan	Peningkatan Desa mandiri Pangan	Desa	187	187	2.200	201	2.600	215	2.900	229	3.400	242	3.900	257	4.500	257	4.500	257	Pangan	BKP		
		Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	102	102		106		110		114		118		122		122		122	Pangan	BKP		
		Peningkatan Skor PPH Ketersediaan	Skor	88	88		88,5		89		89,5		90		90,5		90,5		90,5	Pangan	BKP		
80	Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn	%	90	90	1.000	89,5	1.300	89,1	1.400	88,6	1.600	86,7	1.800	85,8	2.000	85,8	2.000	85,8	Pangan	BKP		
		Peningkatan skor PPH Konsumsi	%	84,9	84,9		85,9		86,9		87,9		89,9		90,9		90,9		90,9	Pangan	BKP		
83	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					1.439																	
84	Pengonekaragaman dan Keamanan Pangan					1.552																	
85	Pengembangan Manajemen dan Lembaran Ketahanan Pangan					1.020																	
Pertanian																							
244	Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Lahan yang bersertifikat	%	30	35	20.000	45	20.000	55	20.000	65	20.000	75	20.000	85	20.000	85	20.000	85	Pertanian	Setda (Biro KAP)		
245	Program Penyelesaian Perbatasan	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah	%	60	65	2.000	70	2.000	75	2.000	80	2.000	85	2.000	90	2.000	90	2.000	90	Pertanian	Setda (Biro Tapem)		
Lingkungan Hidup																							
86	Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan SDA dan LH	Indeks Tutupan Hutan	indeks	43,66	45	4.000	45,5	4.000	46	4.000	46,5	4.000	47	4.000	47,5	4.000	47,5	4.000	47,5	Lingkungan Hidup	Dishut; BLHD		
		Persentase penurunan kasus illegal logging	kasus	48 Kasus	5%	4.000	5%	4.000	5%	4.000	5%	4.000	5%	4.000	5%	4.000	5%	4.000	5%	4.000	34 kasus	Lingkungan Hidup	Dishut
		Persentase penurunan kasus illegal mining	kasus	14 Kasus	5%	1.000	5%	1.000	5%	1.000	5%	1.000	5%	1.000	5%	1.000	5%	1.000	5%	1.000	8 Kasus	Lingkungan Hidup	Distanben
		Persentase penurunan kasus illegal fishing	kasus	23 kasus	5%	1.500	5%	1.500	5%	1.500	5%	1.500	5%	1.500	5%	1.500	5%	1.500	5%	1.500	8 Kasus	Lingkungan Hidup	Diskanlut
87	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air	%	46,16	58	9.000	58,5	9.000	59	9.300	59,5	9.300	60	9.700	60,5	10.000	61	10.000	61	Lingkungan Hidup	BLHD;Dinas PUPR		
		Indeks Kualitas Udara	%	81,83	85	9.000	86	9.000	87	9.300	88	9.300	89	9.700	90	10.000	90	10.000	90	Lingkungan Hidup	BLHD;Dinas PUPR		
88	Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	Berkurangnya luas lahan kritis	Ha	357.523 ha/5.582 ha-1.56%	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	500 Ha	4.510	8.582	Kehutanan	Dishut; BLHD
89	Konservasi Sumber daya Alam Kebun Rawa	Persentase terbangunnya kawasan kebun rawa	%	20%	30%	1.500	40%	1.500	50%	1.500	60%	2.000	70%	2.000	75%	2.500	75%	2.500	75%	Lingkungan Hidup	Balitbangda (Kebun raya Banua)		
90	Pengelolaan Ruang Laut	Kawasan Terumbu Karang yang Terrehabilitasi	Ha	5	7	2.500	8	3.000	10	3.000	11	3.500	12	3.500	14	5.000	14	5.000	14	Lingkungan Hidup	Diskanlut;BLHD		
		Kawasan Mangrove yang Terrehabilitasi	Ha	54	56		58		61		63		66		69		69		69	Lingkungan Hidup	Diskanlut;BLHD		
91	Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	28	40	20.000	52	20.000	64	20.000	76	20.000	88	30.000	100	30.000	100	30.000	100	Lingkungan Hidup	Diskanlut; BLHD; Dinas PUPR		
92	Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase Penurunan frekuensi terjadinya kebakaran hutan	%	483 kali	10%	2.500	10%	2.500	10%	2.900	10%	2.900	10%	3.300	10%	3.500	60%	3.500	60%	Lingkungan Hidup	BLHD, Dishut		
93	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	%	35%	36%	500	40%	500	55%	600	60%	600	65%	700	70%	700	70%	700	70%	Lingkungan Hidup	Dinas PUPR;BLHD		
94	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Persentase Pengelolaan Sampah		46,95%	47,13%	200	49,23%	200	51,27%	250	54,91%	400	57,12%	400	60%	400	60%	400	60%	Lingkungan Hidup	Dinas PUPR;BLHD		
95	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					1.347														Lingkungan Hidup	BLHD		
96	Peningkatan Pengendalian Polusi					100														Lingkungan Hidup	BLHD		
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																							
97	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang dibina	Unit	10	10	500	30	500	40	500	50	500	60	500	70	500	70	500	70	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD		
98	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat untuk Pembiayaan Pembangunan Desa	%	15	16	800	17	5.000	18	800	19	800	20	800	21	800	21	800	21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD		
99	Program Pengembangan Potensi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat	%	40	50	500	60	500	70	500	80	500	90	500	100	500	100	500	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD		
100	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pengembangan Kelembagaan Desa	%	50	55	800	60	1.320	65	800	70	800	75	800	80	800	80	800	80	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD		
101	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					2.120														Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD		

	102	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				693												Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMMPD	
		Perhubungan				52.098		40.000		40.000		55.000		55.000		60.000				
	103	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Pr	Prosentase jumlah halte BRT yang terbanau	%	0	5	20.000	30	20.000	60	20.000	60	25.000	80	25.000	100	30.000	100	Perhubungan	Dinas Perhubungan
	104	Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Waktu Tempuh Rata-rata Ruas jalan provinsi	KmH	60	62	20.000	65	20.000	65	20.000	67	30.000	67	30.000	69	30.000	69	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Persentase penurunan angka kecelakaan diruas jalan provinsi	%	60	60		55		50		40		35		35		35	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Persentase penurunan angka kecelakaan angkutan sungai danau dan penyeberangan	%	60	60		55		50		40		35		35		35	Perhubungan	Dinas Perhubungan
	105	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Berhubungan																	Perhubungan	Dishubkominfo
	106	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																	Perhubungan	Dishubkominfo
	107	Program Peningkatan Pelayanan Anakutan																	Perhubungan	Dishubkominfo
	108	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas																	Perhubungan	Dishubkominfo
	109	Program Peningkatan Data Sarana dan Prasarana LIASDP																	Perhubungan	Dishubkominfo
	110	Program Peningkatan Keselamatan Danarbanan																	Perhubungan	Dishubkominfo
	111	Program Peningkatan Kinerja Operasional LIASDP																	Perhubungan	Dishubkominfo
	112	Program Peningkatan Pelayanan Anakutan Uluwu Suwai di Kalsel																	Perhubungan	Dishubkominfo
	113	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor																	Perhubungan	Dishubkominfo
		Komunikasi dan Informatika				30.410		10.500		15.500		10.500		10.500		10.500				
	114	Program Pengelolaan dan Pengembangan e-Government, Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai dan ranking pemeringkatan e-Government	peringkat	16	13	25.000	10	10.000	8	15.000	8	10.000	6	10.000	6	10.000	6	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				indek	Skala 2,00 dari 4	Skala 2,80 dari 4		Skala 2,90 dari 4		Skala 3,00 dari 4		Skala 3,00 dari 4		Skala 3,10 dari 4		Skala 3,10 dari 4		Skala 3,10 dari 4	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentas Cakupan Media Informasi Komunikasi Publik	%	15,4	30,8		46,2		55,2		61,5		76,9		84,6		84,6	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentasi daerah yang tercover jaringan komunikasi (jumlah desa yang tercover jaringan komunikasi)	%	7,7	23,1	500	38,5	500	53,9	500	69,3	500	84,7	500	100	500	100	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	115	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	Komunikasi dan Informasi	Dishubkominfo
	116	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi																	Komunikasi dan Informasi	Dishubkominfo
	117	Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	Komunikasi dan Informasi	Dishubkominfo
	118	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi																	Komunikasi dan Informasi	KPID
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				11.695		12.676		10.686		11.891		13.141		14.409				
	119	Pengembangan & Penataan Organisasi, Tatalaksana & Administrasi Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki tertib administrasi kelembagaan	%	24,64	32,62	934,69	32,62	1.118,17	37,27	1.407	41,92	1.668	46,57	1.949	51,22	2.199,75	51,22	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Persentase Koperasi yang menyelenggarakan rapat anggota	%	40,19	45		45		46		47		48		49		49	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Prosentase Rata rata Peningkatan jumlah manager dan karyawan koperasi (yang didukung dengan perikatan) per tahun	%	0,25	2,69		2,69		3,19		3,69		4,19		4,69		4,69	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
	120	Peningkatan SDM Koperasi&UK, Promosi, Kemitraan & Jaringan Koperasi&UK	Persentase SDM Koperasi& UK yang menerapkan Hasil Magang/Praktek Kerja	%	60	80	2.398,48	80	6.248,32	80	3.211	80	3.478	80	3.744	80	4.013	80	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Persentase SDM Koperasi& UK yang menerapkan Hasil Orientasi Lapangan	%	60	80		80		80		80		80		80		80	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Jumlah Nilai Transaksi Promosi	Rp. Miliar	7,4	8,6		9,03		9,03		9,48		9,95		10,45		10,45	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Jumlah Usaha Kecil yang meningkat Skala Usahanya menjadi Usaha Menengah	Unit	0	5		5		6		6		7		7		7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Jumlah UK yang mampu mengakses Pasar Modern	Unit	41	100		100		110		110		120		120		120	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Jumlah Jenis produk unggulan KOP&UK yang mampu masuk ke pasar luar daerah	Item	5	5		5		6		6		7		7		7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Rasio alumni Diklat yang mampu menerapkan hasil diklat ditempat kerjanya	%	50	60	1.446,405	60	1.540,450	60	1.817	65	1.999	65	2.203	70	2.418	70	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM

	121	Peningkatan Pengawasan & Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Serta Perwujudan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan KUMKM.	Prosentase Koperasi yang melaksanakan Pengawasan Internal (oleh Pengawas Koperasi)	%	4,4	6	1.862,63	6	1.679,67	7	1.913	8	2.135	9	2.337	10	2.561	10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Prosentasi Koperasi yang dilakukan pengawasan eksternal (oleh eksternal auditor)	%	0	2		2		3		4		5		6		6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Jumlah Koperasi&UK yg memiliki informasi Keragaan dan Kinerja	Unit	2571	3000		3000		3100		3200		3300		3400		3500	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Presentase Koperasi dan UK yang memiliki Pembukuan yang standar(SAK-ETAP)	%	15,99	2,00		2,00		3,00		4,00		5,00		6,00		21,99	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
	122	Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan & Legalitas Usaha KUMKM	Persentase Peningkatan nilai bisnis Kop&UK	%	Rp 385 M	10	1.958,7	10	2.089,22	10	2.337,70	10	2.611	10	2.908	10	3.217	10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Persentase Peningkatan Kemandirian (Struktur Permodalan Kop&UK)	%	Rp 491 M	90		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			Jumlah Koperasi dan UK yang memiliki legalitas Usaha	Unit	0	250		250		300		300		400		450		450	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
	123	Pengembangan Program Pelatihan					108												Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
	124	Peningkatan SDM KUMKM dan Peningkatan pengembangan kualitas sdm					1.540												Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
	125	Peningkatan SDM KUMKM Melalui Jalur Diklat					1.446												Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
		Penanaman Modal					10.400		11.600		12.900		14.500		16.300		19.500			
	126	Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	%	36,5	15	1.600	15	1.900	15	2.300	15	2.800	15	3.400	15	4.000	15	Penanaman Modal & PTSP	Dinas Penanaman Modal & PTSP
	127	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi PMA dan PMDN	%	41	15	8.800	15	9.700	15	10.600	15	11.700	15	12.900	15	15.500	56	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP
	128	Peningkatan Kapasitas dan kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%																
		Kepemudaan dan Olah Raga					13.174		62.755		103.000		106.000		107.500		109.000			
	129	Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi Tentang Kepemudaan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan	%	0	0	-	20	500	40	500	60	500	80	500	100	500	100	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	130	Pengembangan Kemitraan Antar Pemuda Denean Masyarakat	Persentase peningkatan kemitraan pemuda denean masyarakat	%	0	0	-	20	500	40	500	60	500	80	500	100	500	100	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	131	Pengembangan dan Pemberdayaan Kemandirian Pemuda					20	33.201	40	34.000	60	35.000	80	35.500	100	36.000	100	36.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	132	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga					20	19.900	40	34.000	60	35.000	80	35.500	100	36.000	100	36.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	133	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sport Center	%	0	10		35	8.654	45	34.000	60	35.000	80	35.500	100	36.000	100	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	134	Program Pemberdayaan Kepemudaan					2.100												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	135	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus					268												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	136	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan					354												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	137	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi					4646												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	138	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					2126												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	139	Program Pengembangan Kepemudaan					2565												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	140	Program Pengembangan Kepramukaan					733												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
	141	Program Penyadaran Kepemudaan					382												Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
		Kebudayaan					7.012		18.208		3.600		3.600		3.600		3.600			
	142	Pengembangan Unsur Budaya	Persentase Unsur2 budaya yang dikembangkan	%	28	30	1.200	35	15.000	40	1.200	45	1.200	50	1.200	55	1.200	55	Kebudayaan	Disparbud
	143	Penggalan Unsur Budaya	Persentase Unsur Budaya yang ada di kakek	%	10	20	1.200	30	1.200	40	1.200	60	1.200	80	1.200	100	1.200	100	Kebudayaan	Disparbud
	144	Aktualisasi Unsur Budaya	Persentase unsur2 budaya yang menjadi keayaan budaya	%	14	20	1.200	25	2.008	30	1.200	35	1.200	40	1.200	45	1.200	56	Kebudayaan	Disparbud
	145	Program Pemanfaatan Kebudayaan					1945												Kebudayaan	Disparbud
	146	Program Peningkatan Kebudayaan					872												Kebudayaan	Disparbud
	147	Program Perlindungan Kebudayaan					401												Kebudayaan	Disparbud
	148	Program Fasilitas Seni Budaya					194												Kebudayaan	Disparbud
		Perpustakaan					4.000		8.950		4.000		4.000		4.000		4.000			
	149	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Buku yang dinikmati (4500)	%	2%	2%	2.000	2,60%	6.950	3,20%	2.000	3,80%	2.000	4,40%	2.000	5%	2.000	5%	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
	150	Program Pembinaan Perpustakaan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	%	5%	5	2.000	15	2.000	25	2.000	35	2.000	45	2.000	55	2.000	55%	Perpustakaan	Bapustarda

Kearsipan																				
151	penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasis TIK	%	0	0	200	20	241	40	200	60	200	80	200	100	200	100%	Kearsipan	Dinas Kearsipan	
152	Perbaikan sistem administrasi kearsipan																	Kearsipan	Dinas Kearsipan	
153	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan																	Kearsipan	Bapustarda	
Administrasi Kependudukan																				
246	Program Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	0	0	-	20	300	40	300	60	300	80	300	100	300	100	Administrasi Kependudukan	Dinas Admindukcapil dan KB, Dinas PPPAK	
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																				
247	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB	Persentase Kader GSI Aktif.	%	0	0	343	20	1.000	20	1.000	30	1.000	40	1.000	50	1.000	50	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas PPPAK, Dinas Admindukcapil dan KB	
248	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Persentase BKB dan Sub BKBD Aktif	%	0	0	40	20	500	40	500	60	500	80	500	100	500	100	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas PPPAK, Dinas Admindukcapil dan KB	
249	Program Peningkatan dan Pelayanan Keluarga Berencana					283												Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Admindukcapil dan KB	
Urusan Pemerintahan Pilihan																				
Kelautan dan Perikanan																				
154	Pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	ton	130.000	134.000	26.579	5.000	137.000	8.000	141.000	10.000	145.000	12.000	150.000	13.000	155.000	15.000	155.000	Kelautan dan Perikanan	Diskanalut
155	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan	(Kg/ka pita/th n)	47,43	48,50	3.000	49,50	5.000	50,50	7.000	51,50	10.000	52,50	12.000	55,20	14.000	55,20	14.000	Kelautan dan Perikanan	Diskanalut
156	Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap	ton	248.000	250.000	10.000	252.000	15.000	254.000	20.000	256.000	25.000	258.000	30.000	260.000	35.000	260.000	260.000	Kelautan dan Perikanan	Diskanalut
157	Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pelaku usaha yang patuh	%	30	37	2.000	46	3.000	60	4.000	68	5.000	77	6.000	81	7.000	81	81	Kelautan dan Perikanan	Diskanalut
158	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					2.300													Kelautan dan Perikanan	Diskanalut
159	Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					4.279													Kelautan dan Perikanan	Diskanalut
Pariwisata																				
160	Program Pengembangan Pariwisata	Persentase Kenaikan Jumlah Wisnus	%	0 % (627.859 org)	10	3.500	10	5.500	20	3.500	20	3.500	20	3.500	20	3.500	100 (1.312.778)	Pariwisata	Dinas Pariwisata	
		Persentase Kenaikan Jumlah Wisman	%	0 % (26.975 org)	5		5		10		10		10		10		50% (39.584)	Pariwisata	Dinas Pariwisata	
		Lama Tinggal Wisnus	hari	3	3		3		4		4		5		5		5	Pariwisata	Dinas Pariwisata	
		Persentase pembangunan jumlah objek daya tarik pariwisata	%	20	30	10.000	40	10.000	50	12.000	60	15.000	70	18.500	80	15.000	80	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Dinas JUBB	
		Persentase Peningkatan jumlah kelompok sadar wisata	%	102 kpk	20%	750	20%	1.000	20%	1.000	20%	1.100	20%	1.400	20%	1.200	120%	Pariwisata	Dinas Pariwisata; DiskopJKM; BPMPD;	
		Persentase Peningkatan jumlah usaha dibidang wisata	%	1410 usaha	5%		5%		7%		8%		10%		10%		45%	Pariwisata	Dinas Pariwisata; DiskopJKM; BPMPD;	
161	Pengembangan Pemasaran Pariwisata					1990												Pariwisata	Disporbudpar	
162	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta dan Sadar Wisata Masyarakat					810												Pariwisata	Disporbudpar	
163	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata Kelembagaan dan SDM Pariwisata					225												Pariwisata	Disporbudpar	
164	Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya Serta Produk Wisata Minat Khusus					2402												Pariwisata	Disporbudpar	
Pertanian																				
165	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan				236.168	22.000	226.150	23.000	240.195	24.000	257.344	25.000	277.399	26.000	291.559	27.000	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Padi :	%	3	3		3		3		3		3		3		3	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Jagung :	%	4	4		4		4		4		4		4		4	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Kedelai :	%	15	15		15		15		15		15		15		15	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Persentase peningkatan Produksi dan produktivitas Hortikultura				8.000		13.000		15.000		17.000		19.000		21.000		Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Bawang Merah :	%	10	10		10		10		10		10		10		10	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Cabe :	%	5	5		5		5		5		5		5		5	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
		Jeruk :	%	3	3		3		3		3		3		3		3	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	
166	Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan rendemen gabah-beras 1%lahun	%	62	63	4.000	64	5.500	65	6.500	66	7.500	67	8.500	68	8.500	68	Pertanian	Dinas Pertanian TPH;	

	ESDM							24.714		25.100		28.100		31.500		35.200		38.200			
	191	Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi	Rasio Elektrifikasi	%	84,23	85	9.800	85,50	13.100	86	14.500	86,50	16.500	87	18.900	87,50	20.800	87,50	ESDM	Distamben	
			persentase Pemakaian energi baru terbarukan	%	302 unit	16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		192 unit	ESDM	Distamben	
	192	Pengembangan sumberdaya mineral, geologi dan air tanah	Luas cekungan air tanah di Kalsel	Ha	1869100	-	2.600	100000	8.000	100000	9.300	100000	10.300	100000	11.300	100000	12.400	500000	ESDM	Distamben	
			Persentase penyediaan air tanah untuk sumur bor	%	52 unit	16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		16,67		24 Unit	ESDM	Distamben	
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa sumber daya mineral, geologi dan air tanah	%	0	67,5		70		72,5		75		77,5		80		80	ESDM	Distamben	
	193	Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup, dan Pengusahaan Bidang Pertambangan	Persentase Luas Lahan terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh Pemegang IUP dan Izin Pertambangan	%	63,1	70	4.000	71	4.000	72	4.300	73	4.700	74	5.000	75	5.000	75	ESDM	Distamben	
	194	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan					3516,408														
	195	Program Kerjasama, Promosi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan					911,449														
	196	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi					2828,024														
	197	Program Pengelolaan Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum					1057,976														
		Perdagangan					3100		3200		3.500		3.800		4.200		4.600				
	198	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan bersih nilai ekspor	%	0	>40	1.400	>40	1.100	>40	1.200	>40	1.300	>40	1.400	>40	1.500	>40	Perdagangan	Dinas Perdagangan	
			Persentase Pertumbuhan ekspor non tambang	%	5	5		5		5		5		5		5		5	Perdagangan	Dinas Perdagangan	
	199	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi sektor PDRB Perdagangan	%	8	8	1.200	8	1.300	8	1.400	8	1.500	8	1.700	8	1.800	8	Perdagangan	Dinas Perdagangan	
	200	Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase tindak lanjut hasil lemuam pengawasan barang beredar sesuai dengan ketetapan	%	0	80	500	80	800	80	900	80	1.000	80	1.100	80	1.300	65	Perdagangan	Dinas Perdagangan	
		Perindustrian					4000		4700		5.200		5.700		6.300		6.900				
	201	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan Menengah	%	3,6	5	2.000	5	1.100	5	1.200	5	1.300	5	1.400	5	1.500	5	Perindustrian	Dinas Perindustrian	
	202	Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Persentase penambahan jumlah sentra industri baru	%	5,26	5	400	5	1.500	5	1.600	5	1.800	5	2.000	5	2.200	5	Perindustrian	Dinas Perindustrian	
	203	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi industri	%	5	5	1.600	5	2.100	5	2.400	5	2.600	5	2.900	5	3.200	5	Perindustrian	Dinas Perindustrian	
		Transmigrasi					1000		1000		1.100		1.250		1.450		1.550				
	204	Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi	%															Transmigrasi	Disnakertrans	
	205	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	0	1 UPT	400	2 UPT	500	3 UPT	600	4 UPT	650	5 UPT	750	6 UPT	800	6 UPT	Transmigrasi	Disnakertrans	
	206	Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi	Persentase Sumber Daya Transmigrasi	%	0	1 UPT	600	2 UPT	600	3 UPT	500	4 UPT	600	5 UPT	700	6 UPT	750	6 UPT	Transmigrasi	Disnakertrans	
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					211250,7		330122,6		213.364		194.522		195.691		236.233				
	207	Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama	Persentase Terbinanya Lembaga FKUB	%	100	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)	
	208	Pembinaan Kelembagaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Kelembagaan keagamaan terlibat pada hari-hari besar keagamaan	%	40	50	1.500	60	1.500	70	1.500	80	1.500	90	1.500	100	1.500	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)	
	209	Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang memperoleh Pendidikan/Latihan Kedinasan	%	-	20	35.037	30	9.214	40	18.881	60	19.831	70	20.581	80	20.581	80	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengembangan SDM Daerah	
	210	peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik (69 jenis pelayanan, baru 28 dilaksanakan)	Persentase Peningkatan Layanan yang diberikan kepada masyarakat	%	40,58	45	750	50	750	55	750	60	750	65	750	70	750	70	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	RS, Perijinan	
	211	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Aparatur Memperoleh Sertifikat Kompetensi	%	20	25	5.000	30	5.900	35	5.000	40	5.000	45	5.000	50	5.000	50	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD / Bandiklatda	
	212	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Informasi Formasi dengan Persyaratan Kompetensi Jabatan	%	100	100	250	100	266	100	350	100	400	100	450	100	500	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD	
	213	Penataan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas SDM Aparatur	%	4	5	2.145		2.145										Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD	
	214	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Persentase ObriK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	%	0	0	3.000	0	7.553	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	
	215	Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penurunan Pelanggaran	%	0	0	600	0	628	0	600	0	600	0	600	0	600	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	
	216	Pengendalian dan pengawasan pembangunan	Persentase Penurunan Pelanggaran	%	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	
	217	Program evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum dan Fasilitas HAM	Persentase Perda Kabupaten/Kota yang menghambat pembangunan	%	100%	100%	650	100%	650	100%	650	100%	650	100%	650	100%	650	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Hukum)	
	218	Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Pembinaan dan Fasilitas Daerah Otonomi Baru	%					1.150										Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Ro. Pem	
	219	Program Peningkatan Bantuan Hukum Daerah Dan HAM	Tertanganinya Gugatan Terhadap Pemerintah Prov. Kalsel Yang Telah Dikucurkan	%	100%	100%	663	100%	678	100%	693	100%	696	100%	765	100%	842	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Ro. Kum	

			Proporsitas Advice Permohonan Bantuan Masyarakat Miskin Yang Diteruskan Ke DAerah	%	100%	100%	365	100%	200	100%	500	100%	550	100%	600	100%	660	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Ro.Kum
	220	Program Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan	Proporsitas Produk Hukum Daerah Yang Ditingkatkan Mutunya	%	100%	100%	1.559	100%	1.973	100%	2.300	100%	2.400	100%	2.600	100%	2.855	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Ro.Kum
	221	Program Reformasi Regulasi	Proporsitas Simplifikasi Produk Hukum Daerah Yang Menghambat Pembangunan	%	100%	100%		80%	1.350	60%	1.400	40%	1.450	20%	1.500	10%	1.600	10%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Ro.Kum
	222	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Proporsitas terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN	%	21/47 = 44,7%	53,2%	100.000	74,5%	100.000	83%	120.000	91,5%	100.000	97,9%	100.000	100%	120.000	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PUPR
	223	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Persentase terbangunnya Gedung perkantoran	%	65%	70%	150	75%	21.400	80%	120	85%	75	90%	75	100%	75	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PUPR; Setda (Biro Perlengkapan)
	224	Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Tersedianya pelayanan publik yang berkualitas	unit	5	5	300		2.148										Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PUPR; Setda (Biro Perlengkapan)
	225	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target RPJMD	%	60	70	1.000	75	6.795	80	1.000	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda
	226	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	%	100	100	500	100	2.726	100	500	100	500	100	500	100	500	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
	227	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian Anggaran dan Kesesuaian Belanja	%	80	82	6.000	84	3.350	86	6.000	88	6.000	90	6.000	92	6.000	92	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
	228	Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan	%	75	80	800	83	800	86	800	89	800	92	800	95	800	95	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
	229	Peningkatan Realisasi Anggaran (Realisasi / Rencana menurut waktunya)	Persentase Realisasi Anggaran dengan Rencana Belanja	%	25	30	400	50	400	75	400	100	400	100	400	100	400	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
	230	Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah	Persentase Temuan BPK	%	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
	231	peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kemandirian Viskal (PAD terhadap APBD)	%	54%	54%	400	56%	50.000	58%	400	60%	400	62%	400	63%	400	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
			Persentase kesesuaian Anggaran dan Kesesuaian Belanja	%	80	82	6.000	84	6.000	86	6.000	88	6.000	90	6.000	92	6.000	92	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPKD
	232	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Litbang yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan	%	25	30	3.000	40	5.245	50	3.000	60	3.000	70	3.000	80	3.000	80	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Balitbangda
	233	Penguatan Manajemen Kelitbang	Persentase Kerja sama Penelitian kab/Kota	%	30	40	200	50	3.000	60	200	70	200	80	200	90	200	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Balitbangda
	234	Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah	Persentase Tersedianya data dan informasi yang update oleh SKPD	%	0	0	-	20	1.600	40	720	60	720	80	720	100	720	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda; Biro Org;Sekr.Korpri; BPMPD
	235	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat miskin	%	60	65	550	70	600	75	600	80	600	85	600	90	600	90	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda
	236	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Persentase Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	%	75	75	327		327										Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD
	237	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Porsntasi Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	%	7,7	8	200	23	870	46	200	69	200	92	200	100	200	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Ekonomi, Biro Tapem dan Bappeda
	238	peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	3.000	100	54.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Set DPR
	239	Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana publik	%	13	13	20.000	30	20.000	45	20.000	60	20.000	75	20.000	100	40.000	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro KAP)
	240	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase sarana keagamaan yang dibina	%	5	10	5.000	15	5.000	20	5.000	25	5.000	30	5.000	35	5.000	35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
	241	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase Kelembagaan keagamaan terlibat pada hari-hari besar keagamaan	%	40	50	1.500	60	1.500	70	1.500	80	1.500	90	1.500	100	1.500	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
	242	Peningkatan Sarana dan prasarana Keagamaan	Persentase sarana keagamaan yang dibina	%	5	10	5.000	15	5.000	20	5.000	25	5.000	30	5.000	35	5.000	35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
	243	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Tersedianya SOP Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	dok	20	30	2.105		2.105										Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BPTSP



LAMPIRAN 2

PRIORITAS KEPALA DAERAH

Tabel Daftar Prioritas Kepala Daerah

MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
MISI 1 MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL.	
PRIORITAS 1 KALSEL CERDAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) 12 tahun, dan Angka Harapan Lama Sekolah. 2. Pendidikan Lebih baik. 3. Penyiapan anggaran pendidikan, olahraga dan beasiswa. 4. Meningkatkan pemberian beasiswa, dan kunjungan asrama siswa Indonesia dan luar negeri. 5. Menetapkan sentra unggulan olahraga utk msg=msg kabupaten. 6. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren, 7. Meningkatkan kesejahteraan guru, dan 8. Meningkatkan kualitas guru yg standart di seluruh Kalsel. 9. Fasilitas pendukung belajar dan mengajar. 10. Mendirikhn beberapa sekolah gratis. 11. Penyediaan baju olahraga di Rt.01 Gunung Ulin Kec.Martapura Kab. Banjar. 12. Pemerataan distribusi Guru yang berkualitas 13. Melengkapi Sarana dan Prasarana Pendidikan 14. Pencegahan anak Putus Sekolah 15. Penyelenggaraan Pendidikan Paket A,B, dan C 16. Peningkatan motivasi penduduk untuk mampu baca tulis latin melalui penghargaan 17. Sinergi pedidikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
PRIORITAS 2 KALSEL SEHAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Indikator Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 74 Tahun 2. Pembenahan, Peningkatan dan Pembangunan Puskesmas 3. Pembangunan 26 buah Puskesmas Baru. 4. Bantuan alskes untuk 2 kabupaten. 5. Penyediaan tenaga kesehatan hingga tingkat desa 6. Peningkatan distribusi layanan kesehatan dasar 7. Regionalisasi Rumah Sakit



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
	<ol style="list-style-type: none">8. Melengkapi Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat9. Meningkatkan Promosi Kesehatan melalui sosialisasi dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kepada masyarakat, melalui berbagai media yang tersedia, seperti media cetak, baliho, internet, serta melalui jalur kegiatan keagamaan ataupun kegiatan ormas lainnya di perdesaan.10. Menekan angka kematian yang disebabkan oleh Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB), melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Melanjutkan penyediaan tenaga bidan didesa (1 desa 1 bidan), yang diperkuat dengan tenaga perawat dan kesehatan lingkungan lebih mengutamakan masyarakat yang ada di desa tersebut untuk dididik menjadi bidan, perawat dan kesling desa.b. Menyediakan peralatan dan tempat untuk melahirkan di rumah bidan desa.c. Menyediakan peralatan yang menunjang kelahiran di tiap puskesmasd. Sosialisasi kepada pasangan usia subur dan ibu hamil, tentang perlunya memeriksakan dini ibu hamil, serta merencanakan kelahiran.e. Sosialisasi melalui berbagai media untuk menekan angka pernikahan dini.f. Sosialisasi tentang makanan bergizi dan cara pengolahannya.11. Menekan angka kematian usia remaja s/d dewasa, akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Sosialisasi dan edukasi tentang hidup sehat kepada seluruh masyarakat melalui berbagai media, untuk mengurangi tingkat masalah kesehatan akibat PTM.b. Sosialisasi dan edukasi tentang perlunya menjaga kesehatan melalui pola makan yang benar(bergizi) dan olah raga secara teratur.12. Menyediakan peralatan kesehatan yang memadai untuk menjadikan puskesmas rawat inap.13. Mengupayakan penyediaan dokter spesialis tiap kabupaten/kota.14. Meningkatkan penyediaan supply air bersih dan sanitasi layak.15. Meningkatkan upaya kesadaran kebersihan lingkungan rumah dan kawasan permukiman.16. Mendorong pengembangan Olahraga Masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Mendorong kabupaten/Kota untuk menyediakan sarana jogging/ jalan/lari bagi masyarakat.b. Mendorong agar setiap komponen masyarakat untuk melaksanakan olahraga/senam secara berkala di lingkungan permukiman/tempat kerja masing-masing.
PRIORITAS 3 KALSEL TERAMPIL	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan SMK dan BLK utk siapkan tenaga terampil2. Sertifikasi Pencari Kerja (angkatan kerja).3. Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan memprioritaskan untuk putra daerah atau orang banua.4. Mempertimbangkan penggunaan tenaga outsourcing di perusahaan.5. Menciptakan peluang kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan manufaktur.



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan Sekolah Kejuruan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) Percepatan peningkatan rasio SMK: SMU, melalui pembangunan SMK atau mentransformasi SMA menjadi SMK. b) Mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan pasar kerja, di setiap kabupaten/kota c) Memantapkan kinerja lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang professional dan siap memasuki pasar kerja, melalui bantuan sarana dan prasarana SMK. d) Menyiapkan tenaga Guru SMK yang berkualitas, melalui pelatihan tenaga guru SMK yang ada dan tenaga Guru SMU yang akan di transformasi menjadi guru SMK. 7. Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar Internasional, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Merehabilitasi BLK yang ada. Melalui kerjasama dengan beberapa BLK lain, serta dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. b) Meningkatkan peran BLK tersebut untuk dapat melatih usia kerja untuk menjadi tenaga terampil, sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja. 8. Meningkatkan Ketrampilan para pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan ketrampilan 9. Pengembangan Standarisasi dan Pengembangan Uji Kompetensi keterampilan tenaga kerja skala global, nasional dan lokal.
PRIORITAS 4 KALSEL BERIMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Usia Sekolah yg beragama Islam Khatam Al-Qur'an. 2. Pembangunan Mesjid Agung 3. Perbaikan musholla di Desa galam Rabah Kec. Kintapuri Darussalam. Kab. Banjar. 4. Perbaikan musholla Darussalam Kab. Banjar. 5. Pengadaan fasilitas Perpustakaan Mensjid Sabilal Muhtadin 6. Pengembangan Air Mancur Sabilal Muhtadin. 7. Perencanaan pembangunan masjid Nuriyah di Banjarbaru 3 Lantai.
MISI 2 MEWUJUDKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK.	
PRIORITAS 5 KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian WTP 2. Pencapaian Lakip A 3. Pembangunan Balai Rakyat dan lapangan Bola perkecamatan. 4. Rehabilitasi Kantor Gubernur di Bjm dan Pembangunan Tugu Nol. 5. Lanjutan Penyelesaian Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemprov di Banjarbaru. 6. Penyediaan informasi melalui mediA BILLBOARD di Soeeta dan Syamsudinnoor serta melalui berbagai media nasional.



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
	7. Pembangunan program komputerisasi (E-government, E-budgetting, E-Procurement, E-Catalog, E-Audit, E-Perda). 8. Pencegahan terjadinya pelanggaran tindak pidana korupsi (minimal WTP). 9. Memaksimalkan dan membeck up dana untuk desa. 10. Membenahi problem kemasyarakatan lainnya 11. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan PNS.
MISI 3 MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASIS KAN KEARIFAN LOKAL.	
PRIORITAS 6 KALSEL BERBUDAYA	1. Gerakan-gerakan budaya berbasis masyarakat (gerakan hidup sehat; gerakan bebas sampah; gerakan penghijauan, gerakan tertib berlalu lintas; dsbnya) 2. Menurunnya permasalahan PEKAT (NARKOBA, MIRAS, PERKELAHIAN, DSBNYA). 3. Pengembangan Taman Budaya. 4. Pembenahan dan Rehabilitasi bangunan bernilai sejarah (situs kerajaan, masjid dan bangunan lainnya). 5. Pembangunan Kampung Banjar. 6. Membenahi problem kemasyarakatan lainnya. 7. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan dan perumahan murah/rusun murah. 8. Perang terhadap Narkoba. 9. Pembuatan balai adat di kecamatan loksado 10. Penghargaan tokoh adat yg termuat dalam perda agar ada insentif.
PRIORITAS 7 KALSEL AMAN	1. Pelatihan Menwa dan Penyediaan Baju Menwa. 2. Perenc. Pemb/rehab Kantor Rindam VI Mulawarman. 3. Perenc. Pemb. Rehab. SPN Polda
PRIORITAS 8 KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON	1. Terbangunnya Sport Center.
MISI 4 MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA.	
PRIORITAS 9 INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS	1. Terbangunnya infrastruktur penunjang perekonomian: <ol style="list-style-type: none"> Bandara Syamsudin Noor Jalan Bebas Hambatan Banjarmasin-Batulicin Jalan Kereta Api BJM-Tanjung dan BJM-Batola Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut-Pulau Kalimantan.



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
	<ul style="list-style-type: none">e. Peningkatan Jalan Tanjung Serdang Lontar.f. Terbangunnya BRT.g. Penyelesaian Jalan Lingkar Dalam Selatan (Gatsu-Lingkar Selatan)h. Penyelesaian Jalan Sungai Ulin – Matraman.i. Penyelesaian Jalan New Bandara (Lingkar Utara- Bandara).j. Jalan Bebas Hambatan Banjarmasin – Banjarbaru – Martapurak. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Lautl. Pembangunan Jembatan Tabukan dan Aksesnyam. Pembangunan Jalan Marabahan – Margasari BuaBuas – Negara dan BuasBuas – Tabatan Barun. Penyelesaian DI Tapin, DI Batang alai HST, DI Pintap Balangan, DI Amandit HSS dan DI Kinarum Tabalongo. Mendukung Penyelesaian dan Pembangunan Jalan Kereta Apip. Mendukung Penyelesaian dan Pembangunan Pelabuhan Laut Pelaihariq. Pembangunan BRT di Wilayah Kawasan Metropolitan Banjarbakula2. Terbangunnya infrastruktur pendukung sosial budaya:<ul style="list-style-type: none">a. Penyelesaian SPAM Regional Tahap IIb. Pembangunan Pengelolaan Sampah Regionalc. Peningkatan Rasio Elektrifikasid. Peningkatan Rasio Jumlah Desa Berlistrik.3. Jalan raya bagus sampai perdesaan lengkap dgn Rambu serta Penerangan Jalan.4. Meningkatkan Infrastruktur (jalan, Pelabuhan, Laut dan Sungai).5. Membenahi macet6. Penyediaan genset di Rt.01 Gunung Ulin Kec.Martapura Kab. Banjar.7. Pengaspalan jalan di Rt.01 Gunung Ulin Kec.Martapura Kab. Banjar.8. Perbaiki jembatan di desa sungai jelai Banjarmasin.9. Pengaspalan jalan di desa dalam pagar kec. Martapura10. Pembangunan jalan km 10-58 2 paket.11. Pengadaan lampu jalan kekelampayain dari Jl. A. Yani.12. Menyusun RDTR Kawasan Strategis Provinsi:<ul style="list-style-type: none">a. Kawasan Metropolitan Bnjarbakulab. Kawasan Batang Banyuc. Kawasan Industri Batulicind. Kawasan Industri Joronge. Kawasan KEK di Mekarputih



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
MISI 5 MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.	
PRIORITAS 10 SENTRA PANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tercapainya Surplus beras, daging dan ikan.2. Berkembangnya tanaman sayuran dan buah-buahan sesuai dgn agroklimat lokal.3. Swasembada Pangan (kindai Limpuar) dgn Buka 10.000 Ha lahan pertanian.4. Penataan kepemilikan lahan pertanian5. Irigasi yang baik.6. Mengurangi ketergantungan sandang pangan dari luar provinsi.7. Penyiapan kebutuhan pestisida dan bibit perkebunan dan pertanian.8. Membangun 10 sentra perikanan air tawar dan laut, yg dilengkapi lemari pendingin.9. Membangun armada nelayan, dan memudahkan utk dapatkan bahan bakar.10. Pengembangan Budidaya ikan lokal.11. Meningkatkan ternak daerah, mengurangi pasokan sapi dari luar daerah.12. Mestabilkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program beras miskin.13. Menciptakan peluang kerja di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan manufaktur.14. Perlengkapan pertanian di desa Murung Kec. Benawa Barabai.15. Surplus Beras:<ol style="list-style-type: none">a. Menata dan Memantapkan lahan pertanian berkelanjutan, pada Perda RTRWP Kab/Kota.b. Menyelesaikan pembangunan Daerah Irigasi.c. Mencetak Sawah barud. Meningkatkan penyediaan benih bermutu.e. Meningkatkan kualitas penyuluhf. Meningkatkan upaya diversifikasi pangan.16. Surplus Daging:<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatkan jumlah ternak bibitb. Memantapkan Pelaksanaan Inseminasi buatanc. memngendalikan pemotongan hewan produktif.17. Surplus Ikan:<ol style="list-style-type: none">a. Menata Kawasan perairan daratan dari illegal fishing terutama terhadap anak-anak ikan.b. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui penyediaan paket budidaya, pembinaan, serta pemberian teknologi budidaya.c. Mengembangkan budidaya ikan lokal18. Menentukan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian, seperti kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
	<p>pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan,</p> <p>19. Mengembangkan kawasan pertanian terpadu, seperti peternakan dan perkebunan.</p> <p>20. Pengembangan (Kawasan Pertanian: Agropolitan dan Minapolitan), dengan cara penumbuhan dan pengembangan komoditas, serta peningkatan produksi dan produktivitas untuk memantapkan basis agro industri.</p>
<p>PRIORITAS 11 KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL</p>	<p>1. Terbangunnya destinasi wisata unggulan Kalsel serta infrastruktur pendukungnya.</p> <p>2. Peningkatan Industri pariwisata (meliputi wisata agamis, budaya, kuliner, sungai, wisata laut wisata adventure dan batu permata).</p> <p>3. Pembangunan Tugu Nol.</p> <p>4. Partisipasi masyarakat</p>
<p>PRIORITAS 12 INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA</p>	<p>1. Terbangunnya Pusat Distribusi Regional Kalimantan (Pasar Induk)</p> <p>2. Terbangunnya Kawasan Pameran Dagang berskala Nasional.</p> <p>3. Penyelesaian permasalahan Kawasan Industri Batulicin dan Jorong menjadi CNC.</p> <p>4. Berkembangnya sentra-sentra industry kecil pengolahan hasil pertanian.</p> <p>5. Peningkatan Kinerja Bank Kalsel, menuju Bank Devisa.</p> <p>6. Menciptakan keadaan atau iklim kemudahan berinvestasi melalui:</p> <p>7. Meningkatkan peran dan kinerja Badan Perijinan Terpadu, untuk peningkatan kualitas dan kemudahan perizinan di Kalsel</p> <p>8. Meningkatkan peran dan kinerja BKPM untuk menarik investor ke Kalsel, melalui:</p> <p>9. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila mau investasi di Kalsel, serta</p> <p>10. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi di atas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi.</p> <p>11. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel.</p> <p>12. Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel</p> <p>13. Memberdayakan perusahaan daerah.</p> <p>14. Perbaikan 100 pasar tradisional</p> <p>15. Menetapkan sentra-sentra unggulan bisnis</p> <p>16. Pembangunan Pasar Tradisional di desa Murung Kecamatan Batu Benawa</p> <p>17. Adanya pasar tradisional di desa bakarung kec. Angkinang.Kandangan.</p> <p>18. Jalan-jalan ke BJM dari desa bakarung kec. Angkinang.Kandangan.</p> <p>19. Operasional Dekranasda</p> <p>20. Penyelenggaraan Nusantara Expo</p>



MISI/PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA/ ARAHAN/KEGIATAN/JANJI
	<ol style="list-style-type: none">21. Meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui:22. Pengembangan UKM-K.23. Meningkatkan/mengembangkan sector pertanian dalam arti luas, serta Perdagangan dan jasa.24. Meningkatkan keanekaragaman produk andalan daerah, baik pada sektor pertanian (komoditas pertanian dalam arti luas); sektor industri (makanan dan minuman) serta ekonomi kreatif lainnya, seperti kerajinan, dsbnya)25. Perlu adanya upaya menurunkan inflasi, untuk mendukung perekonomian Kalsel, melalui:26. Mengembangkan Komoditi penyebab inflasi di daerah27. Menjaga kondisi/patokan agar Inflasi tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan.28. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, melalui pengembangan jaringan infrastruktur.29. Memantapkan kinerja TPID Provinsi dan meningkatkan sinergi dengan TIPD Kabupaten/Kota.30. Mempercepat pembangunan sarana distribusi31. Memantapkan Kawasan Industri yang ada di Kalsel, melalui pembenahan dan pengelolaan yang baik.32. Pembangunan zona industri
PRIORITAS 13 KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS	<ol style="list-style-type: none">1. Pencapaian Indeks KULITAS LH (TUTUPAN LAHAN, KUALTAS UDARA DAN AIR)2. Pembangunan Kebun Raya Banua dan komplek replika rumah Banjar, semacam kampung Banjar.3. Penghijauan sepanjang jalan A. Yani (BJM-MTP) dan sepanjang Jalan Kawasan Perkantoran Pemprov.4. Pembuatan RTH Kawasan Perkantoran Pemprov di BJM.5. Rehabilitasi/Revitalisasi/Pembuatan sungai terkait wisata air, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.6. Reboisasi Besar-besaran termasuk Mangrove.7. Penghijauan8. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah9. Membenahi banjir dan kebakaran.10. Meminimalis terjadinya kebakaran lahan dan mencegah terjadinya kabut asap.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang integral dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan dilantiknya Gubernur Kalimantan Selatan yang terpilih dalam pilkada serentak Tahun 2015 pada Tanggal 12 Februari 2016, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagai bentuk pencapaian Visi Gubernur dalam lima tahun kedepan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Hal tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan RPJMD Teknokratik yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang



Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi



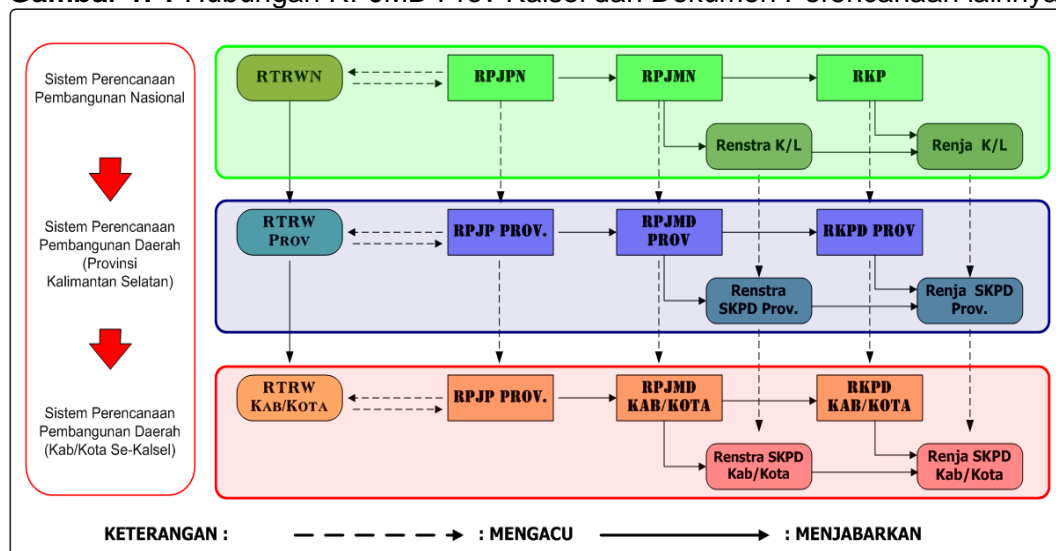
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 Nomor 9)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hubungan antardokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD Prov Kalsel dan Dokumen Perencanaan lainnya



RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap ketiga



Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. RPJMD dan Renstra merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Selain itu RPJMD sinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), terutama terkait dengan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, untuk program-program strategis dan prioritas daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RPJMD, terdiri dari 10 (Sepuluh) bab dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD



3.1.2. Neraca Daerah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas

Utama

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

10.2. Kaidah Pelaksanaan



1.5 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan; dan
5. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
6. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021;
7. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sebuah provinsi yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam sebagai bagian dari kekayaan alam Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki ciri khas kebudayaan daerah yang kental sehingga kehidupan masyarakat masih memiliki karakter yang kuat dalam kesehariannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan haruslah memiliki fondasi yang kuat terutama dalam membangun perekonomian sosial kehidupan masyarakat.

Secara konseptual, pembangunan daerah merupakan tujuan utama dibentuknya suatu wilayah administrasi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hierarki pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi langkah awal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berbudi luhur sesuai dengan adat kebudayaan masyarakat yang berakhlak mulia.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasinya, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

Seiring perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan, saat ini secara administrasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibukota yakni Kota Banjarmasin.



2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

a. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah paling kecil di Pulau Kalimantan dan secara astronomi terletak pada titik koordinat:

- 114 19" 33" Bujur Timur - 116 33' 28 Bujur Timur
- 1 21' 49" Lintang Selatan - 1 10" 14" Lintang Selatan

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara Administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37.280,39 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota dengan rincian 152 kecamatan dan 2.008 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah Laut	3.847,16	11	135
2	Kotabaru	9.539,79	21	202
3	Banjar	4.542,46	19	290
4	Barito Kuala	2.426,55	17	201
5	Tapin	2.171,78	12	134
6	Hulu Sungai Selatan	1.697,98	11	148
7	Hulu Sungai Tengah	1.456,87	11	169
8	Hulu Sungai Utara	906,53	10	219
9	Tabalong	3.581,77	12	131
10	Tanah Bumbu	4.871,39	10	150
11	Balangan	1.826,11	8	157
12	Banjarmasin	97,55	5	52
13	Banjarbaru	314,48	5	20
Kalimantan Selatan		37.280,39	152	2.008

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

b. Kondisi Topografi

Keadaan topografi dapat menggambarkan keadaan suatu wilayah dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya erosi dan sedimentasi, keduanya dianggap merupakan indikator kerusakan yang terjadi pada suatu wilayah. Pada daerah dengan topografi berbukit atau bergunung umumnya termasuk



pada kelerengan yang curam dan biasanya potensi kerusakan lahan sangat nyata, besarnya kecepatan aliran permukaan tanah (surface run-off) menyebabkan tingginya pengikisan permukaan tanah dan rendahnya kesempatan aliran air untuk masuk kedalam tanah (infiltras). Dengan demikian karakteristik topografi suatu wilayah berkaitan erat dengan keadaan kelerengannya. Kecepatan air larian yang besar umumnya ditentukan oleh kemiringan lereng yang tidak terputus dan panjang serta terkonsentrasi pada saluran-saluran sempit yang mempunyai potensi yang besar untuk terjadinya erosi alur dan erosi parit. Kedudukan lereng juga menentukan besar kecilnya erosi yang terjadi, dimana lereng bagian bawah lebih mudah tererosi dibandingkan lereng bagian atas, karena momentum air larian lebih besar dan kecepatan air larian lebih terkonsentrasi ketika mencapai lereng bagian bawah.

Kondisi topografi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berkarakteristik datar sampai landai, yaitu sebesar 74,81%, karakteristik agak curam sampai curam sebesar 19,03% sedangkan 6,16% mempunyai karakteristik sangat curam. Daerah karakteristik datar sampai landai ini meliputi daerah kawasan rawa bagian barat dan kawasan pantai dan pesisir di bagian timur Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan pada bagian tengah-tengahnya adalah jajaran Pegunungan Meratus. Proporsi sebaran karakteristik kondisi topografi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terlihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2. 2 Sebaran Karakteristik Topografi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	Kelas Lereng				Jumlah
	0 - 2%	>2 - 15%	>15 - 40%	>40%	
Tanah Laut	290,147	43,060	26,833	12,890	372,930
Kotabaru	104,337	615,394	166,394	56,148	942,273
Banjar	200,111	114,234	131,550	25,202	471,097
Barito Kuala	237,622	-	-	-	237,622
Tapin	180,376	12,510	18,719	5,890	217,495
Hulu Sungai Selatan	128,057	20,737	19,090	12,610	180,494
Hulu Sungai Tengah	75,281	10,268	49,914	11,737	147,200
Hulu Sungai Utara	95,125	-	-	-	95,125
Tabalong	93,727	92,910	126,608	46,750	359,995
Tanah Bumbu	69,974	241,821	164,903	29,998	506,696
Balangan	123,843	18,961	9,201	29,970	181,975
Banjarmasin	7,267	-	-	-	7,267
Banjarbaru	19,517	12,451	915	-	32,883
Kalimantan Selatan	1,625,384	1,182,346	714,127	231,195	3,753,052
Persentase (%)	43,31	31,50	19,03	6,16	-

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam KDA Prov. KalSel 2009



Pada umumnya atau 71,31% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah 100 m dpl (di atas permukaan laut) sedangkan hanya 28,67% dari luas wilayah berada pada posisi di atas 100 m dpl sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Kelas ketinggian ini sejalan dengan keberadaan gunung-gunung yang mempunyai ketinggian yang bervariasi dan menyambung menjadi satu kesatuan dalam gugus Pegunungan Meratus.

Tabel 2. 3 Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	Kelas Ketinggian (m dpl)						Jumlah
	0 - 7	> 7-25	> 25 -100	> 100 - 500	> 500- 1000	> 1000	
Tanah Laut	58,231	142,133	125,386	17,750	13,661	15,769	372,930
Kotabaru	80,563	167,237	457,728	164,942	65,393	6,410	942,273
Banjar	127,106	16,754	81,037	187,289	43,735	15,176	471,097
Barito Kuala	237,622	-	-	-	-	-	237,622
Tapin	146,455	30,292	14,776	23,351	2,621	-	217,495
Hulu Sungai Selatan	105,198	18,254	16,590	27,546	11,226	1,680	180,494
Hulu Sungai Tengah	17,593	34,995	40,321	38,958	12,521	2,812	147,200
Hulu Sungai Utara	94,825	300	-	-	-	-	95,125
Tabalong	7,062	11,688	148,812	82,277	107,233	2,923	359,995
Tanah Bumbu	6,055	133,298	210,203	155,446	1,671	23	506,696
Balangan	3,530	36,382	66,229	36,129	22,753	16,952	181,975
Banjarmasin	7,267	-	-	-	-	-	7,267
Banjarnbaru	11,014	15,935	5,819	115	-	-	32,883
Kalimantan Selatan	902,521	607,268	1,166,901	733,803	280,814	61,745	3,753,052
Persentase (%)	24,04	16,18	31,09	19,55	7,48	1,64	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam KDA Prov. KalSel 2009

Berdasarkan karakteristik topografinya, Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai dengan kemiringan lahan <2% mencapai 43,31% dan kemiringan lahan 2-15% mencapai 31,50%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 31,09% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2. 4 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian Provinsi Kalimantan Selatan

KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Kelas Lereng (%)		
<2	1.625.384	43,31
2-15	1.182.346	31,50
15-40	714.127	19,03



KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
>40	231.195	6,16
Kelas Ketinggian (m)		
0-7 m	902.521	24,05
7-25 m	607.268	16,18
25-100 m	1.166.901	31,09
100-500 m	733.803	19,55
500-1.000 m	280.804	7,48
> 1.000 m	61.745	1,65

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

c. Geologi

Secara regional bentang alam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar (70%) merupakan daerah dataran rendah hingga dataran bergelombang yang umumnya merupakan dataran pantai dan daerah aliran sungai, selebihnya merupakan bentang alam pegunungan dan perbukitan.

Bentang alam pegunungan di daratan Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 dpl), membentang dengan arah baratdaya – timurlaut mulai Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara.

Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati G. Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 725 m aml. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Prov. Kalimantan Selatan ini penyebarannya terutama terdapat di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di sebelah timur (Dataran Pagatan-Batulicin). Dua dataran ini seakan-akan dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus yang terletak diantara dua dataran tersebut. Sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang mengalir di dua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus tersebut.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1 : 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi,



Bandung, Prov. Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura).

Secara singkat dibahas tentang litostratigrafi atau urutan-urutan pengendapan batuan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini dimulai dari batuan yang berumur tua hingga berumur muda.

1. Batuan Ultramafik dan Batuan Malihan

Batuan tertua yakni berumur Yura yang tersingkap di daerah Prov. Kalimantan Selatan berupa batuan ultrabasa dan batuan malihan. Batuan ultrabasa terdiri atas harzburgit, dunit, serpentinit, piroksinit, gabro, dan basal, sedangkan batuan malihan berupa sekis garnit dan ambifolit. Singkapan batuan-batuan tersebut menempati jalur Pegunungan Meratus bagian selatan mulai dari Pelaihari hingga puncak Pegunungan Kusan di yang merupakan hulu Sungai Satui. Di samping itu batuan-batuan ini tersingkap pula di daerah perbukitan sebelah utara Batulicin dengan puncaknya yakni G. Kukusan (500 m aml), di P. Laut yakni di daerah Salinau dan Berangas. Di P. Sebuku batuan ultra basa ini menempati medan perbukitan di pantai bagian selatan. Sedangkan batuan malihan berupa sekis garnet ambifolit singkapannya sangat terbatas hanya terdapat di jalur Pegunungan Meratus yang bersentuhan dengan singkapan batuan ultrabasa.

Batuan Yura lainnya dengan penyebaran sangat terbatas yakni batupasir kersikan dan rijang radolaria yang singkapannya terdapat di utara G. Kukusan. Sedangkan batuan bancuh yang merupakan batuan tektonik terdapat di perbukitan daerah Kepayang di P. Laut.

2. Formasi Pitap

Formasi pitap ini berumur Kapur, penyebarannya cukup luas menutupi 50 % P. Laut dan P. Sebuku, sedangkan di lembar peta daratan Prov. Kalimantan Selatan tersingkap di daerah morfologi perbukitan yang merupakan bagian lereng Pergunungan Meratus. Litologinya (material penyusun) terdiri atas perselingan konglomerat, batupasir wake, batulanau, dan bersisipan batugamping, breksi aneka bahan, batulempung,



konglomerat, dan basal. Formasi ini diperkirakan mempunyai ketebalan mempunyai antara 1000 – 1500 m.

3. Anggota Paau

Anggota Paau terdiri atas basal amigdaloid, breksi gunung api, tuf kaca, tuf hablur sela, dan basal porfir. Penyebarannya terbatas yakni menempati daerah perbukitan di sekitar Kotabaru. Batuan ini berumur Kapur dan menjemari dengan batuan di atasnya yakni Anggota Manunggul.

4. Anggota Manunggul

Batuan ini singkapannya sangat terbatas yakni menempati medan perbukitan bagian barat lembar peta. Terdiri atas konglomerat dan batupasir berumur Kapur atas dengan lingkungan pengendapan laut dangkal. Anggota Manunggul ini hubungannya menjemari dengan Formasi Pitap maupun Anggota Paau yang berada di bawahnya.

5. Formasi Haruyan

Formasi ini berumur Kapur, terdiri atas lava basal, breksi aneka bahan dan tuf. Ketebalannya mencapai 1.250 m dan menjemari dengan Formasi Pitap. Penyebarannya di P. Laut menempati daerah perbukitan G. Sebatung, Limau, dan Gemuru.

6. Diorit dan Granodiorit

Batuan-batuan ini terdiri atas diorite dan granodiorit, merupakan batuan instrusi atau terobosan yang menrobos Formasi Pitap berumur Kapur. Singkapannya terbatas yakni di sebelah timur Pleihari dan di daerah sekitar puncak Peg. Kusan. Di P Laut tersingkap di Tungkaranasam yakni di pantai barat P. Laut.

7. Granit

Batuan granit ini terutama tersingkap di daerah perbukitan di sebelah timur Kandangan dan Barabai. Batuan ini mengandung senolit granulit dan ambifolit.

8. Formasi Tanjung

Formasi Tanjung berumur Eosen, diendapkan secara tidak selaras di atas batuan-batuan yang berumur Kapur tersebut. Batuan ini dengan perkiraan ketebalan mencapai 1.500 m terdiri atas perselingan konglomerat, batupasir, dan batulempung dengan sisipan serpih, batubara dan batugamping. Penyebaran formasi ini cukup luas, menempati daerah dataran bergelombang dan perbukitan di daerah Paringin (Kab. Balangan)



di utara Batulicin (Kab. TanahBumbu) di daerah Gendangtimburu (Kab. Kotabaru) maupun di P. Laut. Pada daerah-daerah yang ditutupi oleh batuan ini banyak dijumpai kegiatan pertambangan batubara.

9. Formasi Pamaluan

Selaras di atas Formasi Tanjung diendapkan Formasi Pamaluan yang terdiri atas perselingan batupasir dan batulempung dengan sisipan batugamping. Formasi batuan ini berumur Oligosen – Miosen dengan ketebalan antara 500 – 700 m. Singkapannya menempati daerah morfologi dataran di bagian timur peta (Lembar Sampanahan) yakni di daerah Dataran Setangga, Kerang, dan daerah Dataran Teluk Klumpang.

10. Formasi Berai

Penyebaran batuan ini menempati daerah cukup luas, tersingkap di daerah dataran di sebelah barat Batulicin dan daerah Serongga hingga ke daerah perbukitan karst di daerah Cantung- Sungaikupang bagian timur lembar peta. Batuan ini terdiri atas batugamping bioklastik, setempat berselingan napal dan batu pasir. Umurnya Oligosen-Miosen yang hubungannya menjemari dengan Formasi Pamaluan.

11. Formasi Warukin

Formasi Warukin terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung, bersisipan serpih, batu bara, dan batu gamping. Diendapkan secara selaras di atas Formasi Berai. Penyebarannya menempati daerah dataran hingga dataran bergelombang, dan perbukitan di sekitar daerah Pularan di bagian baratdaya lembar peta.

12. Formasi Dahor

Singkapan formasi ini terdapat di daerah dataran hingga dataran bergelombang yang tidak begitu luas. Di bagian barat Jalur Pegunungan Meratus tersingkap dari utara hingga selatan yakni di daerah Tamianglayang, Amuntai, Paringin, Awayan, Juai, Batumandi, Binuang, Loktabat, Cempaka hingga Bati-Bati di daerah Pelaihari Di bagian selatan Jalur Pegunungan Meratus terdapat di daerah Angsana, Jatimulya, Sebamban, dan Srimulya (Kec. Sungailoban, Kab. Tanahbumbu). Batuannya terdiri atas batupasir kuarsa mudah hancur, setempat bersisipan lempung lignit, limonit, kerakal, kuarsa asap, dan basal. Umurnya Pliosen- plistosen dan diendapkan secara tidak selaras di atas



Formasi Warukin. Ketebalan formasi ini diperkirakan mencapai sekitar 750 m.

13. Aluvium

Batuan lepas ini terdapat sebagai endapan sungai, rawa dan pantai dan merupakan endapan termuda hasil erosi batuan-batuan lebih tua yang proses pengendapannya masih berlangsung hingga masa kini. Litologinya terdiri atas kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung dan lumpur. Penyebabnya cukup luas terutama menempati daerah dataran yakni Dataran Sungai Barito di sebelah barat dan Dataran Pagatan-Batulicin di sebelah timur-tenggara jalur Pegunungan Meratus.

Struktur tanah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian didominasi oleh jenis tanah alluvial atau tanah basah (22,80%) yang cocok untuk meningkatkan potensi perekonomian melalui subsektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, jenis tanah yang mendominasi lainnya adalah jenis tanah KPMK, PMKL, dan OGH, dimana rincian jenis tanah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

No (1)	Jenis Tanah (2)	Luas Wilayah (Ha) (3)	Persentase (%) (4)
1	OGH (Organosol gley Humus)	519.881	13,85
2	PMK Dataran Tinggi (Poldosit Merah Kuning Dataran Tinggi)	31.563	0,84
3	PMKL (Poldosit Merah Kuning Litosol dan Latoso)	521.986	13,91
4	PMK Pegunungan (Poldosit Merah Kuning Pegunungan)	48.448	1,29
5	KPMK (Komplek Podsolik Merah Kuning)	806.336	21,48
6	Aluvial	855.717	22,80
7	Latosol	149.457	3,98
8	Litasol	15.291	0,41
9	Podsolid	159.296	4,24
10	PMK (Poldosit Merah Kuning)	645.077	17,19

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

d. Hidrologi

Wilayah Kalimantan Selatan terbagi habis dalam 14 wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) , 26 Sub DAS dan 45 Sub-sub DAS dan setiap DAS dibatasi oleh masing-masing aliran sungai yang berfungsi sekaligus sebagai jalur transportasi sungai, bahan baku untuk air bersih, waduk/bendung/bendungan serta untuk keperluan segala aktivitas kehidupan masyarakat.



DAS yang paling luas cakupannya adalah DAS Barito yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1.863.833,84 ha dan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 4.37.7080,13 ha sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8. di bawah ini.

Pengaruh DAS ini sangat terasa pada setiap saat terjadinya musim kemarau dan musim penghujan terutama pada DAS yang mencakup kawasan yang luas, kondisi DAS, perilaku cuaca dan DAS yang berbatasan secara langsung dengan batas laut karena pengaruh pasang-surut air laut juga sangat menentukan terhadap cepat lambatnya aliran DAS.

Kerusakan DAS dapat indikasikan antara lain pada besarnya frekuensi, lama, besarnya dampak banjir dan kekeringan serta bahan-bahan yang terlarut dalam aliran sungai di lingkungan DAS tersebut.

Tabel 2. 6 Pembagian DAS, Sub DAS dan Sub-Sub DAS Provinsi Kalimantan Selatan

No.	DAS	Luas (Ha)	Sub DAS/ Sub-Sub DAS	Luas (Ha)	Panjang Sungai Utama (km)
I.	BARITO Hilir (Prov. KalSel)	1.863.833,84	BARITO HILIR	189.190,16	83,30
			BARITO TENGAH	110.265,10	70,60
			MARTAPURA	466.625,88	69,30
			Alalak	88.292,60	98,30
			Riam Kanan	164.846,40	97,60
			Riam Kiwa	213.486,88	155,00
			NEGARA	1.097.752,70	208,40
			Amandit	117.920,06	98,90
			Bahalayung	49.742,53	12,80
			Balangan	202.661,49	144,90
			Batang Alai	136.082,77	95,30
			Danau Panggang	94.155,81	66,30
			Tabalong Kanan	173.970,07	92,00
			Tabalong Kiwa	164.431,82	208,40
			Tapin	158.788,15	126,20
BARITO Bagian Hulu (Prov.KalTeng) 4.37.7080,13 Ha					
II.	TABANIO Ds	242.949,78	ANYAR	9.389,97	25,20
			ASAM-ASAM	53.700,75	24,30
			Asam-Asam Besar	37.175,91	72,50
			Inayah	16.524,84	29,40
			GAYAM	15.935,76	32,5
			LOK BUNGUR	10.572,80	9,50
			LOK BUAYA	7.802,94	15,20
			PANDAN	6.761,77	16,60
			SABUHUR	23.072,34	47,80
			SWARANGAN	36.820,04	73,40
			SEPUNGGUR	13.028,00	24,90
			TABUNIO	62.641,86	26,70
			Tabunio Hulu	41.223,81	86,70



No.	DAS	Luas (Ha)	Sub DAS/ Sub-Sub DAS	Luas (Ha)	Panjang Sungai Utama (km)
			Tungkaran	21.418,05	25,00
			MUARA SANIPAH KANAN	3.223,55	13,10
III.	MALUKA	89.352,17	Banyuirang	56.198,95	103,30
			Bati-Bati	33.153,22	44,00
IV.	KINTAP	74.152,35	Hauran	26.342,59	24,17
			Keladan	47.809,76	28,00
V.	SATUI Ds	178.838,36	Cuka	11.648,01	14,63
			Satui	43.108,88	74,34
			Batu Laki	46.163,19	67,08
			Setarap	17.123,04	30,72
			Bunati	7.541,24	6,03
			Sebamban	32.645,48	52,96
			Dua Pumpung	2.435,64	11,76
			Dua Laut	3.881,78	1,76
			Betung	14.291,10	21,88
VI.	KUSAN	195.749,12	Kusan Hilir	87.258,70	217,33
			Kusan Tengah	60.344,68	47,64
			Kusan Hulu	48.145,74	70,07
VII.	BATULICIN	158.807,31	Amaparan Jambu	24.398,38	10,20
			Dua	11.908,29	16,80
			Kusambi	46.747,61	22,40
			Sela	39.997,00	45,90
			Selilau	33.892,73	48,80
			Kepulauan	1.863,30	
VIII.	CANTUNG Ds	338.087,60	CANTUNG	120.037,56	
			Cantung Kiri	60.469,54	20,50
			Gagayan	59.568,02	34,86
			BANGKALAN	52.337,65	48,76
			LINTINGAN	42.633,48	89,10
			RAPIWE	3.391,42	14,98
			SEKANDIS	7.154,44	9,50
			SELUANG	9.299,57	8,70
			SEMONA	10.905,67	18,06
			SENAKIN	7.740,69	14,84
			SERUNGA	61.584,12	12,16
			TAMIANG	13.293,40	30,25
			KEPULAUAN	9.709,60	
IX.	SAMPANAHAN	175.090,77			111,90
X.	MANUNGGUL	51.189,89			68,20
XI.	CENGAL	132.574,43			78,00
XII.	PULAU LAUT	208.352,59	Bekambit	25.520,81	23,90
			Embung-Embungan	52.209,94	18,20
			Sanggung	22.433,61	10,50
			Sejaka	26.668,02	26,80
			Sekojang	46.054,24	13,00
			Semaras	35.465,97	8,70
XIII.	PULAU SEBUKU	21.523,12			6,20
XIV.	Pulau-pulau Kecil	9.338,48			
	JUMLAH	3.739.839,81			

Sumber : BP DAS Barito, 2009



e. Kondisi Jenis Tanah

Data tanah yang digunakan di Kalimantan Selatan bersumber dari Peta Jenis Tanah skala 1 : 500.000 oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tahun 1984 (BP DAS Barito, 2009) dan secara rinci penjelasan mengenai jenis tanah dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

1. **Aluvial** merupakan tanah muda yang berasal dari endapan baru yang berlapis-lapis yang berkembang di dataran aluvial, delta, bekas danau dan daerah pantai. Tanah ini biasanya dicirikan dengan bahan organik yang jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman dan hanya terdapat epipedon ochrik, histik atau sulfurik serta kandungan pasir kurang dari 60%. Tanah ini cocok diusahakan untuk pertanian secara intensif dan di bagian cekungan pada umumnya cocok diusahakan untuk persawahan;
2. **Podsolik merah kuning** merupakan tanah dengan susunan yang beragam dengan horizon penimbunan Nat (horizon argilik), dan kejenuhan basa kurang dari 50 % tidak mempunyai horizon albik/mollik;
3. **Kompleks Podsolik Merah Kuning dan Laterik** merupakan tanah khas daerah tropika lembab yang agak tinggi (terutama laterik). Tanah ini mempunyai solum yang tebal, berwarna merah kekuningan seragam, dan biasanya mengandung Nat lebih dari 50 %, tingkat kebasahan cukup tinggi, tanah gembur dan juga solum tanah yang dalam. Tanah ini penting bagi pertanian, tapi karena unsur haranya kurang maka diperlukan pemupukan;
4. **Podsolik Merah Kuning-Podsol**, jenis tanah ini bersifat gembur dan mempunyai perkembangan penampang. Cenderung tidak seberapa mantap dan teguh, peka terhadap pengikisan. Dari segi kimia, jenis tanah ini asam dan miskin, lebih asam dan lebih miskin dari tanah latosol. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini perlu pemupukan lengkap dan tindak pengawetan;
5. **Kompleks Podsolik Merah Kuning Latosol-Litosol**, batas-batas jenis tanah antara podsolik merah kuning ,latosol dan litoso lini dilapangan tidak jelas adanya sehingga merupakan perpaduan (kompleks);
6. **Organosol Glei Humus** merupakan tanah organik yang sebagian besar merupakan tanah gambut dengan lapisan organik setebal 40 cm atau lebih, pada umumnya terdapat di dataran rendah dan basah. Tanah ini mempunyai unsur hara yang kurang, sehingga kurang baik untuk diusahakan pada sektor pertanian. Lahan pada daerah ini pada umumnya bersifat labil;



7. **Latosol** pada umumnya mengandung Nat lebih dari 60 %, remah sampai gumpal, gembur, warna tanah seragam dengan batas-batas horison yang kabur, solum tanah dalam (lebih dari 150 cm), kejenuhan basa kurang dari 50 %, umumnya mempunyai epipedon umbrik dan horison kambik;
8. **Laterik**, Tanah laterik adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi;
9. **Litosol**, Klasifikasi jenis tanah ini diberikan kepada tanah-tanah yang berada pada batuan kukuh sampai kedalaman 20 cm dari permukaan tanah (Pusat Penelitian Tanah, 1993). Tanah ini merupakan tanah-tanah yang baru berkembang sebagai hasil dari iklim yang lemah (misal terlalu kering), letusan vulkan atau topografi yang miring atau bergelombang (Darmawidjaja, 1997) dan seringkali tampak sebagai batuan padat yang padu. Untuk meningkatkan produktivitasnya, tanah Litosol harus dipercepat proses pelapukannya. Tindakan penghutan, penanaman tanaman-tanaman keras dan penahanan erosi dapat mempercepat proses perkembangan solum tanah;
10. **Regosol - Podsol** jenis tanah ini terbentuk dari bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergunung. Tanah Regosol belum jelas menempatkan perbedaan horizon-horizon. Tanah ini dicirikan oleh tingginya kandungan pasir yaitu lebih besar dari 60 %. Solum tanah bisa bervariasi walaupun umumnya agak dangkal-agak dalam (50 – 75 cm). Drainase umumnya baik dengan kemampuan tanah meresapkan air yang agak tinggi. Tekstur tanah ini biasanya kasar, tanpa ada struktur tanah, konsistensi lepas sampai gembur dan keasaman tanah dengan pH sekitar 6 -7;

Pada umumnya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan didominasi jenis tanah yang kurang subur adalah seluas 57,76% dari luas wilayah yang berasal dari Kelompok Podsolik Merah Kuning (PMK) yang terdiri dari PMK dataran tinggi, PMKL (PMK Litosol dan Latosol), PMK pegunungan serta Kompleks Podsolik Merah Kuning (KPMK) yang juga menggambarkan tanah yang berpotensi kurang subur sedangkan tanah yang subur hanya 13,85% dari luas wilayah. Jenis tanah lainnya didominasi dari jenis tanah kawasan rawa, yaitu dari jenis tanah Alluvial seluas 22,80% dari luas wilayah. Secara rinci jenis tanah di wilayah Kalimantan Selatan terinci pada Tabel 2.7. di bawah ini.

**Tabel 2. 7** Kondisi Jenis Tanah Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Selatan

Kabupaten/ Kota	Jenis Tanah											Jumlah
	OGH	PMK Dat Tinggi	PMKL	PMK Peg	KPMK	Aluvial	Latosol	Litasol	Podsolid	PMK	Litasol/ Latosol	
Tanah Laut	33,536	-	-	-	60,735	140,348	-	-	138,311	-	-	372,930
Kotabaru	-	-	154,220	-	180,500	193,995	57,800	-	-	355,758	-	942,273
Banjar	31,001	-	135,790	-	161,319	117,508	9,609	10,800	-	5,070	-	471,097
Barito Kuala	96,316	-	-	-	-	141,306	-	-	-	-	-	237,622
Tapin	159,865	-	-	-	5,588	12,399	-	-	-	39,643	-	217,495
HSS	77,212	-	-	-	-	62,550	-	-	-	40,732	-	180,494
HST	58,312	31,563	-	48,448	8,877	-	-	-	-	-	-	147,200
HSU	30,395	-	605	-	-	61,795	-	-	-	2,330	-	95,125
Tabalong	23,437	-	-	-	317,700	18,858	-	-	-	-	-	359,995
Tanah Bumbu	-	-	161,028	-	71,617	89,375	56,000	-	-	128,676	-	506,696
Balangan	-	-	70,343	-	-	10,316	23,957	4,491	-	72,868	-	181,975
Banjarmasin	-	-	-	-	-	7,267	-	-	-	-	-	7,267
Banjarnbaru	9,807	-	-	-	-	-	2,091	-	20,985	-	-	32,883
Kalimantan Selatan Persentase (%)	519,881	31,563	521,986	48,448	806,336	855,717	149,457	15,291	159,296	645,077	-	3,753,052
	13,85	0,84	13,90	0,12	21,48	22,80	3,98	0,40	4,24	17,18		-

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam KDA Prov. KalSel 2009

Keterangan:

- OGH: Organosol Gley Humus
- PMK: Podsolik Merah Kuning
- PMKL: Podsolik Merah Kuning Litasol dan Latosol
- KPMK: Komplek Podsolik Merah Kuning

f. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah tropis dimana pada tahun 2014 memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi dengan *range* antara 55% hingga 99% dan temperatur udara sekitar 20,0°C hingga 37,0°C. Selain itu, terdapat beberapa bulan yang memiliki curah hujan tinggi dan beberapa cukup rendah hingga mencapai 5 mm pada Bulan September. Rincian lengkap terkait kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Kelembaban Udara (%) dan Temperatur (0C) Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

No	Bulan	Kelembaban Udara (%)			Temperatur (°C)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Januari	97	72	87	32	22	26
2	Februari	96	80	87	33	22	26
3	Maret	97	81	88	33	22	26
4	April	94	81	97	33	23	27
5	Mei	99	80	86	34	23	27
6	Juni	97	79	87	34	22	27
7	Juli	97	75	83	34	23	27
8	Agustus	96	72	79	34	20	27
9	September	79	59	72	35	20	27



No	Bulan	Kelembaban Udara (%)			Temperatur (°C)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Oktober	92	63	69	37	20	28
11	November	93	55	80	36	21	27
12	Desember	97	78	87	34	23	26

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Tabel 2. 9 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata-rata Tekanan Udara, dan Rata-rata Penyinaran Matahari, Provinsi Kalimantan Selatan

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Tekanan Udara (bar)	Rata-rata Penyinaran Matahari
1	Januari	443	26	1.012	33
2	Februari	220	21	1.009	45
3	Maret	332	24	1.001	49
4	April	223	21	1.001	56
5	Mei	159	27	1.001	62
6	Juni	221	20	1.008	51
7	Juli	113	12	1.011	64
8	Agustus	53	12	1.012	72
9	September	5	6	1.012	80
10	Oktober	16	5	1.011	73
11	November	199	20	1.099	64
12	Desember	387	27	1.010	45

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

g. Penggunaan Lahan

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hutan yang cukup luas meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Meskipun begitu, luas wilayah hutan saat ini mencapai 1.729.195,15 Ha dengan persentase sebesar 46,38 %. Berikut luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 2. 10 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	217.243,30	5,83
2	Industri	16.709,96	0,45
3	Hutan	1.613.431	46,38
4	Perikanan	9.719,83	0,26
5	Pertanian	456.679,77	12,25
5	Perkebunan	1.255.720,86	33,68
6	Air Tambak	15.398,86	0,41
7	Air Danau/Situ	1.697,73	0,05



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Air Tawar Sungai	14.514,43	0,39
9	Air Waduk	5.949,86	0,16
10	Peruntukan Lain	5.208,24	0,14
	Jumlah	3.728.038,65	100,00

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dievaluasi mulai dari unsur geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan, serta pendukung dan transportasi.

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui teknik kebijakan perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah untuk mensinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-masing wilayah kabupaten/kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis wilayah Provinsi terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Nasional dimaksud Kawasan Strategis Nasional Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Kawasan Ekonomi Batulicin dan Kawasan Perkotaan Banjarbakula. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud terdiri atas (1) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; (2) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; (3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri atas:

- a. **Kawasan Perkotaan Banjarbakula** yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan,



Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh- Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur);

- b. **Kawasan Rawa Batang Banyu** yang meliputi wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Balawang, Barambai, Cerebon, Wanaraya, Bakumpai, Tabukan, Kuripan), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Simpang Empat), sebagian Kabupaten Tapin (Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara dan Tapin Tengah), sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang), Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai Tengah, Paminggir, dan Banjang), sebagian Kabupaten Tabalong (Kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Kelua, Muara Harus);
- c. **Kawasan Perdagangan, Industri dan Jasa**, yaitu kawasan yang berbasis pada pengembangan perdagangan, jasa dan industri dan berpotensi menjadi kawasan ekonomi khusus yaitu di Kawasan Mekar Putih dan Kawasan Industri Kotabaru di Kabupaten Kotabaru, Kawasan Industri Jorong (Kabupaten Tanah Laut) dan Kawasan Industri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. **Kawasan Pegunungan Meratus**, yaitu kawasan hutan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kotabaru sampai dengan Kabupaten Banjar termasuk kawasan Tahura Sultan Adam.
- b. **Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**, kawasan terbuka sepanjang pantai tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala;

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara terdiri atas:



- a. Kawasan tertentu di sepanjang pesisir pantai dan laut di Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan dan daerah industri pertahanan;
- b. Kawasan tertentu di Pegunungan Meratus di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan Tapin, sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan;
- c. Kawasan tertentu di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi terutama untuk kebakaran hutan dan banjir, mengingat daerahnya sebagian besar berupa hutan dan kawasan gambut yang memiliki wilayah hamparan yang luas. Pada tahun 2014 belum terdapat catatan hotspot untuk kebakaran hutan (Grafik perkembangan kebakaran hutan pada gambar 2.1). Pada tahun 2013 terjadi bencana alam sebanyak 137 kali kebakaran. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan kejadian kebakaran sebanyak 409 kejadian dengan terbanyak berada di Kota Banjarmasin sebanyak 92 kejadian. Sedangkan kejadian bencana lainnya cenderung mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

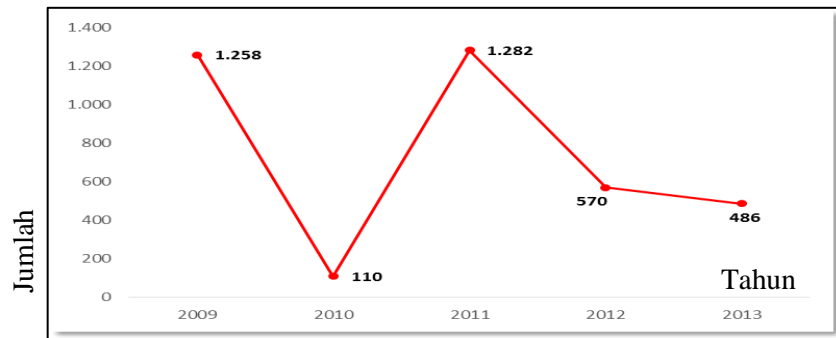
Tabel 2. 11 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2014

NO	JENIS	FREKUENSI	
		2013	2014
1	Kebakaran	137	409
2	Banjir	35	16
3	Tanah Longsor	2	4
4	Putting Beliung	129	18
5	Bencana ROB	1	2
6	Gempa Bumi	0	0
7	HotspotKehutanan	486	-

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014-2015

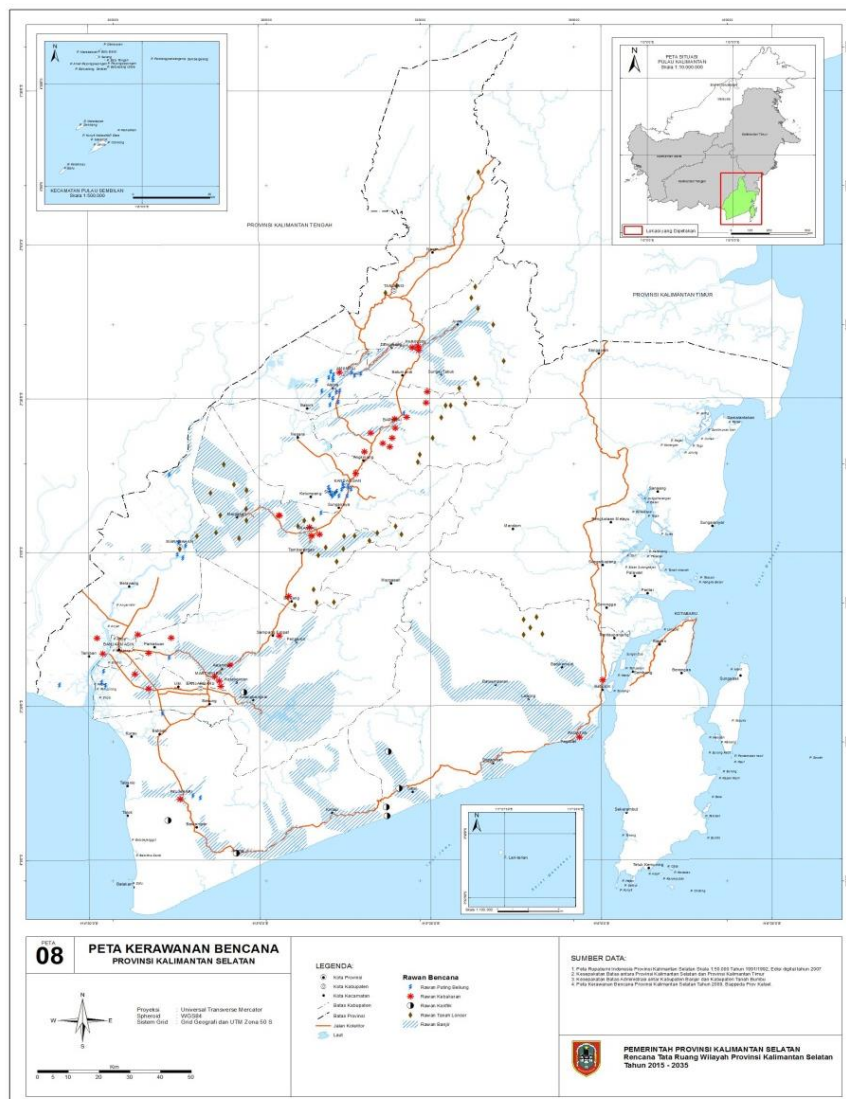


Gambar 2. 1 Sebaran Titik Panas (Hotspot) Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2009-2013



(Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014)

Gambar 2. 2 Sebaran rawan bencana Provinsi Kalimantan Selatan



(Sumber: RTRW Kalimantan Selatan 2015-2035)



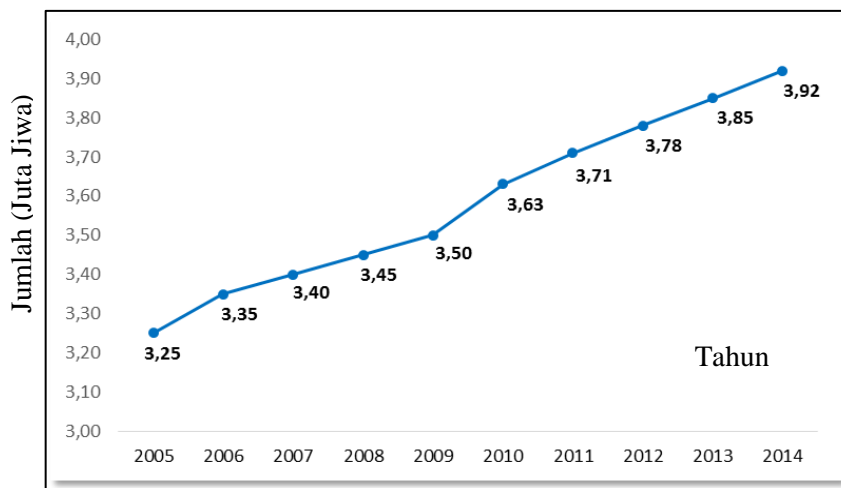
2.1.4 Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

a. Gambaran umum penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami perkembangan yang relatif cepat. Pada tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 3.922.790 jiwa, jumlah ini meningkat dari tahun 2010 yang sebanyak 3.642.637 jiwa. Peningkatan selama kurun waktu tahun 2010 ke tahun 2014 mencapai 280.153 jiwa atau rata-rata sekitar 56.030 jiwa per tahunnya. Gambar berikut ini akan menggambarkan perkembangan penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2014 sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Perkembangan Penduduk (Juta Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

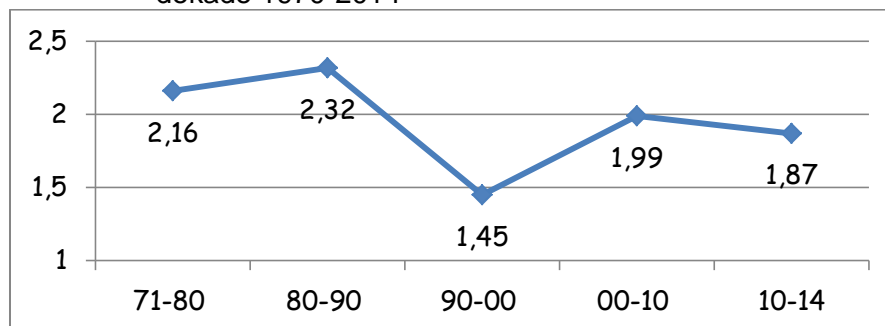
Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun secara otomatis juga meningkatkan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2014 kepadatan rata-rata penduduk mencapai 105 jiwa per km². Wilayah terpadat di Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin, yaitu



sebesar 9.168 jiwa per km². Hal ini dikarenakan Kota Banjarmasin merupakan pusat perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus sebagai ibukota pemerintahan provinsi. Selain itu, Kota Banjarbaru yang merupakan Kota administratif juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup signifikan jika dibandingkan yang lainnya dengan besaran kepadatan penduduk mencapai 692 jiwa per km². Sedangkan Kabupaten Kotabaru hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 33 jiwa per km², padahal kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan.

Akan tetapi apabila dilihat pada 4,5 dekade sebelumnya yang dimulai sejak tahun 1970 hingga tahun 2014 perkembangan pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Perkembangan pertumbuhan penduduk ini mencapai 2,16% selama dekade tahun 1970 hingga tahun 1980, jumlah ini mengalami peningkatan pada dekade tahun 1980 ke tahun 1990 yang menjadi angka 2,32%, kemudian pada dekade 1990 ke tahun 2000 pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan mampu ditekan menjadi 1,45%, akan tetapi dalam dekade tahun 2000 ke tahun 2010 pertumbuhannya meningkat menjadi 1,99 dan selama tahun 2010 hingga tahun 2014 pertumbuhan mencapai 1,87%. Pertumbuhan positif penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 4 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk di Kalimantan Selatan dari dekade 1970-2014



(Sumber: BPS Nasional, 2015)

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2014 hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan laki-laki berjumlah 1.987.127 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 1.935.663 jiwa. Angka tersebut menjadikan *sex ratio* penduduk mencapai 102,66 yang mengindikasikan bahwa diantara 100



penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 102-103 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

No	Kab/Kota	Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	Pertumbuhan Penduduk 2013-2014
		Laki-laki	Perempuan	Total			
1	Tanah Laut	163.784	155.314	319.098	105,45	86	1,71
2	Kotabaru	163.739	150.753	314.492	108,61	33	1,87
3	Banjarnegara	276.936	268.461	545.397	103,16	116	1,69
4	Barito Kuala	147.366	146.743	294.109	100,42	124	1,42
5	Tapin	90.391	88.775	179.166	101,82	82	1,53
6	Hulu Sungai Selatan	112.000	112.474	224.474	99,58	124	1,29
7	Hulu Sungai Tengah	128.464	128.643	257.107	99,86	175	1,28
8	Hulu Sungai Utara	109.120	113.194	222.314	96,40	234	1,42
9	Tabalong	119.767	116.010	235.777	103,24	65	1,75
10	Tanah Bumbu	164.585	151.230	315.815	108,83	62	3,15
11	Balangan	61.009	60.309	121.318	101,16	67	1,80
12	Banjarmasin	333.236	332.987	666.223	100,07	9.168	1,44
13	Banjarbaru	116.730	110.770	227.500	105,38	692	3,08
Kalimantan Selatan		1.987.127	1.935.663	3.922.790	102,66	105	1,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk periode 2013-2014, secara umum laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 1,77 persen dimana laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kabupaten Tanah Bumbu (3,15%) dan Banjarbaru (3,08%).

Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk beragama islam dengan jumlah mencapai 3.505.846 jiwa atau 96,67%. Sianya terbagi antara penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Sementara itu terdapat sekitar 28.776 jiwa dengan penganut kepercayaan lainnya. Meskipun mayoritas penduduk muslim, kehidupan beragama di Kalimantan Selatan memiliki toleransi dan kerukunan yang tinggi sehingga tidak ada perselisihan antar agama di Kalimantan Selatan.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2015

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi
1	Islam	3.505.846	96,67%
2	Kristen	47.974	1,32%
3	Hindu	16.064	0,44%
4	Katolik	16.045	0,44%
5	Buddha	11.675	0,32%
6	Khonghucu	236	0,01%
7	Lainnya	28.776	0,79%
	Total	3.626.616	100,00%

Sumber: BPS Kalimantan Selatan



Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi yang didiami oleh berbagai etnis dan suku dari pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia pada zaman kerajaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 mayoritas etnsi yang ada di Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar dengan persentase 74,34% diikuti dengan suku Jawa, Bugis, dan Dayak.

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis dan Suku Hasil Sensus Tahun 2000 dan Tahun 2010

No	Suku Bangsa	Jumlah (2010) (1)	Persentase (2010)	Jumlah (2000) (6)	Persentase (2000)
1	<u>Banjar</u>	2.686.627	74,34%	2.271.586	76,34%
2	<u>Jawa</u>	524.276	14,51%	391.030	13,14%
3	<u>Bugis</u>	101.727	2,81%	73.037	2,45%
4	<u>Dayak</u>	80.708	2,23%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	<u>madura</u>	53.002	1,47%	36.334	1,22%
6	<u>Mandar</u>	39.841	1,10%	29.322	0,99%
7	<u>Sunda</u>	24.592	0,68%	18.519	0,62%
8	<u>Tionghoa</u>	13.000	0,36%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	<u>Batak</u>	12.408	0,34%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	<u>Bali</u>	11.966	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
	Suku-suku Lainnya	65.845	1,82%	99.165	3,34%
	Total	3.613.992	100,00%	2.975.440	100,00%

Sementara jika dilihat pertambahan penduduk menurut kabupaten/kota, maka yang paling banyak penduduknya bertambah adalah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dengan masing-masing sekama kurun waktu tahun 2010-2014 mencapai 46.234 jiwa, 38.024 jiwa dan 36.306 jiwa atau dalam prosentase sebesar 9,23% di Kabupaten Tanah Bumbu, 7,61% di Kota Banjarmasin dan 7,26% di Kabupaten Banjar. Kondisi Penduduk di Kalimantan selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Perkembangan Penduduk Menurut Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

Kabupaten	JUMLAH PENDUDUK				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kalimantan Selatan	3642 637	3714 340	3 784 981	3 854 485	3922790
Tanah Laut	297 814	303 190	308 510	313 725	319 098
Kotabaru	291 509	297 335	302 982	308 730	314 492
Banjar	509 091	518 207	527 195	536 328	545 397
Barito kuala	277 090	281 433	285 595	289 995	294 109
Tapin	168 599	171 281	173 869	176 468	179 166



Kabupaten	JUMLAH PENDUDUK				
	2010	2011	2012	2013	2014
Hulu Sungai Selatan	213 114	215 984	218 897	221 614	224 474
Hulu Sungai Tengah	244 094	247 522	250 705	253 868	257 107
Hulu Sungai Utara	209 813	212 902	215 980	219 210	222 314
Tabalong	219 696	223 696	227 714	231 718	235 777
Tanah Bumbu	269 581	282 378	295 032	306 185	315 815
Balangan	112 815	115 029	117 088	119 171	121 318
Kota Banjarmasin	628 199	637 873	647 403	656 778	666 223
Kota Banjarbaru	201 222	207 510	214 011	220 695	227 500

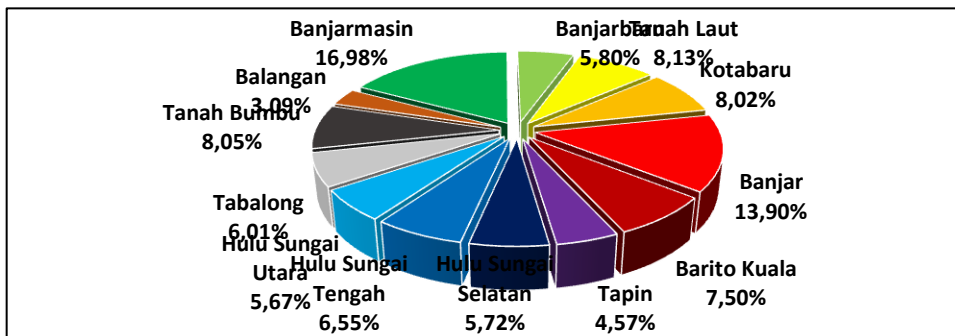
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Selanjutnya Kabupaten yang paling sedikit penduduknya adalah Kabupaten Balangan dengan 121.318 jiwa pada tahun 2014 dan Kabupaten Tapin dengan 179.166 jiwa serta Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah 222.314 jiwa. Namun demikian penambahan penduduk yang paling cepat diantara ketiga kabupaten ini dalam kurun waktu tahun 2010-2014 adalah Kabupaten Balangan yang mencapai 7,54%, kemudian Kabupaten Tapin dengan 6,27% dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan 5,96%.

b. Distribusi penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Ketimpangan distribusi jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi di antara wilayah kota dan kabupaten. Meskipun begitu, ketimpangan distribusi penduduk tidak terlalu signifikan dan berkesan lebih merata terutama pada wilayah kabupaten.

Gambar 2. 5 Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Penduduk Provinsi Kalimantan paling banyak berdomisili di Kota Banjarmasin yaitu sebesar 666.223 jiwa (16,98%). Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat Kota Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, jumlah penduduk

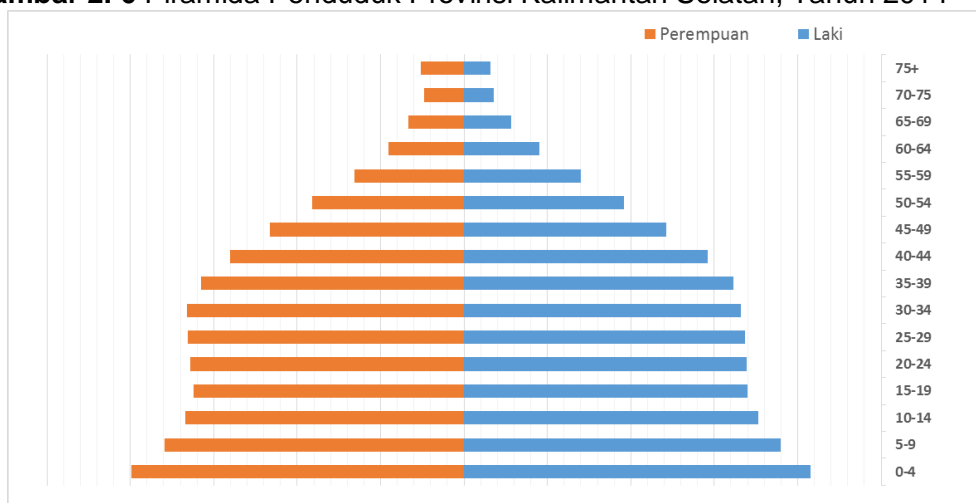


terbesar kedua adalah Kabupaten Banjar yang memiliki jumlah penduduk mencapai 545.397 jiwa (13,90%).

c. Piramida penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun berhasil tidaknya program-program kependudukan selama ini. Di Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Dalam piramida penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan terlihat bahwa jumlah penduduk mulai berkurang pada usia 40 tahun keatas. Hal ini dapat diasumsikan bahwa angka harapan hidup di Kalimantan Selatan masih terbilang rendah dan kondisi derajat kesehatan yang perlu ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan pengendalian jumlah penduduk agar pertumbuhan penduduk yang besar tidak berdampak negatif dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum.



2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan terutama yang terkait dengan perekonomian makro maupun mikro yang secara langsung menggerakkan roda perekonomian daerah.

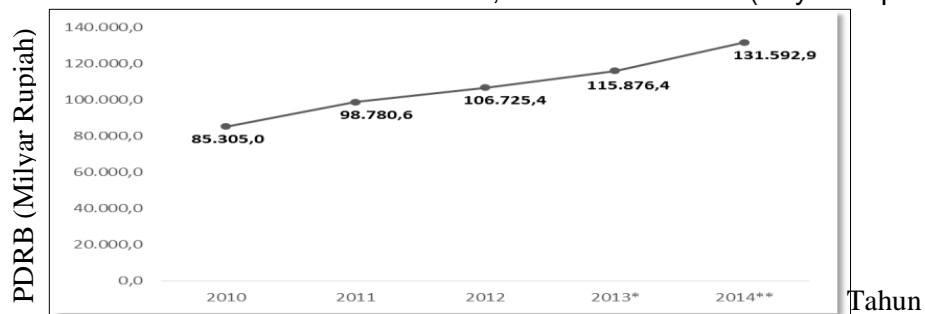
Indikator-indikator yang akan digunakan dalam menganalisis perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), laju inflasi, gini ratio dan PDRB per kapita. Indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi keberhasilan program-program pembangunan perekonomian daerah.

a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah. Oleh karena itu, PDRB Provinsi Kalimantan Selatan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian daerah tersebut dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Perkembangan nilai tambah barang dan jasa (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan positif dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2015



Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2015. PDRB pada tahun 2011 sebesar Rp.98.780,55 miliar rupiah dan pada tahun 2015 meningkat tajam hingga menembus angka Rp.137.5518,03 miliar rupiah. PDRB Provinsi Kalimantan Selatan paling besar dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian karena memang di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat produksi sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 2. 16 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015 (Milyar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.905,86	15.769,4	16,861,73	18,752,98	20,424,48
B	Pertambangan dan Penggalian	30.456,33	31.769,4	33,385,62	34,437,53	31,968,30
C	Industri Pengolahan	12.902,98	13.998,5	14,970,91	16,568,46	18,412,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	64,92	68,3	67,99	84,53	127,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	363,61	380,9	404,89	478,54	533,93
F	Konstruksi	6.670,06	7.290,0	7,978,25	9,191,51	10,626,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.306,76	8.321,3	9,309,39	10,747,81	12,294,44
H	Transportasi dan Pergudangan	5.103,61	5.715,9	6,501,45	7,482,10	8,550,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.666,29	1.837,3	2,047,35	2,369,81	2,619,06
J	Informasi dan Komunikasi	3.014,78	3.266,0	3,531,83	4,090,80	4,500,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.677,46	3.150,7	3,779,13	4,272,13	4,725,13
L	Real Estate	2.015,94	2.188,2	2,403,48	2,747,27	3,023,48
M,N	Jasa Perusahaan	506,50	567,5	640,79	756,06	851,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.982,41	5.639,1	6,489,93	7,278,32	8,642,70
P	Jasa Pendidikan	3.669,75	4.050,2	4,492,70	5,150,46	6,119,13



Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.472,74	1.646,4	1,857,88	2,142,23	2,534,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.000,52	1.066,3	1,134,89	1,347,47	1,563,97
	Total	98.780,55	106.725,4	115,858,20	127,898,02	137,518,03

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2015

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

b. Struktur Perekonomian Wilayah

Untuk mengetahui kinerja pembangunan perekonomian berdasarkan sektor-sektor ekonomi, maka PDRB memiliki gambaran terkait struktur perekonomian daerah yang terjabarkan pada analisa PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kontribusi masing-masing dari nilai tambah produksi barang dan jasa akan berpengaruh dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam analisa PDRB tersebut, terdapat 17 kategori lapangan usaha yang membentuk perekonomian makro maupun mikro sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan berbagai potensi sumber daya pembangunan ekonomi daerah.

Struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (27,03%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,32%), serta sektor industri pengolahan (13,15%). Tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian, mengingat sektor tersebut merupakan sektor sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sehingga perlu kebijakan riil terkait pengalihan sektor untuk mempertahankan kinerja perekonomian daerah di masa depan.

Tabel 2. 17 Perkembangan Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Dalam PDRB Kalimantan Selatan atas Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun Dasar 2010 (Persen) tahun 2010-2015

Kategori	Sektor / Lapangan Usaha	2010		2011		2012	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.06	16.06	15.09	15.40	14.78	14.98
B	Pertambangan dan Penggalian	27.76	27.76	30.83	29.35	29.77	29.65
C	Industri Pengolahan	13.72	13.72	13.06	13.12	13.12	13.07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.40	0.40	0.37	0.38	0.36	0.36
F	Konstruksi	7.13	7.13	6.75	7.03	6.83	7.05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.53	7.53	7.40	7.47	7.80	7.60
H	Transportasi dan Pergudangan	5.35	5.35	5.17	5.29	5.36	5.35



Kategori	Sektor / Lapangan Usaha	2010		2011		2012	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.71	1.71	1.69	1,71	1.72	1.74
J	Informasi dan Komunikasi	3.15	2.15	3.05	3.14	3.06	3.11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.79	2.79	2.71	2.78	2.95	2.85
L	Real Estat	2.12	2.12	2.04	2.11	2.05	2.10
M,N	Jasa Perusahaan	0.51	0.51	0.51	0.51	0.53	0.52
O	Administrasi Pemerintahan, Perumahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.12	5.12	5.04	5.16	5.28	5.15
P	Jasa Pendidikan	3.96	3.96	3.72	3.84	3.80	3.81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.54	1.54	1.49	1.55	1.54	1.57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.07	1.07	1.01	1.04	1.00	1.01
Total		100	100	100	100	100	100

Kategori	Sektor / Lapangan Usaha	2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.55	14.70	14.66	14.64	14.85	14.70
B	Pertambangan dan Penggalian	28.82	29.28	26.93	28.56	23.25	27.81
C	Industri Pengolahan	12.92	12.87	12.95	12.71	13.39	12.90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.08	0.07	0.09	0.09	0.11
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.35	0.35	0.37	0.37	0.39	0.38
F	Konstruksi	6.89	7.08	7.19	7.19	7.73	5.65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.04	7.81	8.40	8.06	8.94	8.53
H	Transportasi dan Pergudangan	5.61	5.45	5.85	5.53	6.22	5.82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.77	1.77	1.85	1.80	1.90	1.88
J	Informasi dan Komunikasi	3.05	3.16	3.20	3.30	3.27	3.51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.26	3.09	3.34	3.14	3.44	3.23
L	Real Estat	2.07	2.14	2.15	2.15	2.20	2.23
M,N	Jasa Perusahaan	0.55	0.53	0.59	0.54	0.62	0.56
O	Administrasi Pemerintahan, Perumahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.60	5.18	5.69	5.21	6.28	5.55
P	Jasa Pendidikan	3.88	3.90	4.03	4.03	4.45	4,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.60	1.63	1.67	1.65	1.84	1.74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.98	0.99	1.05	1.03	1.14	1.07
Total		100	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2016

Tabel 2. 18 Pertumbuhan Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Dalam PDRB Kalimantan Selatan atas Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun Dasar 2010 (Persen) tahun 2010-2015

Katgri	Sektor / Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(0.97)	(0.66)	(0.31)	(0.41)	(0.23)	(0.29)	0.11	(0.05)	(0.19)	0.06
B	Pertambangan dan Penggalian	3.07	1.59	(0.06)	0.30	(0.95)	(0.36)	(1.89)	(0.73)	(3.68)	(0.75)
C	Industri Pengolahan	(0.66)	(0.53)	0.06	(0.11)	(0.20)	(0.21)	0.03	(0.15)	0.44	0.19



Katgri	Sektor / Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00	-	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0.03)	(0.62)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.01)	0.02	0.01	0.02	0.01
F	Konstruksi	(0.38)	(0.10)	0.08	0.02	0.06	0.04	0.30	0.10	0.54	(1.53)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(0.13)	(0.06)	0.40	0.13	0.24	0.21	0.36	0.25	0.54	0.47
H	Transportasi dan Pergudangan	(0.18)	(0.05)	0.19	0.06	0.25	0.10	0.24	0.08	0.37	0.28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(0.02)	(0.01)	0.03	0.03	0.05	0.04	0.08	0.03	0.05	0.08
J	Informasi dan Komunikasi	(0.10)	(0.01)	0.01	(0.03)	(0.01)	0.05	0.15	0.15	0.07	0.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	(0.08)	(0.01)	0.24	0.08	0.31	0.24	0.08	0.05	0.10	0.09
L	Real Estat	(0.08)	(0.02)	0.01	(0.01)	0.02	0.03	0.08	0.02	0.05	0.08
M,N	Jasa Perusahaan	-	0.00	0.02	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03	0.03
O	Administrasi Pemerintahan, Perumahan dan Jaminan Sosial Wajib	(0.08)	0.03	0.24	(0.00)	0.32	0.02	0.09	0.03	0.59	0.35
P	Jasa Pendidikan	(0.24)	(0.13)	0.08	(0.03)	0.08	0.09	0.15	0.13	0.42	0.30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(0.05)	0.01	0.05	0.02	0.06	0.06	0.07	0.02	0.17	0.09
R,S,T,U	Jasa Lainnya	(0.06)	(0.03)	(0.01)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	0.07	0.04	(0.09)	0.04
Total		(0.00)	(0.00)	0.01	0.00	(0.01)	0.00	(0.01)	(0.00)	0.01	0.00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2016

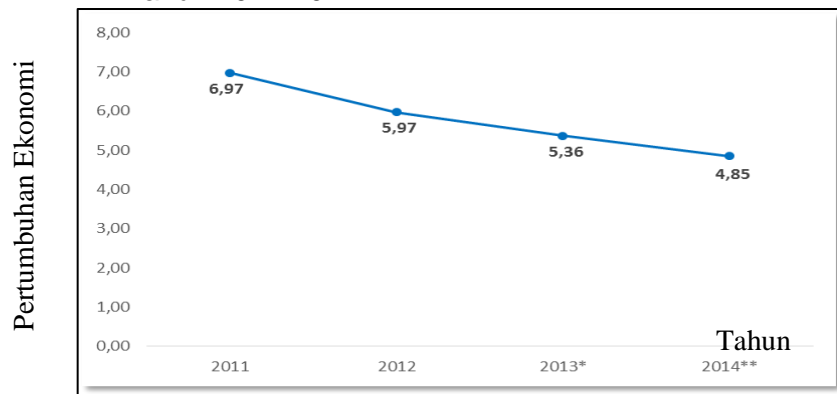
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial.



Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2014 cenderung mengalami perlambatan dimana pada tahun 2011 memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,97% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 hanya mencapai 4,85%. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas pada beberapa kategori lapangan usaha perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2011-2014



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2015

Tabel 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Kategori	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,56	3,11	2,82	3,72	2.38
B	Pertambangan dan Penggalian	13,09	7,04	4,34	2,60	-0.71
C	Industri Pengolahan	2,80	5,08	3,67	3,59	3.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,69	10,29	5,53	15,51	24.44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,66	1,62	2,71	9,11	5.73
F	Konstruksi	5,48	6,26	5,89	6,39	6.26
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	7,74	8,25	8,20	7.91
H	Transportasi dan Pergudangan	5,89	7,13	7,27	6,41	7.21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,55	7,94	7,59	6,55	6.28
J	Informasi dan Komunikasi	6,68	4,93	6,98	9,78	8.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,56	8,84	14,51	6,86	4.77
L	Real Estate	6,19	5,61	7,01	5,74	5.56
M,N	Jasa Perusahaan	7,24	6,55	7,81	7,03	6.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,66	5,92	5,81	5,44	8.76
P	Jasa Pendidikan	3,59	5,18	7,93	8,29	9.44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,45	7,56	9,15	6,37	7.45
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,58	3,21	2,91	8,94	6.15
Total		6,97	5,97	5,36	4,85	3.84

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

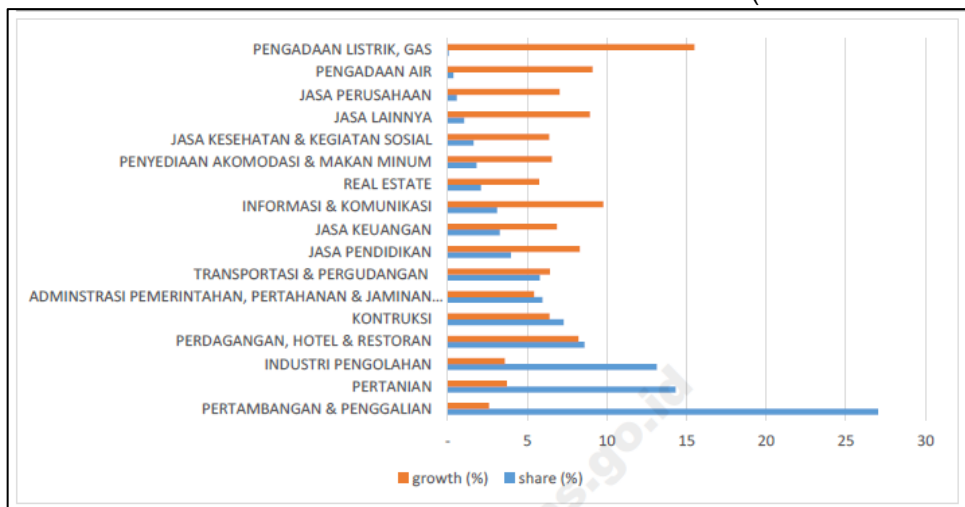
*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Jika dilihat pertumbuhan ekonomi secara sektoral, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor dominan dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan. Pertumbuhan sektoral pertambangan dan penggalian pada tahun 2014 hanya sebesar 2,60%, padahal dua tahun sebelumnya mencapai 7,04%. Selain itu, sektor industri pengolahan juga mengalami perlambatan dalam dua tahun terakhir, begitu juga dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, maupun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Gambar 2. 9 Postur PDRB Kalimantan Selatan Tahun 2014 (Share dan Growth)



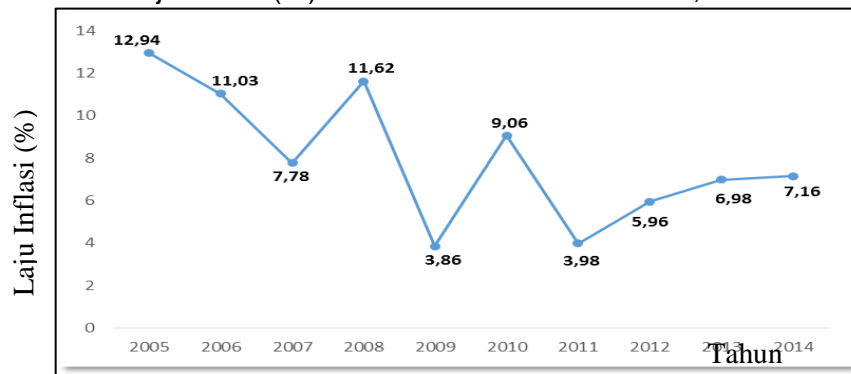
Sumber : Buku Statistik Daerah Kalimantan Selatan 2015

d. Laju Inflasi

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 10 Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2005-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mencapai angka 5,14%. Dalam jangka waktu tersebut, inflasi tertinggi berada pada tahun 2005 (12,94%) dan inflasi terendah berada pada tahun 2009 (3,86%). Tingkat fluktuatif yang tinggi ini harus mendapat perhatian penuh dari pengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pasar agar kebutuhan masyarakat baik secara keberadaan stok barang maupun harganya dapat terpenuhi secara baik.

Kondisi inflasi yang berfluktuasi ini umumnya disebabkan oleh distribusi barang khususnya sayuran dari luar yang terhambat oleh cuaca pada transportasi laut. Sayuran di Kalimantan Selatan banyak diimpor dari Jawa dan Sulawesi, sehingga apabila jalur distribusi terhambat akan menyebabkan permintaan akan barang yang tinggi. Sehingga kedepannya diperlukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus distribusi. Selain itu diperlukan pengembangan dan peningkatan produksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat termasuk sayuran di dalam Kalimantan Selatan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

e. PDRB per Kapita

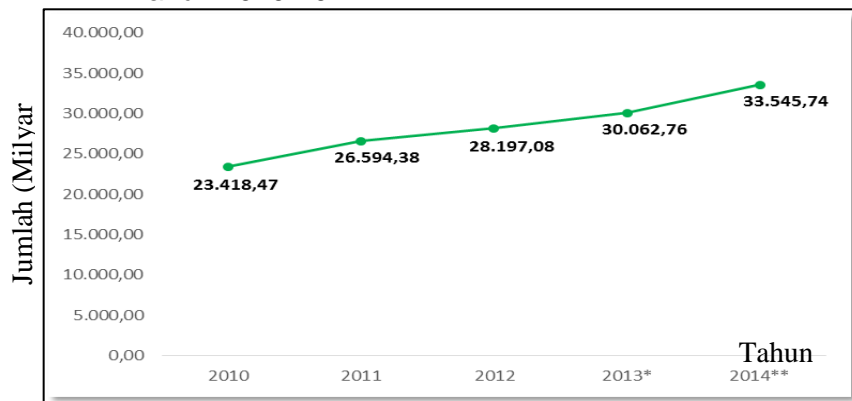
PDRB dan Inflasi di atas dapat menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang



diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Angka PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PDRB per kapita hampir mencapai angka 23,42 juta rupiah per tahun dan empat tahun berselang hampir mencapai 33,55 juta rupiah. PDRB per kapita digunakan untuk menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana kenaikan PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan mengindikasikan terjadinya kenaikan tingkat perekonomian di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

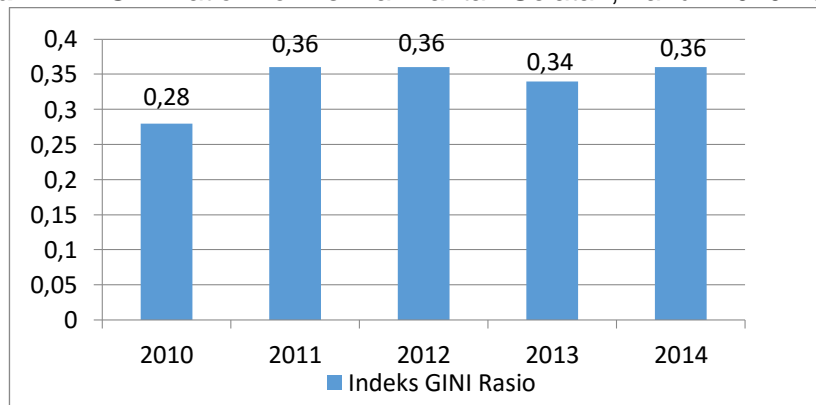
Gambar 2. 11 PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2014



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2015

f. Gini Ratio

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Untuk kondisi Provinsi Kalimantan selatan dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2. 12** Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2014

Sumber: Laporan Evaluasi tahun Keempat RPJMD Kalimantan Selatan 2011-2015 , 2015

Indeks gini dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan, terutama antara 2010 dan 2011. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat secara horisontal di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penambahan ketimpangan dalam artian pemerataan pendapatan antar penduduk mengalami ketimpangan. Akan tetapi pada tahun – tahun berikutnya konsisten diangka 0,36. Para ahli ekonomi masih menganggap “wajar” jika gini ratio berada di kisaran 0,3 sehingga dapat dikatakan pemerataan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan masih dikategorikan wajar.

Berdasarkan distribusi Indeks Gini per kabupaten/kota, diketahui Indeks Gini kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berada pada kisaran antara 0,26 sampai 0,37. Dengan tertinggi di Kota Banjarmasin (0,37) dan terendah di Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan (0,26) . Rincian Indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20 Indeks Gini Rasio Provinsi Kalimantan Selatan, 2009-2013

Kabupaten	Gini Ratio				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kalimantan Selatan	0.28	0.28	0.36	0.36	0.34
Tanah Laut	0.25	0.25	0.33	0.32	0.27
Kota Baru	0.3	0.26	0.33	0.31	0.33
Banjar	0.27	0.27	0.35	0.33	0.33
Barito Kuala	0.29	0.26	0.32	0.32	0.33
Tapin	0.29	0.29	0.26	0.3	0.28
Hulu Sungai Selatan	0.32	0.23	0.35	0.3	0.26
Hulu Sungai Tengah	0.28	0.25	0.29	0.31	0.3
Hulu Sungai Utara	0.28	0.25	0.28	0.29	0.26
Tabalong	0.29	0.27	0.35	0.33	0.33



Kabupaten	Gini Ratio				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tanah Bumbu	0.27	0.26	0.35	0.32	0.33
Balangan	0.22	0.26	0.31	0.33	0.3
Kota Banjarmasin	0.23	0.23	0.38	0.41	0.37
Kota Banjar Baru	0.23	0.22	0.34	0.37	0.36

Sumber: Data BPS, 2014

g. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana dalam dasa warsa tahun 2000-2010 menunjukkan perkembangan yang menurun. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan memberikan gambaran perkembangan penduduk miskin secara makro.

Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya. Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka di tentukan biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan prosentase penduduk miskin. Garis kemiskinan untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan BPS 2010 adalah sebesar Rp. 210.850,00/kapita. Sementara, menurut BKKBN, keluarga miskin dikelompokkan dalam kategori Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I karena alasan ekonomi belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimum.

➤ Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan

Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data dari BPS bulan Maret 2014 sebanyak 182.876 orang (4,68 persen) dari 181,963 orang (5,21 persen) pada tahun 2010 yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Perkembangan penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan tahun 2010 s/d 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 21** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014

TAHUN	PENDUDUK MISKIN	TK KEMISKINAN
2010	181,963	5,21
2011	198,611	5,35
2012	189,214	5,01
2013	184.297	4,76
2014	182.876	4.68

Sumber : BPS Prov Kalsel

Sementara itu sebaran penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada tahun 2013 mencapai 184,297 jiwa, jumlah ini meningkat dari tahun 2009 yang sebanyak 175,977 jiwa. Namun dari sisi prosentasi pada tahun 2013 sebanyak 4,76%, prosentase ini menurun dari tahun 2009 yang sebesar 5,12%. Jika dilihat dari perkembangan menurut kabupaten/kota, maka jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan cukup bervariasi yakni antara 6,045 jiwa yang terdapat di Kabupaten Tapin dan yang terbanyak di Kota Banjarmasin dengan jumlah 27,777 jiwa.

Tabel 2. 22 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Tahun 2009 – 2013 Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kalimantan Selatan	175,977	181,963	98,611	189,214	184,297
Tanah LAut	13,856	15,218	14,698	14,014	13,654
Kotabaru	15,422	15,894	15,374	14,600	14,656
Banjar	18,177	16,983	16,438	15,500	15,287
Batola	15,253	15,819	15,278	14,600	14,909
Tapin	7,489	9,369	9,089	8,700	6,045
HSS	15,153	16,304	15,761	15,100	14,836
HST	13,924	15,385	14,891	14,200	14,181
HSU	15,702	16,241	15,664	15,000	15,228
Tabalong	13,164	14,358	13,924	13,200	14,305
Tanah Bumbu	13,460	17,454	16,921	16,100	16,039
Balangan	7,316	8,722	8,412	8,000	7,383
Banjarmasin	30,301	31,606	30,555	29,100	27,777
Banjarbaru	8,815	12,021	11,603	11,100	9,997

Sumber : BPS Prov Kalsel

➤ Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Dalam hal pengukuran tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan diterapkan area yang menjadi batas kemiskinan atau yang sering disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini berdasarkan perkapita, dimana perhitungannya dilakukan dengan mengkonversi konsumsi masyarakat ke dalam rupiah. Hasil perhitungan pada tahun 2010 sebesar Rp. 210,850,- per orang per bulan hingga



menjadi Rp. 308,512 per orang per bulan pada tahun 2014. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 97.662,- per orang per bulan selama kurun waktu 5 tahun. Secara rinci perkembangan Garis Kemiskinan, Penduduk dan Tingkat Kemiskinan tahun 2010 hingga tahun 2014 sebagai berikut :

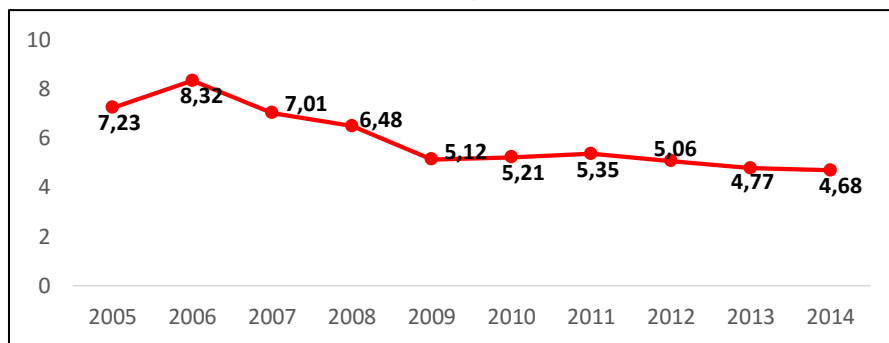
Tabel 2. 23 Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan Tahun 2010 s/d 2014

TAHUN	GARIS KEMISKINAN	PENDUDUK MISKIN	TK.KEMISKINAN
2010	210,850	181,963	5,21
2011	249,487	198,611	5,35
2012	269,714	189,214	5,01
2013	300,329	184.297	4,76
2014	308,512	182.876	4,68

Sumber : BPS Prov Kalsel

Secara grafik di Provinsi Kalimantan Selatan pada rentang 2005 hingga 2014 mengalami tren yang fluktuatif secara absolut maupun persentasenya. Namun secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan meskipun pernah mengalami beberapa kali kenaikan terutama pada tahun 2006 yang mencapai 8,32%. Meskipun begitu, secara normatif tetap terjadi penurunan yang cukup massif dari tahun ke tahun hingga mencapai 4,68% tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 dengan nilai absolut sebesar 182,88 ribu penduduk miskin.

Gambar 2. 13 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2005-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015 (Susenas besar, Maret 2015)

Jika dibandingkan dalam level regional maupun nasional, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong sangat baik mengingat kemiskinan nasional masih mencapai 11,25% pada tahun 2014 dan kemiskinan



Provinsi Kalimantan Selatan paling kecil persentasenya jika dibandingkan dengan provinsi lain di regional Pulau Kalimantan.

➤ **Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan menunjukkan seberapa besar prosentase penduduk miskin pada suatu wilayah, hasil perhitungan ini belum mampu melihat seberapa jauh kemampuan masyarakat miskin tersebut untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan dasarnya dan seberapa mungkin pemerintah dapat mengentaskan masyarakat miskin tersebut dari kemiskinan. Hal ini dicerminkan pada perhitungan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kalimantan Selatan tahun 2008 dan tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 24 Indeks Tk. Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014.

Tahun	Tk.Kemiskinan	Kedalaman Kemiskinan	Keparahan Kemiskinan
2010	5,21	0,69	0,18
2011	5,35	0,81	0,20
2012	5,01	0,76	0,17
2013	4,76	0,61	0,11
2014	4,68	0,63	0,14

Sumber : Publikasi BPS Prov Kalsel

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial menguraikan tentang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu analisa data rasio penduduk yang bekerja

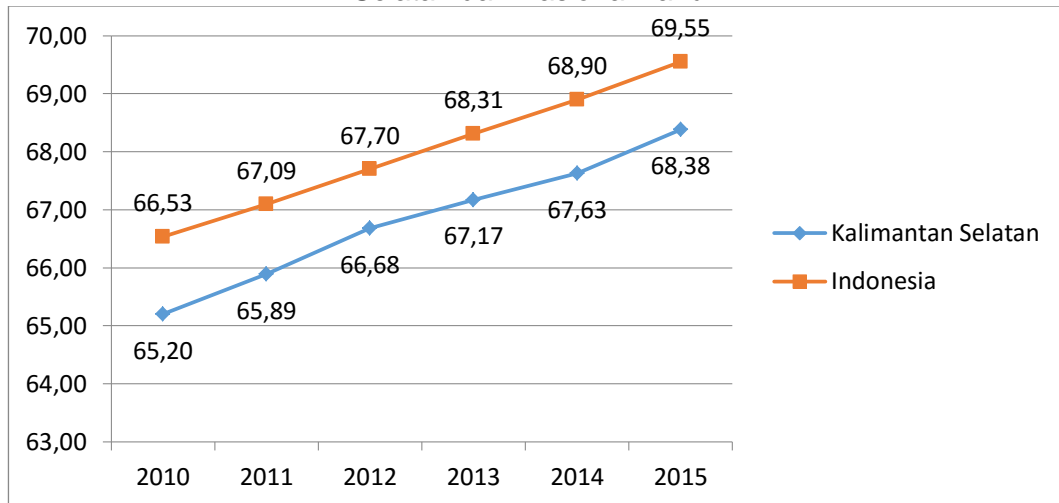
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan



manusia. Pada periode ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). IPM Kalimantan Selatan secara umum mengalami perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM Nasional sesuai dengan grafik berikut:

Gambar 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Usia Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
1	Tanah Laut	68,22	11,09	7,27	10.632	66,50
2	Kotabaru	68,14	11,11	6,80	10.536	65,76
3	Banjar	65,32	10,99	6,96	12.004	65,71
4	Barito Kuala	64,49	11,54	6,47	8.936	62,56
5	Tapin	69,02	11,17	7,17	10.839	66,99
6	Hulu Sungai Selatan	63,64	11,68	7,21	11.077	65,25
7	Hulu Sungai Tengah	64,33	11,42	7,27	11.040	65,37
8	Hulu Sungai Utara	62,09	12,10	6,63	8.164	61,32
9	Tabalong	69,39	11,96	7,95	10.088	68,36
10	Tanah Bumbu	68,84	11,20	7,26	10.697	66,94
11	Balangan	66,65	11,03	6,36	10.617	64,44
12	Banjarmasin	70,02	13,73	9,88	12.501	74,94
13	Banjarbaru	71,06	14,73	10,74	12.376	77,30
Kalimantan Selatan		67,35	11,96	7,60	10.748	67,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015



Berdasarkan Angka IPM Tingkat Kabupaten Kota, maka dapat dilihat capaian kabupaten/kota, IPM tertinggi berada pada Kota Banjarbaru yang mencapai 77,30 dan Kota Banjarmasin sebesar 74,94. Sedangkan IPM terendah berada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sebesar 61,32. Rendahnya IPM di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan setelah dilakukan kajian secara lebih mendalam adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang rendah yang disebabkan oleh AKI AKB tinggi dan tingginya angka pernikahan dini. Dengan melakukan peningkatan berbagai potensi sumber daya manusia di Kalimantan Selatan diharapkan akan memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang.

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kalimantan Selatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Sebagai wujud dukungan terhadap komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (compulsory basic education) untuk menjamin bahwa semua anak-anak usia 7-15 tahun mendapatkan pendidikan dasar hingga jenjang SMP/MTs. Setelah lebih dari 2 dasarwasa pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan di Kalimantan Selatan 9 tahun, maka sejak tahun 2011 Kalimantan Selatan sudah melakukan rintisan terhadap Wajib Belajar 12 tahun yang menjamin semua anak usia SLTA mendapatkan pendidikan hingga menamatkan jenjang SMU sederajat.

Peningkatan pelayanan pendidikan di setiap wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, dan secara otomatis akan memberikan dampak positif pada pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan usia sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan jika dilihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sudah lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun



sebelumnya. Tren yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan itu sendiri bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran kepada kita kondisi Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2010-2014.

Tabel 2. 26 Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2010-2014

No	Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Tanah Laut	7,16	7,26	7,27	7,65	7,82
2	Kotabaru	6,76	7,07	7,09	7,10	7,12
3	Banjar	6,96	7,26	7,52	7,33	7,36
4	Barito Kuala	6,42	7,15	7,25	7,27	7,36
5	Tapin	6,99	7,15	7,20	7,36	7,43
6	Hulu Sungai Selatan	7,05	7,36	7,37	7,40	7,49
7	Hulu Sungai Tengah	6,94	7,47	7,50	7,61	7,64
8	Hulu Sungai Utara	6,61	7,48	7,49	7,57	7,70
9	Tabalong	7,92	8,15	8,16	8,25	8,34
10	Tanah Bumbu	7,21	7,33	7,56	7,73	7,84
11	Balangan	6,23	7,00	7,01	7,05	7,15
12	Banjarmasin	9,79	9,57	9,88	10,06	10,19
13	Banjarbaru	10,69	10,06	10,66	10,68	10,82
Kalimantan Selatan		7,61	7,68	7,89	8,01	8,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

➤ **Angka Partisipasi Sekolah.**

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan angka yang semakin membaik selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014. Perkembangan ini mengingat dari rata-rata 55,65% menjadi 73,16% pada tahun 2014. Angka ini meningkat sebesar 17,5% selama kurun waktu 6 tahun atau rata-rata setiap jenjangnya sebesar 5,83%. Namun demikian jika dilihat dari keberhasilan peningkatan masing-masing jenjang, maka tingkat partisipasi pada jenjang SMU sederajat yang tertinggi yang mencapai 15,66% kemudian SLTP sederajat dan SD sederajat. Lebih lanjut perkembangan APS di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 27** Pencapaian APS pada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2009-2014

INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)
SD/MI/Paket A	94.49	95	92.24	93.16	96.74	97.00
SMP/MTs/Paket B	60.56	60.9	66.35	66.94	69.57	71.10
SMU/SMK/MA/Paket C	35.71	36.24	43.36	49.39	50.05	51.37

Sumber : BPS

➤ Angka Partisipasi Kasar

Salah satu indikator dari keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kecenderungan meningkat, meskipun lambat, namun demikian APK pada jenjang Sekolah Dasar sederajat sudah mengalami kecenderungan menurun, kondisi ini dapat dikatakan keberhasilan Kalimantan Selatan menjaring peserta didik yang dalam usia Sekolah Dasar dengan baik. APS tertinggi dicapai pada jenjang SMU sederajat yakni dari 54,42% menjadi 62,76%, meningkat sebanyak 8,34% selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014. Tabel berikut ini memperlihatkan perkembangan capaian APK Provinsi Kalimantan Selatan menurut jenjang pendidikan tahun 2009-2014 sebagai berikut :

Tabel 2. 28 Pencapaian APK ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2009-2014

INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)
SD/MI/Paket A	112.53	112.77	103.22	104.47	108.81	108.50
SMP/MTs/Paket B	76.7	75.59	83.21	84.55	79.52	79.52
SMU/SMK/MA/Paket C	54.42	55.75	56.04	66.75	62.14	62.76

Sumber : BPS *) Data Sementara

➤ Angka Partisipasi Murni

Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan dari tahun ketahun selama kurun waktu tahun 2009-2014. Peningkatan tertinggi ada pada jenjang SMU sederajat dari 35,71% pada tahun 2009 menjadi 52,50 pada tahun 2014. Baru pada tingkat SLTP sederajat dan SD sederajat. Lebih lanjut perkembangan APM di Kalimantan Selatan sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 29 Pencapaian APM Pada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2009-2014

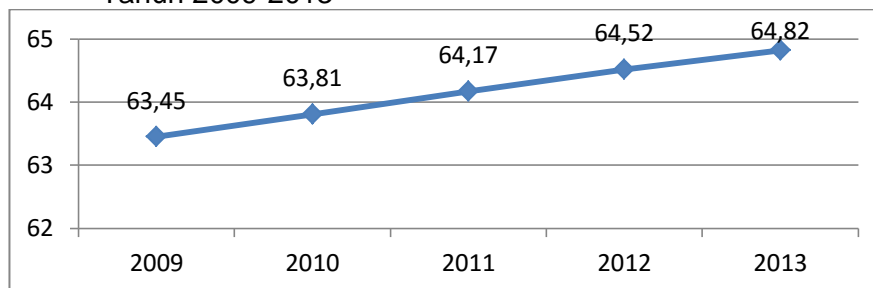
INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *)
SD/MI/Paket A	94.49	95	92.24	93.16	96.74	96.92
SMP/MTs/Paket B	60.56	60.9	66.35	66.94	69.57	71.10
SMU/SMK/MA/Paket C	35.71	36.24	43.36	49.39	50.05	52.50

Sumber : BPS

2) Kesehatan

Angka Harapan Hidup merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup. Angka Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun semakin meningkat yang artinya pembangunan di bidang kesehatan mengalami progress yang positif. Akan tetapi peningkatan tersebut belum sesuai yang diharapkan meskipun telah diupayakan dengan maksimal. Kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2. 15 Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Pada tahun 2013, angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar usia 64,82 tahun dan pada tahun 2009 meningkat menjadi usia 63,45 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2013 akan memiliki peluang hidup hingga usia 64-65 tahun. Sedangkan jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, angka harapan hidup tertinggi berada pada Kabupaten Tanah Laut dengan angka 69,29 tahun, kemudian Kota Banjarbaru yang memiliki angka harapan hidup sebesar 68,32 tahun dan Kabupaten Tapin dengan angka harapan hidup 68,03 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit belum memberikan



kontribusi yang nyata dalam mendorong derajat kesehatan masyarakat, dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang mendorong derajat kesehatan masyarakat adalah semakin intensnya upaya pelayanan kesehatan dasar yang dalam hal ini mengutamakan preventif promotif, bukan kuratif.

Untuk mendorong derajat kesehatan yang lebih baik maka kabupaten/kota perlu didorong untuk memaksimalkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang perkembangan Angka Harapan Hidup yang dicapai oleh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013.

Tabel 2. 30 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan, 2009-2013

NO.	KABUPATEN	ANGKA HARAPAN HIDUP				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Tanah Laut	68.14	68.39	68.75	69.11	69.29
2	Kota Baru	65.22	65.46	65.81	66.15	66.45
3	Banjar	64.93	65.25	65.68	66.12	66.18
4	Barito Kuala	61.52	61.86	62.31	62.76	63.04
5	Tapin	67.07	67.22	67.48	67.73	68.03
6	Hulu Sungai Selatan	63.68	63.95	64.32	64.69	64.87
7	Hulu Sungai Tengah	64.91	65.28	65.65	66.03	66.43
8	Hulu Sungai Utara	62.68	63.07	63.47	63.87	64.17
9	Tabalong	62.91	63.08	63.36	63.64	63.72
10	Tanah Bumbu	64.63	64.94	65.36	65.68	65.86
11	Balangan	61.55	61.73	62.02	62.32	62.50
12	Kota Banjarmasin	66.03	66.14	66.36	66.58	66.66
13	Kota Banjar Baru	67.31	67.48	67.76	68.04	68.32
14	Kalimantan Selatan	63.45	63.81	64.17	64.52	64.82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

➤ **Angka Kematian Ibu**

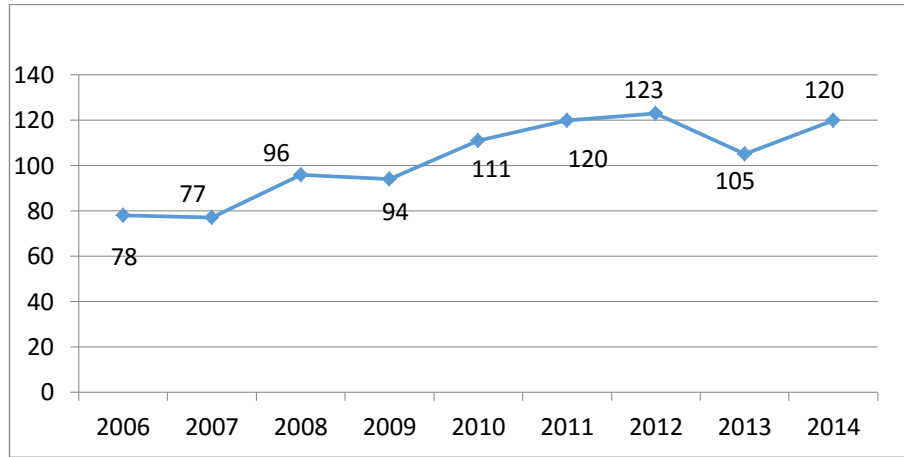
Meningkatkan Kesehatan Ibu merupakan upaya yang tidak bisa dipisahkan dari upaya memperbaiki kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Selatan. Keberhasilan pencapaiannya menunjukkan kecenderungan yang signifikan yang dicerminkan oleh berbagai indikator pembentuknya seperti Cakupan Pemeriksaan Kehamilan. Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 254 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Kondisi ini diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Kasus kematian ibu di Kalimantan Selatan telah diupayakan dengan melaksanakan berbagai program yang memberi pertolongan persalinan secara tepat, cepat dan menghindari resiko bagi kehamilan normal dan mengurangi



resiko bagi kehamilan dengan resiko tinggi. Perkembangan kasus kematian ibu di Kalimantan Selatan selama tahun 2006-2014 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 16 Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2006-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Gambar diatas merupakan peristiwa kematian yang terjadi pada tahun 2014, dimana perkiraan kejadian kelahiran mencapai 76.968 kasus dari perkiraan kejadian kehamilan sebanyak 235.642. dilihat dari penyebab terjadinya kematian, maka kasus terbesar adalah karena tidak diketahui sebelumnya yang mencapai 49 kasus. Tabel berikut ini akan menyajikan penyebab kematian ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang dirinci menurut kabupaten/kota.

Tabel 2. 31 Penyebab Kematian Ibu Menurut Kab/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2014

Kab/Kota	Aborsi	Pendarahan	Hipertensi	Infeksi	Lain2
Tanah Laut	0	0	1	1	4
Kota Baru	0	0	1	0	1
Banjar	0	11	7	1	6
Barito Kuala	0	2	4	0	4
Tapin	0	1	3	0	1
HSS	0	1	2	0	5
HST	0	0	1	0	11
HSU	0	0	1	0	3
Tabalong	0	2	2	0	3
Tanah Bumbu	0	6	0	0	1
Balangan	0	2	2	0	3
Banjarmasin	1	4	8	1	0
Banjar Baru	0	4	2	0	7
Kalsel	1	33	34	3	49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

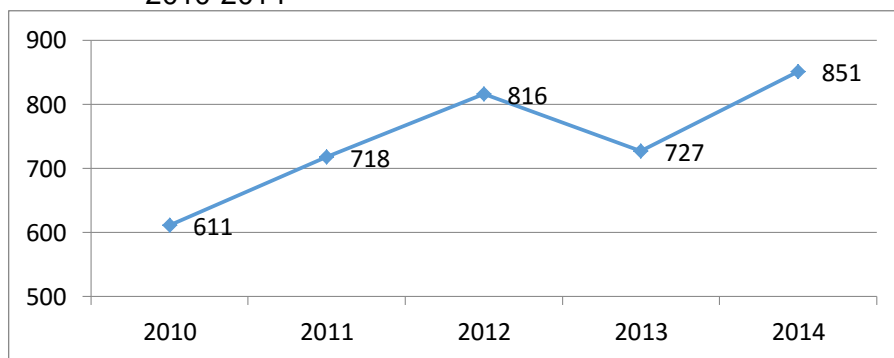


Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

➤ **Angka Kematian Bayi dan Balita**

Angka kematian bayi di Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 57,20 pada tahun 2002 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012, dan diperkirakan sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Angka kematian anak pada tahun 2012 pada posisi 57/1000 KH, diperkirakan pada tahun 2015 akan mencapai sebesar 23/1000 KH. Berbagai upaya untuk menstandarisasi pelayanan dalam rangka mempersempit disparitas antarkabupaten dalam pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah-daerah miskin. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Gambar 2. 17 Perkembangan kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Sebagian besar penyebab kematian bayi adalah upaya pencegahan yang belum efektif mulai dari pemberian imunisasi kepada ibu hamil, kecukupan gizi, hamil terlalu muda atau terlalu tua serta keterlambatan dalam hal pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan program imunisasi lengkap terus meningkat. Berdasarkan hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa, cakupan pelayanan kesehatan bayi mencapai 54,29% dan cakupan pelayanan Balita mencapai 57,39%. Dilihat dari capaian pada tahun 2012 maka



pada tahun 2015 akan dicapai sebesar 32/1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 23/1000 kelahiran hidup untuk Angka Kematian Balita.

Kesehatan anak di Kalimantan Selatan terus membaik yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian Balita, bayi maupun neonatal. Angka kematian bayi menurun dari 57,20/1.000 pada tahun 2002 menjadi 44/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Angka kematian Balita juga menurun dari 75/1.000 kelahiran hidup menjadi 57/1000 kelahiran hidup pada tahun 2012, demikian juga angka kematian neonatal yang sebesar 3,07 pada tahun 2004 menjadi 1,10 pada tahun 2012 dan cakupan imunisasi lengkap mencapai 72%, imunisasi campak mencapai 74,95% pada tahun 2007 menjadi 90,03 pada tahun 2012. Diperkirakan pada tahun 2015 akan terus menurun dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam bentuk memperluas akses pelayanan kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan diperdesaan seperti bidan, perawat dan tenaga kesehatan lingkungan.

➤ **Status Gizi Masyarakat**

Keadaan gizi masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin memburuk, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau balita dengan berat badan rendah. Sampai saat ini Kalimantan Selatan telah berupaya keras dalam memperbaiki gizi masyarakat, hasilnya belum menunjukkan penurunan perbaikan gizi. Selama ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya prevalensi Balita dengan Berat Badan Rendah yakni dari 16,45% pada tahun 2007 menjadi 21% pada tahun 2010, dan 27,4 pada tahun 2013. Berikut ini perkembangan status Gizi masyarakat di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 2. 32 Tabel Kondisi Statis Gizi Masyarakat menurut Kabupaten /Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2013.

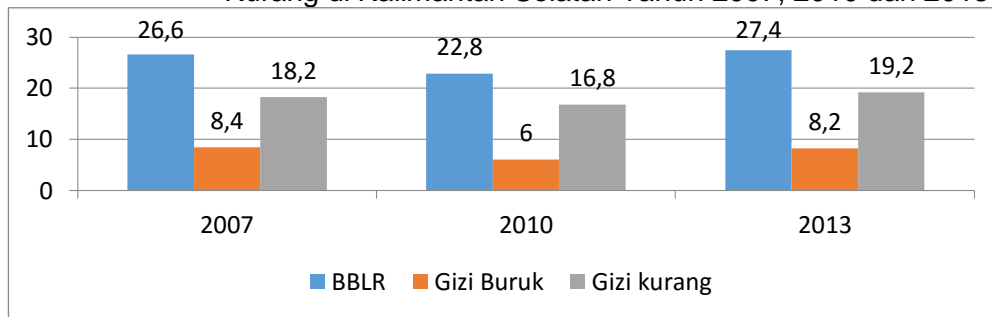
Kab/ kota	Prevalensi gizi balita dgn bb rendah (kekurangan gizi)	Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi kurang
Tanah Laut	17	6.9	10.1
Kotabaru	22.9	9.9	13
Banjar	35.6	11.9	23.7
Batola	25.1	7.9	17.2
Tapin	28.2	8.8	19.4
HSS	24.8	9.1	15.7
HST	31	6.4	24.6
HSU	34.2	9.4	24.8
Tabalong	25.1	5.4	19.7
Tanbu	20.4	6	14.4



Kab/ kota	Prevalensi gizi balita dgn bb rendah (kekurangan gizi)	Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi balita gizi kurang
Balangan	34.4	13.1	21.3
Banjarmasin	26.6	8	18.6
Banjarbaru	18.1	4.8	13.3
KALSEL 2007	26.6	8.4	18.2
KALSEL 2010	22.8	6	16.8
KALSEL 2013	27.4	8.2	19.2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Gambar 2. 18 Perkembangan Perkembangan BBLR, Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kalimantan Selatan Tahun 2007, 2010 dan 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Status gizi masyarakat sangat berpengaruh pada status gizi Balita, selanjutnya kondisi status Gizi Balita di Kalimantan Selatan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 33 Status gizi Balita Kalsel Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Gizi Kurang	Kurus	Pendek
Tanah Laut	26.1%	10.9%	39.9%
Kota Baru	29.1%	18.9%	47.9%
Banjar	35.0%	16.1%	48.2%
Barito Kuala	28.3%	10.1%	47.6%
Tapin	27.8%	13.7%	45.3%
HSS	30.2%	15.9%	49.8%
HST	29.9%	13.2%	51.7%
HSU	34.9%	13.1%	56.0%
Tabalong	27.4%	10.9%	44.6%
Tanah Bumbu	24.2%	6.4%	44.9%
Balangan	29.5%	13.0%	42.7%
Banjarmasin	24.3%	12.7%	35.8%
Banjar Baru	9.8%	9.5%	34.0%
Kalsel	27.4%	12.8%	44.2%

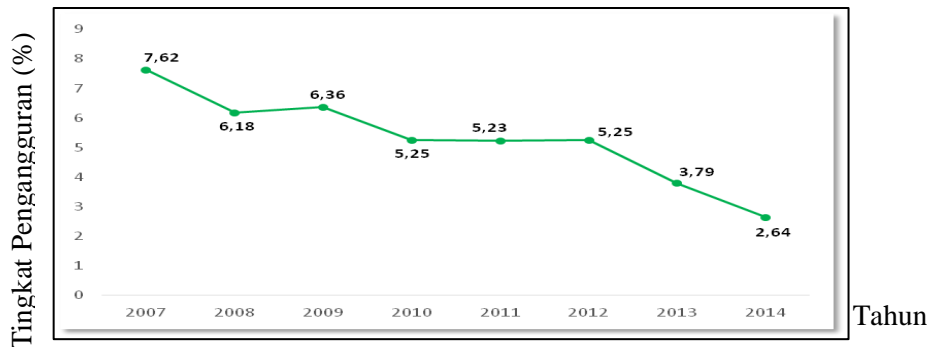
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan



3) Ketenagakerjaan

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014, pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 2,64% dimana angka ini jauh mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Tabel 2. 34 Persentase Penduduk Bekerja, Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	
1	Tanah Laut	70,30	2,12	27,58
2	Kotabaru	63,19	2,59	34,21
3	Banjar	75,16	2,56	22,29
4	Barito Kuala	72,66	1,64	25,71
5	Tapin	70,01	1,28	28,71
6	Hulu Sungai Selatan	63,54	1,73	34,73
7	Hulu Sungai Tengah	66,69	2,82	30,49
8	Hulu Sungai Utara	72,52	2,53	24,95
9	Tabalong	69,92	3,01	27,07
10	Tanah Bumbu	58,24	2,91	38,85
11	Balangan	77,22	1,05	21,74
12	Banjarmasin	60,41	3,87	35,72
13	Banjarbaru	56,97	3,22	39,82
Kalimantan Selatan		66,82	2,64	30,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015



Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kotanya, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Banjarmasin yang mencapai angka 3,87% dan Kota Banjarbaru yang mencapai 3,22%. Tingginya pengangguran di wilayah perkotaan memang menjadi permasalahan tersendiri pada wilayah tersebut karena sebagian besar penduduk tinggal di perkotaan sehingga notabene pencari kerja juga tinggi. Sedangkan wilayah administrasi yang memiliki tingkat pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Balangan (1,05%) dan Kabupaten Tapin (1,28%).

➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Selatan mengalami kecenderungan menurun dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,31%, angka ini menurun dari tahun 2009 yang sebesar 71,61%, atau rata-rata turun sebanyak 2,30% selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013. Jika dilihat dari kondisi kabupaten/kota, maka tingkat partisipasi angkatan kerja terbesar adalah Kabupaten Balangan dengan angka 77,24% pada tahun 2013, kemudian Kabupaten Banjar dengan 76,45%. Lebih lanjut perkembangan tingkat partisipasi angkatan di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota selama tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 35 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjadi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota selama Tahun 2009-2013.

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kalsel	71.61	71.26	72.07	72.01	69.31
Tanah Laut	73.85	73.87	75.66	74.04	69.41
Kota Baru	69.09	66.37	68.2	67.72	63.18
Banjar	78.00	76.01	75.1	76.57	76.45
Barito Kuala	76.59	72.69	79.62	80.68	75.36
Tapin	70.54	71.11	70.66	67.52	69.89
HSS	75.39	73.17	69.5	68.4	68.82
HST	72.1	74.35	77.48	75.23	71.12
HSU	75.18	73.59	78.4	78.32	73.29
Tabalong	74.5	75.52	76	73.2	74.99
Tanah Bumbu	66.15	68.24	67.48	68.82	65.42
Balangan	75.25	76.97	79.1	83.94	77.24
Banjarmasin	66.56	66	65.22	66.96	62.77
Banjar Baru	62.07	65.19	65.09	61.85	61.27

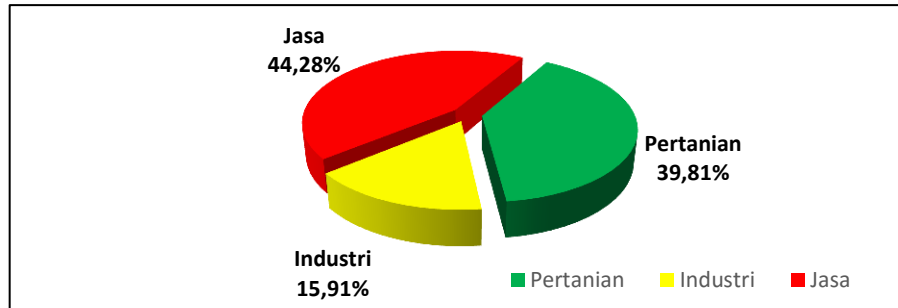
Sumber: BPS



➤ **Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha Utama**

Jika dilihat dari sektor lapangan usahanya, sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan bekerja pada sektor jasa sebesar 44,28% dan diikuti sektor pertanian yang mencapai 39,81%.

Gambar 2. 20 Persentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (%) Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung terbuka dalam konstelasi arus global memerlukan daya tahan dan daya tangkal yang lebih kuat. Agar tidak mudah tergerus budaya lain dari luar Provinsi Kalimantan Selatan bahkan dari internasional. Berbagai unsur budaya yang berkembang di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup religi, pengetahuan, sistem nilai, teknologi, mata pencaharian, bahasa dan seni. Perkembangan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok budaya atau kelembagaan yang menghimpun masyarakat dalam suatu wadah olah, gali dan aktualisasi budaya. Perkembangan kelompok/kelembagaan budaya di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Perkembangan Kelembagaan Budaya Menurut Unsur Budaya di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

No.	Unsur Budaya	2010	2011	2012	2013	2014
1	Religi	13	13	13	13	13
2	Pengetahuan	1	1	1	1	1
3	Sistem Nilai	1	1	1	1	1
4	Teknologi	1	1	1	1	1
5	Mata Pencaharian	2	2	2	2	2
6	Bahasa	1	1	1	1	1
7	Seni	5	5	5	5	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015



Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Jenis kelembagaan yang sudah ada ini secara umum dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun jenis seni budaya secara yang ada di Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut

Tabel 2. 37 Jenis Seni Budaya Provinsi Kalimantan Selatan

NO	JENIS SENI BUDAYA	SENI BUDAYA DI KALIMANTAN SELATAN
1	Teater Tradisi / Teater Rakyat	Mamanda, Madihin, Wayang Gung, Abdul Mulk Loba, Kuda Gepang, Cerita Damarwulan, Tantayungan, Wayang Kulit, Teater Tutur.
2	Seni Musik	Kuriding, Karung-karung Panting, Kintunglit, Bumbung, Suling Bambu, Musik Tiup, Salung Ulin, Kateng Kupak
3	Sinoman Hadrah dan Rudat	Sinoman Hadrah dan Rudat bersumber daripada budaya yang dibawa oleh pedagang dan penda'wah Islam dari Arab dan Parsi dan berkembang campur menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga Timur
4	Seni Tari	a. Tari Tradisi : Balian, Gantar, Bakanjar, Babangai b. Tari Klasik : Baksa Kambang, Topeng, Radap Rahayu c. Tari Rakyat : Japin Sisit, Tirik Lalan, Gambut, Kuda Gepang, Rudat dll
5	Seni Sastra	Kuriding, Karung-karung Panting, Kintunglit, Bumbung, Suling Bambu, Musik Tiup, Salung Ulin, Kateng Kupak. a.Syair :Hikayat, Sejarah, Keagamaan b. Pantun : Biasa, Kilat, Bakait
6	Seni Rupa	Ornamen, Topeng dan Patung
7	Keterampilan	Maayam dinding palupuh, maulah atap, wantilan, maulah gula habang, maulah dodol kandungan, maulah apam barabai, maulah sasapu ijuk, manggangan, maulah wadai, maulah urung katupat, maaym janur banjar, dll

Sumber: Dari Berbagai Sumber

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai sesuai dengan klasifikasi urusan yang tertera dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan. Sementara pelayanan non dasar sebagian besar belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dalam beberapa urusan wajib non dasar ini belum memiliki NSPK.

a. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Fasilitas dasar pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 38 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan, 2010-2014

Taman Kanak Kanak

Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2010	1.922	85.021	7.962	10,68	44,24
2011	2.137	96.328	7.437	12,95	45,08
2012	2.138	84.496	7.901	10,69	39,52
2013	2.637	96.104	9.819	9,79	36,44
2014	2.124	84.517	8.809	9,59	39,79

Sekolah Dasar

Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2010	2.889	395.674	30.466	12,99	136,96
2011	3.035	400.441	33.309	12,02	131,94
2012	2.891	380.380	28.900	13,16	131,57
2013	3.220	456.268	32.720	13,94	141,70
2014	3.385	426.090	37.097	11,748	125,87

Sekolah Menengah Pertama

Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2010	582	99.572	9.347	10,65	171,09
2011	601	103.959	9.886	10,52	172,98
2012	565	103.732	9.510	10,91	183,60
2013	884	166.240	16.343	10,17	188,05
2014	925	174.060	15.975	10,89	188,17

**Sekolah Menengah Atas**

Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2010	164	49.989	4.082	12,25	304,81
2011	292	89.707	7.113	12,61	307,22
2012	174	50.251	4.561	11,02	288,80
2013	318	76.052	10.157	7,49	239,16
2014	322	74.965	7.135	10,50	232,81

Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)	Rasio Murid terhadap Guru	Rasio Murid terhadap sekolah
2010	73	28.653	2.353	12,18	392,51
2011	95	35.748	2.775	12,88	376,29
2012	100	39.440	3.308	11,92	394,40
2013	105	41.188	3.271	12,59	392,27
2014	105	41.081	2.971	13,82	391,24

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Pada jenjang yang lebih tinggi, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat perguruan tinggi negeri yakni UNLAM, IAIN, dan Poltekkes Banjarmasin. Selain itu, terdapat juga perguruan tinggi swasta sebanyak 23 dan akademi swasta sebanyak 22 dengan total mahasiswa sebanyak 43.651 orang.

Jika melihat analisis berikutnya berupa rasio guru terhadap murid, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio guru terhadap murid maka beban mengajar guru semakin berat, sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio guru terhadap murid secara umum, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup seperti yang terlihat pada tabel di atas. Namun dalam persebarannya perlu diperhatikan sekaligus kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2014 telah berdiri 32 unit rumah sakit yang menjadi rujukan pengobatan seluruh puskesmas di Provinsi Kalimantan Selatan (228 Puskesmas dan 582 Puskesmas Pembantu). Meskipun begitu,



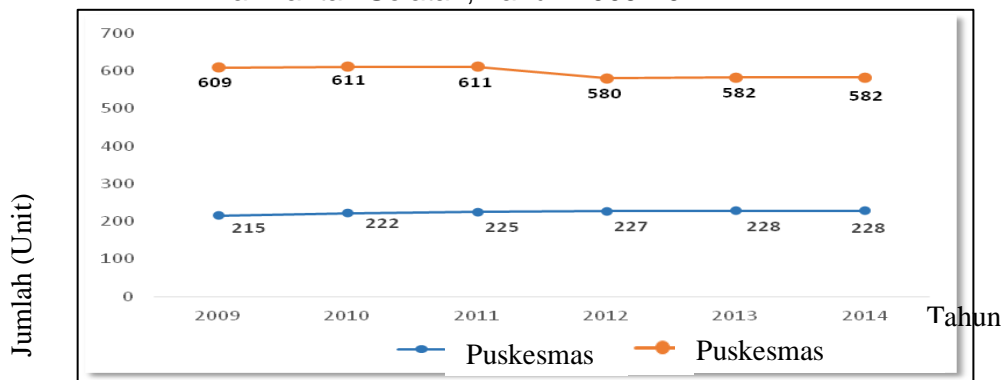
kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal, sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2. 39 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Tempat Tidur di RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanah Laut	1	140	18	59
2	Kotabaru	1	108	27	68
3	Banjar	4	935	23	70
4	Barito Kuala	1	76	19	65
5	Tapin	1	115	13	37
6	Hulu Sungai Selatan	3	198	21	69
7	Hulu Sungai Tengah	1	221	19	44
8	Hulu Sungai Utara	1	192	13	30
9	Tabalong	2	169	16	48
10	Tanah Bumbu	1	119	11	20
11	Balangan	1	116	11	23
12	Banjarmasin	12	1.742	26	35
13	Banjarbaru	3	412	8	14
Kalimantan Selatan		32	4.543	228	582

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Gambar 2. 21 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2009-2014

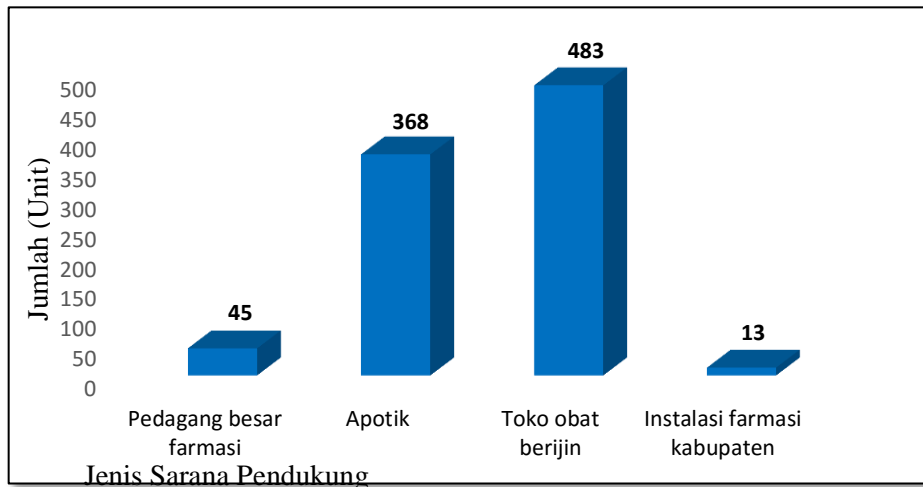


Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya sarana pendukung kesehatan sebagai bagian dari fasilitas penunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 45 pedagang besar farmasi, 368 apotik, 483 toko obat berijin, dan 13 instalasi farmasi kabupaten.



Gambar 2. 22 Jumlah Sarana Pendukung Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014



Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum yang harus ditangani sesuai kewenangan Provinsi meliputi jalan, jembatan, sumberdaya air, air bersih, sanitasi, persampahan, dan jasa konstruksi.

➤ Jalan dan Jembatan

Salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait proporsi kualitas jalan baik berdasarkan kondisi jalan.

Tabel 2. 40 Panjang Jalan Menurut Kondisinya (Km) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

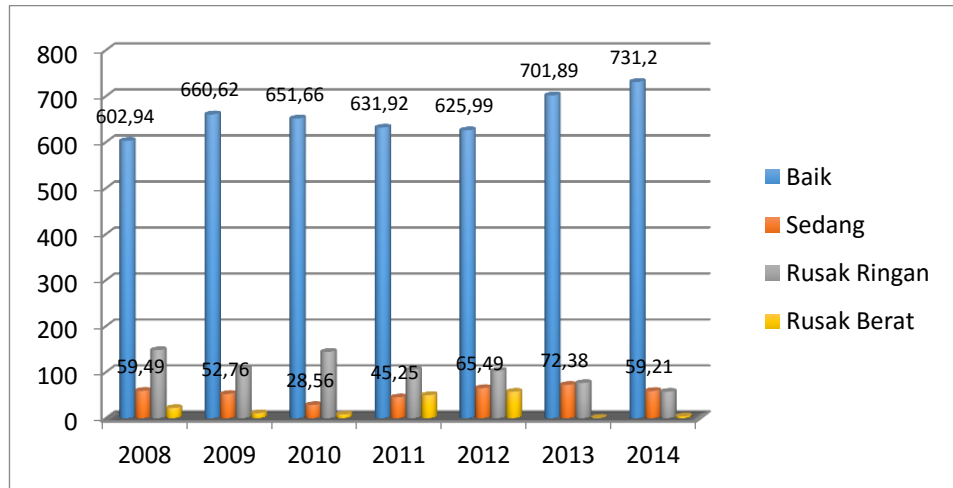
Uraian	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jalan Negara	794,64	66,84	4,00	0,60	866,09
Jalan Provinsi	731,20	59,21	57,50	4,00	851,91
Total	1.499,65	130,87	86,86	0,60	1.718,00

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, dan Renstra Dinas PU 2015

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, terdapat sepanjang 1.718,00 km total panjang jalan di Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus jalan Nasional (866,09 km) dan jalan provinsi (851,91 km). Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 87,29% jalan di Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi baik dan 7,62 persen dalam kondisi sedang. Sisanya sebesar 5,06% jalan mengalami kerusakan, bahkan 0,03% kondisinya rusak parah.



Gambar 2. 23 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2008-2014



Sumber: Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Akan tetapi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas jalan dalam jaringan Primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri (JAP) dan jalan Kolektor-1 (JKP-1) jalan nasional yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi 1.204,30 km atau mengalami penambahan sepanjang 275,97 km. Berdasarkan hal tersebut maka jalan Provinsi akan di proses perubahan SK jalan baru untuk menggantikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2012.

Sedangkan kondisi jembatan hingga tahun 2014, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 900 buah jembatan Provinsi. Jembatan tersebut dapat terpelihara dengan baik dan masih dimanfaatkan, dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 41 Presentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

JEMBATAN	Jumlah	KONDISI JEMBATAN		
		BAIK	SEDANG	RUSAK
Provinsi	900 buah	742 buah	68 buah	90 buah
	%	82.44%	7.56%	10%

Sumber: Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

➤ Sumber Daya Air

Area layanan irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 359.595 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Khusus jaringan irigasi kewenangan provinsi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang



Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi menangani 57.003 Ha atau 15,85 % dari total luas area pertanian. Dari total luas area daerah irigasi sampai dengan tahun 2015 jumlah Luas daerah Irigasi dan Rawa Dalam Kondisi Baik (ha) sebanyak 12.700 Ha atau 22,28 %. Pembagian kewenangan pengelolaan DI dan kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 42 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan

No	Kewenangan	Luas Area (Ha)	Porsentase	Jumlah DI/DR
1	Pusat	102.598	28.53%	23
2	Provinsi	57.003	15.85%	40
3	Kabupaten/Kota	199.994	55.62%	932
		359.595	100%	

Sumber: KepMen PUPR, 2015

Kondisi penanganan banjir di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 khususnya pada DAS Cengal – Batulicin yang merupakan kewenangan Provinsi mengalami banjir/genangan bervariasi. Kondisi yang paling parah terjadi di daerah Kecamatan Kusan Hulu yang mengalami genangan seluas 10.097 Ha.

Tabel 2. 43 Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2015

No	Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Genangan	
			Luas (Ha)	Kecamatan
1	DAS Swarangan	30,600	1,470	Jorong
2	DAS Asam-asam	38,500	2,662	Jorong
3	DAS Kintap	72,100	677	Kintap
4	DAS Cuka	72,400	1,599	Satui
5	DAS Sebamban	32,400	715	Kusan hilir
6	DAS Kusan	206,700	10,097	Kusan hulu
7	DAS Batulicin	130,700	2,343	Batulicin
9	DAS Cantung	108,000	1,066	Kelumpang Hulu
10	DAS Sampanahan	172,200	768	Sungai Durian
11	DAS Cengal	146,400	2,589	Pamukan Utara
	TOTAL	1,010,000	23,986	

Sumber: KepMen PUPR, 2015

➤ Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

Cakupan pelayanan air minum sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar 66,11%, dengan cakupan terbesar berada di Kota Banjarmasin mencapai 91,69%. Hal tersebut dikarenakan Kota Banjarmasin memiliki perusahaan daerah air minum, PDAM Bandarmasih yang sudah dikelola dengan baik. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala memiliki cakupan pelayanan sektor Air Minum terendah dengan besaran 41,91%.

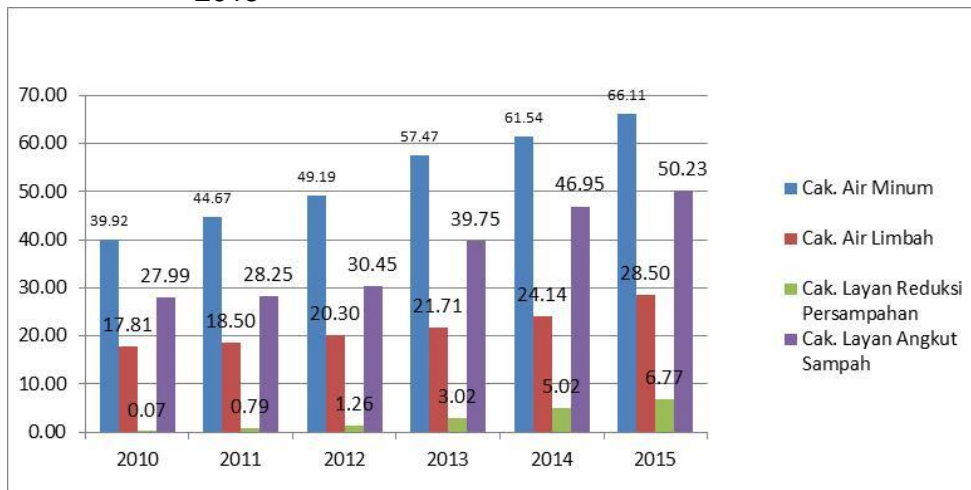
Untuk Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah) sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar 28,50 %. Rendahnya tingkat cakupan air limbah dikarenakan belum adanya masyarakat yang memiliki akses ke sistem jaringan



dan pengolahan air limbah skala kawasan/kota, serta sedikitnya jumlah penduduk yang terlayani MCK Komunal. Terdapat 5 Kabupaten yang masih dibawah 5 % yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten HSS, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan.

Pelayanan sistem persampahan sampai dengan Tahun 2015 adalah sebesar 6,70 %. Upaya kegiatan pengurangan volume sampah dengan menerapkan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dan fasilitas 3R perlu ditindak lanjuti mengingat masih sangat rendahnya cakupan pelayanan persampahan. Untuk cakupan pelayanan angkut sampah sebesar 50,23%.

Gambar 2. 24 Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi (Air Limbah), Layanan reduksi persampahan dan Layan angkut Sampah Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan,(diolah) 2015

➤ Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 September 2015 Pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya. Sampai dengan tahun 2015 dari 13 Kabupaten/Kota yang telah menjadi Peraturan Daerah sebanyak 10 Kabupaten/kota dan masih terdapat 3 Kabupaten/Kota yang belum membuat peraturan daerah.



4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Secara keseluruhan total penanganan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah, 19,13%. Hal itu disebabkan masih minimnya pula prosentase penanganan pengurangan kumuh di tiap-tiap kab/kota. Data kawasan kumuh tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 44 Cakupan Pengurangan Kawasan kumuh tertangani Tahun 2014

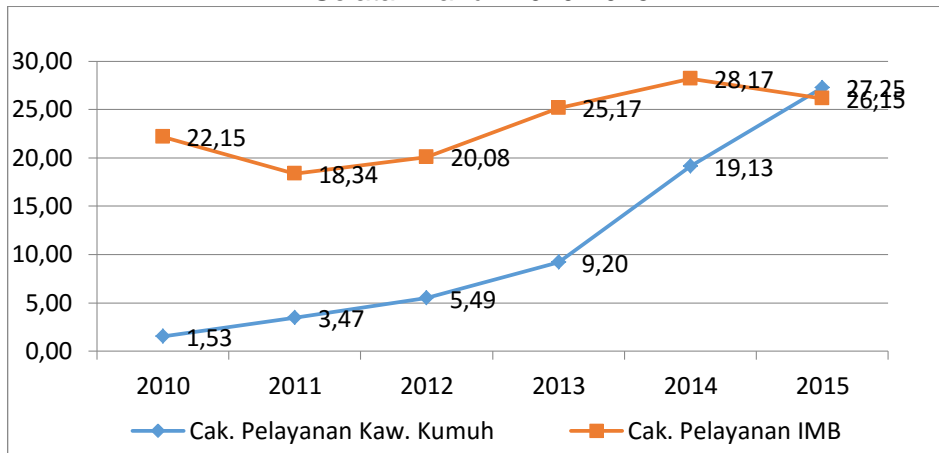
No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	PENGEMABNGAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH		
			Luas (ha)	Luasan Pengurangan Kumuh Tertangani (ha)	Cakupan (%)
1	Kabupaten Tanah Laut	319,098	510.01	10	1.96
2	Kabupaten Kotabaru	314,492	149.6	25	16.40
3	Kabupaten Banjar	545,397	573.04	26.8	4.68
4	Kabupaten Barito Kuala	294,109	1434.32	2.06	99.68
5	Kabupaten Tapin	179,166	-	2.727	20
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	224,474	38.946	2.6	6.68
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	257,107	61.07	11	18.01
8	Kabupataen Hulu Sungai Utara	222,314	213.76	17	7.95
9	Kabupaten Tabalong	235,777	29.06	0.29	0
10	Kabupaten Tanah Bumbu	315,815	0	0	0
11	Kabupaten Balangan	121,318	18.20	9.01	50
12	Kota Banjarmasin	666,223	549.7	126.898	23.08
13	Kota Banjarbaru	227,500	349.12	0.182	0.05
	Total Kab/Kota	3,922,790	3,926.83	233.567	19.13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Prosentase penanganan kawasan kumuh walaupun masih kecil akan tetapi memiliki progress yang cukup bagus tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel 2.18 dari tahun 2010 sampai dengan 2015 selalu menunjukkan peningkatan pelayanan penanganan kawasan kumuh. Sedangkan layanan terhadap bangunan yang telah berizin mendirikan bangunan (IMB) secara keseluruhan masih rendah. Hal ini dikarenakan jumlah bangunan gedung yang sudah memiliki IMB sangat sedikit. Minimnya perhatian dari pemerintah Kabupaten/Kota terhadap IMB bangunan gedung menyebabkan capaian SPM-nya juga sangat rendah.



Gambar 2. 25 Cakupan pelayanan kawasan kumuh dan layanan IMB Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, (diolah) 2015

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi saat ini sudah dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah.

Tabel 2. 45 Cakupan Pengurangan Kawasan kumuh tertangani Tahun 2013-2014

NO	URAIAN	2013	2014
1	Jumlah tindak pidana	8,009	3,580
2	Jumlah tindak pidana yang diselesaikan	5,441	2,463
3	Persentase tindak pidana diselesaikan	67.94%	68.80%
4	Jumlah resiko terkena tindak pidana	192	223
5	Selang waktu terjadi tindak pidana	1 Jam 5'24"	7 jam 10'12"
6	Kotijensi SARA	40	0
7	Konflik	0	0

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014-2015

6) Sosial

Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang dikembangkan seperti peningkatan kapasitas pelayanan social dalam panti maupun di luar panti, pengembangan program



Pembangunan Keluarga Harapan, pengembangan keberdayaan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial

Khusus untuk pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia, selain yang dilayani di dalam panti, juga dilakukan pelayanan di luar panti. Berikut ini perkembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2011-2015.

Tabel 2. 46 Perkembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

NO	PELAYANAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Panti Sosial Bina Remaja	250	250	250	250	250
2	Panti Sosial Bina Wanita	160	160	250	250	250
3	Panti Sosial Asuhan Anak	60	60	80	100	110
4	Panti Sosial Lanjut Usia	125	125	125	125	125
5	Panti Sosial Tunanetra	60	60	75	90	100
6	Lanjut Usia di Luar Panti	180	210	240	250	350
7	KUBE dan lainnya	600	800	1200	1600	1800

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, diolah. 2015.

Selanjutnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tuna wisma. Jumlah penyandang permasalahan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 47 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah (Jiwa)
1	Bayi terlantar	1.071
2	Anak terlantar	9.039
3	Anak nakal	325
4	Anak jalanan	134
5	Anak dengan kedisabilitas	838
6	Anak korban tidak kekerasan	57
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	20
8	Lanjut usia terlantar	29.048
9	Penyandang diabilitas	14.986
10	Tuna susila	654
11	Gelandangan	169
12	Pengemis	439
13	Pemulung	510
14	Kelompok minoritas	12
15	Bekas warga binaan pemasyarakatan	1.408
16	Orang dengan HIV/AIDS	13
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	936
18	Korban trafficking	1
19	Korban tidak kekerasan	133
20	Pekerja migran terlantar	4
21	Korban bencana alam	19.119
22	Korban bencana sosial	1.383
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	16.296



No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah (Jiwa)
24	Keluarga fakir miskin	84.787
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	7.832
26	Komunitas adat terpencil	5.409
Kalimantan Selatan		194.623

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

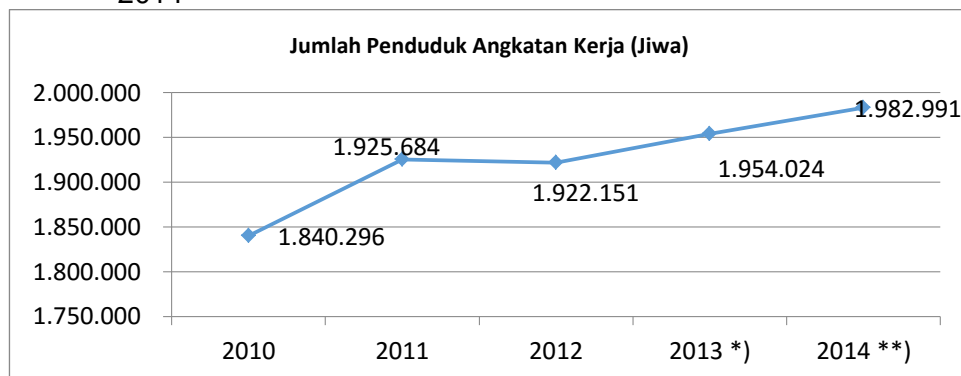
Pada tahun 2014, terdapat 194.623 jiwa penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dimana sebagian besar permasalahan merupakan permasalahan keluarga fakir miskin sebanyak 84.787 jiwa dan diikuti oleh permasalahan penduduk lanjut usia yang terlantar sebanyak 29.048 jiwa dan korban bencana alam sebanyak 19.119 jiwa.

b. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar

1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenaga kerjaan di Kalimantan Selatan focus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan menekan usia penduduk usia 15 tahun hingga 24 tahun masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 2. 26 Perkembangan Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

Gambar diatas menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.840.296 jiwa dan pada tahun 2014 sebanyak 1.982.991 jiwa. Terjadi peningkatan sebanyak 142.695 jiwa selama um waktu



tahun 2010-2014, atau tumbuh rata-rata sebesar 28.539 jiwa per tahunnya. Meskipun demikian pada periode tahun 2011-2012 terjadi penurunan dari 1.925.684 jiwa menjadi 1.922.151 jiwa.

Jika dilihat perkembangan kabupaten/kota, maka angkatan kerja terbanyak ada di Kabupaten Banjar yang mencapai 315.733 jiwa pada tahun 2014, kemudian Kota Banjarmasin dengan 314.819 jiwa dan Kabupaten Tanah Laut dengan 169.338 jiwa. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Balangan dengan 69.324 jiwa, kemudian Kabupaten Tapin dengan jumlah 85.790 jiwa dan Kota Banjarbaru dengan 198.180 jiwa. Lebih lanjut gambaran berikut ini adalah perkembangan Angkatan Kerja Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014.

Tabel 2.48 Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2010-2014

Kabupaten	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2010	2011	2012	2013 *)	2014 **)
Kalimantan Selatan	1,840,296	1,925,684	1,922,151	1,954,024	1,982,991
Tanah Laut	154,915	163,388	160,807	165,159	169,338
Kota Baru	132,483	154,439	139,121	139,027	138,851
Banjar	274,180	273,605	287,572	300,994	315,733
Barito Kuala	142,640	151,803	164,631	166,653	166,780
Tapin	86,387	94,873	84,975	85,302	85,790
HSS	111,648	115,778	108,312	107,437	105,473
HST	129,521	133,669	136,497	137,109	137,480
HSU	107,722	110,896	119,619	118,938	118,890
Tabalong	117,533	118,709	117,600	118,825	120,044
Tanah Bumbu	127,980	139,163	132,697	137,270	142,287
Balangan	60,275	59,873	68,355	68,026	69,324
Banjarmasin	300,320	311,180	311,031	314,344	314,819
Banjarbaru	94,692	98,308	90,934	94,940	98,180

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;

Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyeteraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa permasalahan yang masih besar terjadinya gap antara laki-laki dan perempuan adalah pada tingkat upah yang diukur dengan pengeluaran riil, dimana rata-rata penghasilan perempuan masih sekitar 50%nya dari rata-rata penghasilan laki-laki. Kondisi ini konsisten terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2014 dan bahkan cenderung makin melebar selisihnya.

**Tabel 2. 49** Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan 2011-2014

TAHUN	URAIAN	AHH	AHLS(TH)	RRLS	PENG RIIL%	NILAI IPG
2011	Perempuan	65,48	-	7,10	3,447	88,09
	Laki-Laki	69,34	-	8,10	6,553	
2012	Perempuan	65,58	-	7,20	3,448	88,33
	Laki-Laki	69,45	-	8,16	6,552	
2013	Perempuan	65,76	-	7,30	5,886	88,33
	Laki-Laki	61,96	-	8,27	12,979	
2014	Perempuan	73,31	12,12	7,50	7,888	88,46
	Laki-Laki	69,40	11,81	8,38	16,311	

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, diolah. 2015.

Sementara dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2011-2014 mengalami kecenderungan yang meningkat, meskipun pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dengan angka 68,40 menjadi 68,22, namun masih jauh berada dari kondisi tahun 2011 yang sebesar 62,99. Kecenderungan indeks pemberdayaan gender yang menurun adalah komponen perempuan pekerja profesional/teknisi/kepemimpinan/ketatalaksanaan menjadi 44,32 pada tahun 2014 menurun dari tahun 2011 yang sebesar 45,02. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 50 Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2014.

IDG	2011	2012	2013	2014
Perempuan di parlemen (%)	10,91	13,13	16,36	14,55
Perempuan Pekerja Profesional/ Teknisi/ Kepemimpinan/Ketatalaksanaan (%)	45,02	43,23	42,16	44,32
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja (%)	34,47	35,43	36,35	34,90
IDG	62,99	64,35	68,40	68,22

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015.

3) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanansosial. Berdasarkan data dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat bahwa untuk produksi pangan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada produksi telur terjadi kenaikan sampai dengan 81.453 ton di tahun 2013 akan tetapi terjadi penurunan kembali



pada tahun 2014 sebesar 73.117 ton/tahun. Begitu juga dengan produksi susu yang mencapai sukses nya di tahun 2012 akan tetapi mengalami penurunan ditahun 2013 dan 2014. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 51 Produksi pangan utama di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015

NO	PENINGKATAN PRODUKSI	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Tanaman Pangan	(ton)	2.025.298	2.056.532	2.031.029	2.107.028	2.140.276
2	Daging	Ton/Th	55.877	63.417	65.651	76.115	76.997
3	Telur	Ton/Th	72.210,	75.665	81.453	73.117	85.515
4	Susu	liter/Th	153.653	245.453	135.079	137.081	287.278
5	Ikan Lokal	Ton/Th	4.708	9.269,5	10.109,3	13.231,3	13.404
6	Ikan Nila	Ton/Th	32.489	32.700,	32.222	32.009,7	32.327
7	Ikan Tangkap	Ton	51.426	52.012	45.441,7	52.729,7	53.341

Sumber : BKP Provinsi Kalsel

4) lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan data yang ada kondisi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat kenaikan yang rendah. Kondisi terakhir Kalimantan Selatan secara peringkat naik ke peringkat 27 dari 34 Provinsi di Indonesia. Pengaruh terbesar pada masih rendahnya indeks tutupan lahan akibat dari eksploitasi usaha yang membuka kawasan hutan dan akibat bencana kebakaran hutan. Kejadian tersebut mengakibatkan lahan menjadi kritis seperti terlihat pada tabel 3.9. Sampai dengan tahun 2014, lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 640.708 Hektar, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 283.185,00 Ha (\pm 44,20 %) dan di luar kawasan hutan seluas 357.523,00 Ha (\pm 55,80 %). Meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara ekstensif dan intensif, namun penambahan luas lahan kritis tetap berlangsung.

Kondisi Kualitas air yang juga masih rendah berpengaruh besar terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian BLHD pada tahun 2012 dari beberapa titik sungai yang dipantau termasuk kategori tercemar berat. Sebagian besar akibat dari pencemaran limbah domestik.

**Tabel 2. 52** Kondisi Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

No	Jenis	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Peringkat IKLH se-Indonesia	21	23	22	26	27
2	Indeks LH	58,24	60,69	56,74	55,86	57,51
3	Tutupan Lahan	39,24	46,37	43,80	43,66	44,51
4	Kualitas Air	36,67	35,00	53,26	46,16	44,00
5	Kualitas Udara	98,78	99,49	77,46	81,83	88,35

Sumber: BLHD Kalimantan Selatan

Tabel 2. 53 Kondisi Lahan Kritis di Kalimantan Selatan Tahun 2013

No	Provinsi	Tingkat Kekritisn Lahan					Luas
	Kabupaten	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	(Ha)
I	Kalimantan Selatan	110.168,9	1.465.241,6	1.355.054,7	682.294,2	78.748,4	3.691.507,9
1	Banjarbaru	7,2	2.842,1	25.331,0	1.085,3	3.107,6	32.373,2
2	Banjar	9.436,1	163.090,2	153.809,7	110.934,3	10.018,9	447.289,1
3	Banjarmasin	780,3	2.039,1	5.445,4			8.264,8
4	Barito Kuala	9.918,8	107.998,6	95.625,5	7.872,6		221.415,6
5	Tapin	1,272,9	87.613,5	101.816,9	24.262,9	4.576,2	219.542,4
6	Hulu Sungai Selatan	5.045,1	21.684,9	112.003,6	28,2237,4	2.323,0	169.383,7
7	Hulu Sungai Tengah	9.633,8	47.452,7	40.623,6	42.094,8	201,7	139.006,6
8	Hulu Sengai Utara	4.570,7	20.143,1	51.373,9	13.630,6		89.718,3
9	Balangan	5.741,2	82.505,6	58.238,9	38.114,5	5.233,2	189.833,4
10	Tabalong	7.958,6	177.240,9	105.786,5	52.625,0	3.735,1	347.283,2
11	Tanah Laut	674,1	106.123,6	208.382,4	54.930,1	17.306,9	387.417,0
12	Tanah Bumbu	2.229,0	195.893,1	219.684,8	59.043,8	17.591,3	494.442,0
13	Kotabaru	52.901,0	450.614,2	176.932,9	250.435,9	14.654,5	945.638,4

Sumber: Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, 2013

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menuju identitas tunggal, kegiatan yang dilakukan hanya terkait dengan upaya sosialisasi standarisasi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lain sebagainya. Upaya pembinaan ini diarahkan pada upaya percepatan bagi kabupaten/kota mencapai identitas tunggal tersebut.

Pada tingkat kabupaten/kota telah dikembangkan system pelayanan terpusat pada kantor/lembaga yang menangani catatan sipil, sementara untuk beberapa kabupaten telah membagi kewenangannya kepada kantor kecamatan



guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk pembuatan KTP, sedangkan untuk kartu keluarga, akte kelahiran dan lain sebagainya masih di kantor catatan sipil.

Secara kelembagaan semua kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun secara kualitas perlu adanya peningkatan dari berbagai sisi seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang lebih memadai baik secara kuantitas dan secara kualitas. Hal ini mengingat tantangan yang masih cukup besar terutama terkait dengan upaya sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas pada umumnya dan identitas tunggal pada khususnya.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya pembangunan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK.



Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber Ekonomi melalui simpan pinjam kelompok perempuan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Jumlah kelompok simpan pinjam bagi perempuan dan Badan Usaha Milik desa sudah dikembangkan di 13 kabupaten Kota dengan hasil 540 kelompok pada 540 desa dan 13 BUMDes percontohan.

Dibidang pemerintahan desa telah pula dilaksanakan pembinaan pembangunan desa seperti perencanaan desa dalam rangka menyusun RPJM desa, peningkatan kapasitas pelayanan desa dan kualitas aparatur dan kepala desa, agar memiliki kemampuan dalam mengelola system manajemen desa baik pemerintahan maupun keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini telah dibina seluruh desa dengan pola pembinaan melalui percontohan yang kemudian dikembangkan oleh kabupaten sesuai kondisi dan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan, namun demikian khusus untuk pengelolaan keuangan desa telah dilatih sekitar 3.200 aparatur desa untuk dapat menjalankan administrasi keuangan desa.

Dibidang teknologi, telah dilakukan berbagai upaya bersama-sama dengan kabupaten/kota. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dalam rangka mengembangkan pelayanan melalui Pos pelayanan teknologi yang tepat guna, tepat kapasitas dan tepat pembiayaan. Seluruh kabupaten/kota secara formal sudah terbentuk kelembagaan ini namun secara kualitas masih memerlukan peningkatan dan pembinaan lebih lanjut. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari berbagai organisasi lain baik pemerintah maupun non pemerintah seperti pengembangan energi baru terbarukan pada skala desa, peralatan produksi dan lain sebagainya.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru namun hingga sekarang masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana.



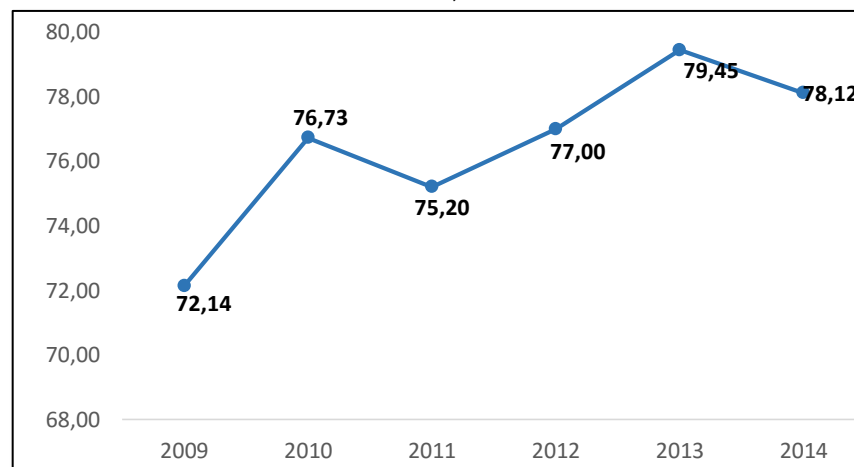
Program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif dimana sarana prasarana dan fasilitas keluarga berencana berusaha ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini terlihat pada persentase akseptor KB terhadap pasangan usia subur yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya meskipun pada tahun terakhir terjadi penurunan akseptor KB aktif menjadi sebesar 78,12% pada tahun 2014 dimana pada tahun sebelumnya mencapai 79,45%.

Tabel 2. 54 Sarana Keluarga Berencana (Unit) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2014

Tahun	Klinik KB	PPKBD	Sub PPKBD	Kelompok KB	PPLKB	PLKB/PKB
2009	340	1.950	4.968	2.488	214	541
2010	345	1.981	5.034	2.761	93	590
2011	381	1.985	5.011	2.700	123	483
2012	390	2.009	5.081	2.727	80	571
2013	394	2.002	5.018	2.668	73	642
2014	6.770	2.007	5.294	2.452	-	-

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Gambar 2. 27 Persentase Akseptor KB Terhadap Pasangan Usia Subur di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2009-2014

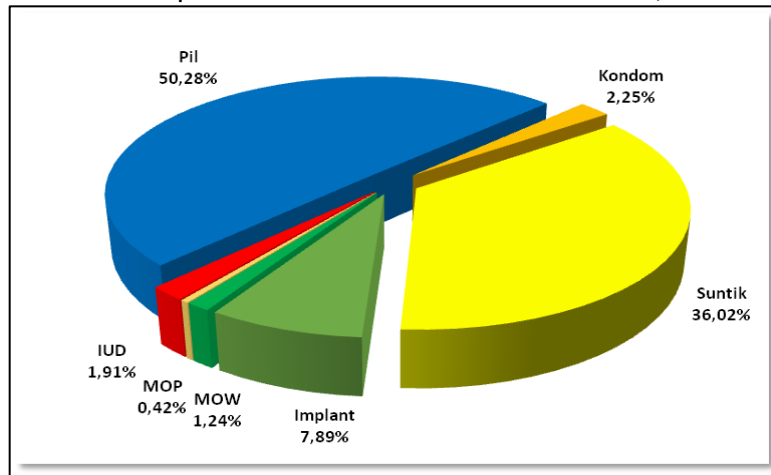


Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Jika melihat persentase akseptor KB menurut pemakaian jenis alat kontrasepsinya, sebagian besar akseptor KB di Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan Pil KB (50,28%) sebagai pilihan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Sedangkan yang kedua adalah penggunaan Suntik KB dengan persentase akseptor sebesar 36,02%.



Gambar 2. 28 Persentase Akseptor KB Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014



Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Kalimantan Selatan, masih memerlukan upaya keras, demi menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kepesertaannya pada tahun 2014 masih mencapai 3,19%. Keadaan ini belum termasuk yang *Unmedneed* yang mencapai 10,5%. Secara rinci perkembangan Pasangan Usia Subur, PUS yang Ber KB dan yang belum ber KB di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014 :

Tabel 2. 55 Perkembangan Kepesertaan KB di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

Tahun	PUS	BER KB	NON KB	%
2010	739,017	719,132	19,885	2.69
2011	760,201	753,644	6,557	0.86
2012	786,880	736,751	50,129	6.37
2013	800,862	775,775	25,087	3.13
2014	812,521	786,605	25,916	3.19

Sumber : BPS Kalsel , diolah. 2015.

8) Perhubungan

Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat, kereta api dan ASDP), perhubungan laut, dan perhubungan udara. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut maupun udara.

➤ Angkutan Darat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2012 di Kalimantan Selatan adalah 866,09 km dan 851,91 km



jalan provinsi sampai dengan tahun 2014 terdapat klasifikasi kelas jalan tertinggi adalah IIIA seperti terlihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2. 56 Panjang Jalan berdasarkan Kelas Jalan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014

Kelas Jalan	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota
Kelas III	-	-	515,17
Kelas IIIA	-	-	682,40
Kelas IIIB	-	-	1.919,43
Kelas IIIC	-	-	3.582,57
Kelas IV	-	-	66,49
Kelas V	-	-	63,6
Tidak Dirinci	866,09	851,91	3.630,88
Jumlah	866,09	851,91	10.460,54

Sumber: Statistik perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

Ditinjau terhadap penyediaan angkutan umum yang ada dapat dijabarkan sebagai berikut: Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

- Kalsel – Kalteng (21 Perusahaan) = 95 Unit Bus
- Kalsel – Kaltim (7 Perusahaan) = 75 Unit Bus

➤ Angkutan Sungai dan Laut

Pelabuhan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Sungai danau, Pelabuhan Kintap, Pelabuhan Batulicin dan Pelabuhan Sebuku. Selama tahun 2014 jumlah barang yang terbongkar diseluruh pelabuhan di Kalimantan Selatan mencapai 118.326.106 ton atau naik 0,31 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan barang yang dimuat sebanyak 90.085.149 ton atau 3,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk arus kapal dalam negeri mengalami fluktuasi, dimana sampai dengan tahun 2013 mengalami trend kenaikan akan tetapi tahun 2014 mengalami penurunan seiring perlambatan perekonomian di Kalimantan Selatan. Pada angkutan penumpang mengalami trend penurunan seiring semakin banyaknya penumpang yang berpindah ke angkutan udara. Selebihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 57 Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2014

NO	KEGIATAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bongkar barang (Ton)	-	-	-	117.964.158	118.326.106
2	Muat barang (Ton)	-	-	-	93.157.273	90.085.149
3	Arus Kapal Dalam negeri (Unit)	-	13.111	14.748	15.938	13.696
4	Arus Kapal Luarnegeri (Unit)	-	1.258	1.297	1.997	1.443
5	Penumpang Turun (Jiwa)	142.553	163.905	119.815	95.946	71.720



NO	KEGIATAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
6	Penumpang Naik (Jiwa)	67.352	87.270	87.624	53.501	30.696

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015.

➤ Angkutan Udara

Jumlah pesawat yang datang di bandara di Kalimantan Selatan tahun 2014 mencapai 18.359 buah atau turun 7,60 % dan pesawat yang berangkat mencapai 18.349 buah atau turun 7,71%. Penurunan jumlah pesawat selama tahun 2014 selaras dengan jumlah penumpang angkutan udara, dimana jumlah penumpang yang berangkat hanya mencapai 1.91 juta orang atau turun 7,62%. Peningkatan justru terjadi pada jumlah penumpang transit yang mencapai 95.945 orang atau naik 66,28%.

Tabel 2. 58 Aktivitas Bandara di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2014

AKTIVITAS DI BANDARA KALSEL			JUMLAH
Pesawat Terbang (Buah)	Datang	2013	19,869
		2014	18,359
	Berangkat	2013	19,881
		2014	18,349
Arus Penumpang (orang)	Datang	2013	1,993,287
		2014	1,904,335
	Berangkat	2013	2,006,783
		2014	1,912,858
	Transit	2013	57,701
		2014	95,945

Sumber: Statistik Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2014.

9) Komunikasi dan Informatika

Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 1304 buah dengan jumlah terbanyak berada di Kota Banjarmasin. Sedangkan jumlah paling kecil berada di Hulu Sungai Utara yang hanya memiliki 42 buah BTS. Untuk kawasan Banua enam selain Kabupaten Tabalong masih dibawah seratus buah ini mengakibatkan signal telekomunikasi menjadi lemah pada kawasan-kawasan tertentu. Selbihnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 59 Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan tahun s/d 2015

NO	KOTA	BANYAK
1	Banjarmasin	180
2	Banjarbaru	108
3	Banjar	158
4	Tapin	56
5	Hulu Sungai Selatan	72
6	Hulu Sungai Tengah	69
7	Hulu Sungai Utara	42



NO	KOTA	BANYAK
8	Balangan	50
9	Tabalong	110
10	Barito Kuala	80
11	Tanah Laut	132
12	Tanah Bumbu	104
13	Kotabaru	143
TOTAL		1304

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun 2014, jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2.468 unit yang sebagian besar merupakan jenis koperasi pegawai negeri (459 unit), koperasi serba usaha (448 unit), dan koperasi unit desa (397 unit).

Tabel 2. 60 Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2015

No	Jenis Koperasi	2011	2012	2013	2014	2015
1	Koperasi Unit Desa	385	392	395	397	398
2	Koperasi Pegawai Negeri	461	465	460	459	461
3	Koperasi Karyawan	227	234	227	226	220
4	Koperasi Industri Kerajinan	15	15	16	16	15
5	Koperasi Angkutan/ Darat/ Laut/Sungai	25	25	25	26	18
6	Koperasi Serba Usaha	382	401	438	448	475
7	Koperasi Generasi Muda/ Mahasiswa	9	9	9	9	8
8	Koperasi Veteran	13	13	13	13	18
9	Koperasi Wredatama	13	19	19	19	19
10	Koperasi Wanita	70	77	82	85	86
11	Koperasi Simpan Pinjam	40	48	46	53	68
12	Koperasi Jasa/Profesi	9	9	8	8	10
13	Koperasi Pasar	39	39	39	40	35
14	Koperasi Pondok Pesantren	70	71	71	71	72
15	Koperasi Pertanian	151	153	153	155	154
16	Koperasi Perikanan	10	11	13	12	12
17	Koperasi Perkebunan	52	55	57	59	58
18	Koperasi Peternakan	10	9	9	9	9
19	Koperasi Angkutan Darat	26	30	26	26	26



20	Koperasi Angkatan Laut	3	2	3	3	3
21	Koperasi Angkatan Udara	1	1	1	1	1
22	Koperasi Kepolisian	18	18	18	18	18
23	Koperasi Jamu Gendong	1	1	1	1	-
24	Koperasi Pemuda	18	20	21	21	19
25	Koperasi PEPABRI	10	8	8	8	8
26	Koperasi Lain-Lain	338	335	350	388	371
Jumlah		2396	2460	2508	2571	2582

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2016

11) Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum. Berikut ini adalah data investasi daerah menurut kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014:

Tabel 2. 61 Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015 PMA dan PMDN.

<i>Dalam Ribu US\$</i>								
NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PROYEK	RENCANA			REALISASI		
			INVESTASI	TKA	TKI	INVESTASI	TKA	TKI
			<i>(Dalam Ribu US\$)</i>	<i>(Orang)</i>	<i>(Orang)</i>	<i>(Dalam Ribu US\$)</i>	<i>(Orang)</i>	<i>(Orang)</i>
1	BANJARMASIN	85	716.919,40	301	3.435	291.188,14	18	1.855
2	BANJARBARU	21	62.861,82	21	1.170	36.976,92	17	677
3	BANJAR	25	308.667,90	10	6.256	253.987,05	27	2.046
4	TAPIN	17	302.372,17	4	5.951	34.559,49	25	3.711
5	H S S	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6	H S T	1	21.358,63	0	150	0,00	0	550
7	H S U	1	750,00	0	50	0,00	0	0
8	BALANGAN	8	308.428,13	1	1.043	52.414,00	0	54
9	TABALONG	11	822.655,30	2	692	816.874,86	33	22.971
10	BARITO KUALA	16	716.442,19	190	28.552	250.661,34	43	4.440
11	TANAH LAUT	48	4.069.932,05	173	9.834	253.714,31	42	4.088
12	TANAH BUMBU	97	1.878.761,50	251	35.826	795.956,81	101	4.510
13	KOTA BARU	55	900.417,73	89	8.016	350.603,39	27	3.122
J U M L A H		385	10.109.566,82	1.042	100.975	3.136.936,31	333	48.024



Dalam Juta Rp

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PROYEK	RENCANA			REALISASI		
			INVESTASI <i>(Dalam Juta Rp)</i>	TKA <i>(Orang)</i>	TKI <i>(Orang)</i>	INVESTASI <i>(Dalam Juta Rp)</i>	TKA <i>(Orang)</i>	TKI <i>(Orang)</i>
1	BANJARMASIN	43	2.579.411,56	141	18.294	3.669.723,36	21	13.409
2	BANJARBARU	18	243.743,68	34	7.130	107.206,08	0	1.198
3	BANJAR	14	3.225.771,99	7	6.880	192.562,84	0	6.779
4	TAPIN	6	1.019.328,37	0	2.204	0,00	0	0
5	HSS	3	1.755.000,00	0	725	0,00	0	0
6	HST	2	21.981,00	0	728	286.804,07	0	260
7	H SU	2	9.950,00	0	396	18.415,56	0	158
8	BALANGAN	8	4.267.100,97	10	2.873	498.025,40	1	4.995
9	TABALONG	10	16.392.755,60	5	5.106	1.684.168,95	19	2.085
10	BARITO KUALA	22	18.554.661,93	105	42.930	587.483,62	12	9.600
11	TANAH LAUT	37	7.440.840,28	24	21.223	2.809.836,37	39	8.954
12	TANAH BUMBU	19	2.069.889,42	22	7.798	1.266.074,84	5	5.841
13	KOTA BARU	37	22.167.909,22	121	42.962	7.495.393,39	49	26.497
J U M L A H		221	79.748.344,02	469	159.249	18.615.694,48	146	79.776

Sumber: BKPMD

12) Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran serta dan arti penting bagi pelaksanaan pembangunan. Jumlah pemuda di Kalimantan Selatan yang berusia 15 – 34 tahun yang belum bekerja sebanyak 1.367.840 orang. Jumlah pemuda tersebut terdiri dari 693.084 orang laki-laki dan 674.756 orang perempuan.

Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program sebanyak 65 Organisasi Kepemudaan. Selain itu dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dilaksanakan Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan melalui pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dari Tahun 2011 - 2014 sebanyak 29.220 orang. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan akses permodalan. Capaian jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan mengalami peningkatan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014, telah mencapai 120 kader.

13) Statistik

Pembangunan data dan informasi yang dikembangkan oleh pemerintah akhir-akhir ini belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Sistem yang dikembangkan masih terkendala dengan terpenuhinya kebutuhan input berupa



data dari masing-masing pemangku kepentingan. Rendahnya upaya penyediaan, pemeliharaan data menjadi kendala utama dalam menyediakan data mentah. Berkaitan dengan hal ini diperlukan upaya membangun system data yang terintegrasi mulai dari penyediaan, pemeliharaan hingga penyajiannya.

Akurasi data ada pada masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan yang di dalam Undang-undang 23 tahun 2014 terdapat 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang memerlukan rekam jejak sebagai tanda keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Ketidaktersediaan data ini sangat mempengaruhi kualitas perencanaan yang berakhir pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hal itu, maka sangat penting bagi Perangkat Daerah melaksanakan sendiri tugas kestatistikan ini, dengan menjadikan monitoring dan evaluasi sebagai pendekatan pengumpulan datanya, dengan demikian kinerja pengumpulan data merupakan bagian dari kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam periode pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Perkembangan Perangkat Daerah yang menyajikan data statistik sektoral di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2014.

Tabel 2. 62 Perkembangan **Perangkat Daerah** yang menyusun Statistik Sektoral Di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

NO.	TAHUN	JUMLAH PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH MENYUSUN STATISTIK SEKTORAL	KETERANGAN
1	2010	48	0	
2	2011	48	0	
3	2012	48	0	
4	2013	48	0	
5	2014	48	0	

Sumber : Bappeda Kalsel, 2015

14) Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konsultasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Jenis kelembagaan yang



sudah ada ini secara umum dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan yang secara terkombinasi akan mendorong perkembangan budaya berakar pada dorongan unsur-unsur budaya yang potensial dikembangkan oleh masing-masing daerah.

15) Perpustakaan dan Kearsipan

➤ Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi yang berisi kumpulan buku dan koleksinya baik yang tercetak maupun tersimpan secara digital. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-Rom dan internet. Perpustakaan juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan dan rekreasi yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Masih rendahnya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan memerlukan upaya keras agar masyarakat memiliki daya saing sebagai tenaga kerja. Untuk mendorong minat baca diperlukan berbagai fasilitasi baik secara persuasif maupun atraktif kepada semua lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan minat baca ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ke perpustakaan, dimana Kalimantan Selatan pada tahun 2014 hanya sebanyak 0,025%.

Perkembangan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan semakin membaik terlihat dari jumlah perpustakaan yang meningkat sebesar 2.100 perpustakaan pada tahun 2014, walaupun terjadi fluktuasi pengunjung perpustakaan selama kurun waktu tahun 2010-2014. Lebih lanjut mengenai perkembangan pembangunan perpustakaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 63 Perkembangan Pembangunan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	-	-	-	-	-
2.	Jumlah peminjam buku	-	-	-	-	-
3.	Jumlah buku yang dipinjam	-	-	-	-	-
4.	Jumlah buku yang tersedia	-	-	-	-	-
5.	Jumlah perpustakaan di Kalsel	-	-	-	-	-
	Perpustakaan Umum Provinsi	2	2	2	2	2
	Perpustakaan Umum Kab/Kota	13	13	13	13	13
	Perpustakaan Desa	6	12	18	24	30

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015.



➤ Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kalimantan Selatan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan kearsipan, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya. Cakupan pengelolaan arsip meliputi seluruh instansi pemerintah, BUMD dan Lembaga Legislatif sebagai berikut :

Tabel 2. 64 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kearsipan di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Instansi Pemerintah	BUMD	Lembaga Legislatif
1	2010	24	0	0
2	2011	30	0	0
3	2012	36	0	0
4	2013	42	0	0
5	2014	48	0	0

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015.

Sementara itu capaian cakupan pelayanan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 65 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014

No.	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
1	2010	48	24	0,5
2	2011	48	30	0,62
3	2012	48	36	0,74
4	2013	48	42	0,86
5	2014	48	48	1,00

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2015.

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi PDRB sebesar 14,32 persen terhadap perekonomian daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun



sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur perekonomian, namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian sehingga pergeseran sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan kontinu.

➤ Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah yang memiliki produksi mencapai 2.140.276 ton dengan produktivitas 4,19 ton/ha pada tahun 2015. Selain itu, komoditas jagung juga cukup memiliki dominasi dalam produksi tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan yakni memiliki panen sebanyak 128.505 ton pada tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 5,86 ton/ha.

Tabel 2. 66 Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas padi dan palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi (sawah dan ladang)	511.213	2.140.276	4.19
2	Jagung	21.926	128.505	5.86
3	Kedelai	7.722	10.537	1.37
4	Kacang Tanah	7.413	9.121	1.23
5	Kacang hijau	634	655	1.03
6	Ubi kayu	2.478	71.751	20.63
7	Ubi jalar	1.257	17.913	14.25

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

➤ Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura, terdapat dua komoditas besar yakni komoditas buah-buahan dan sayuran. Pada komoditas buah-buahan prioritas adalah tanaman jeruk siam dengan produksi 112.301 ton, pisang dengan produksi sebanyak 79.493 ton dan durian dengan produksi sebanyak 15.419 ton. Sedangkan pada komoditas sayuran utama, pada tahun 2015 yaitu Bawang Merah dengan produksi sebanyak 86 ton, Cabe Merah dengan produksi 5.903 ton, dan Cabe Rawit dengan produksi 4.789 ton.

Tabel 2. 67 Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Jeruk siam	3.774	112.301	29.76
2	Pisang	1.842	79.493	43.16
3	Durian	1.704	15.419	9.05
4	Nanas	142	15.661	110.28

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

**Tabel 2. 68** Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Bawang Merah	148	867	5.86
2	Cabe Merah	930	5.903	6.35
3	Cabe Rawit	1.031	4.789	4.64

Sumber: Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

➤ Perkebunan

Pada sub sektor perkebunan, dominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2015 masih tinggi yakni sebesar 1.276.981 ton dan diikuti tanaman karet sebesar 191.593 ton. Meskipun begitu, masih terdapat isu-isu negatif terhadap dampak pengembangan perkebunan sawit ini terhadap lingkungan hidup sehingga pemerintah daerah harus concern mengenai permasalahan tersebut.

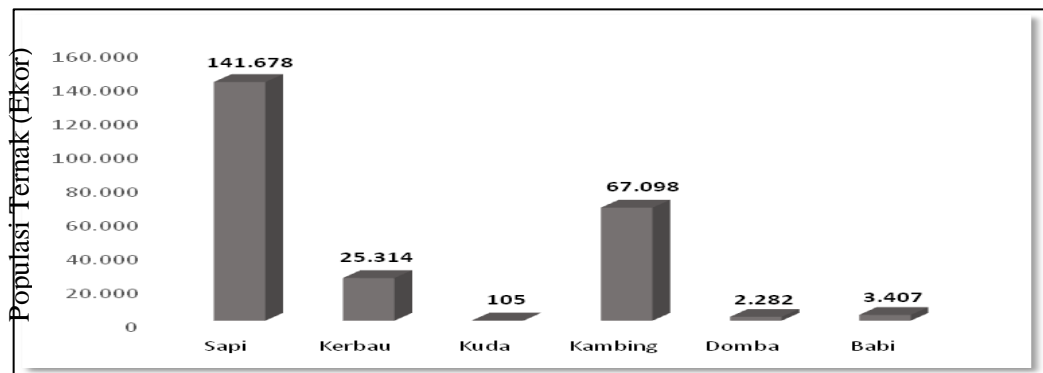
Tabel 2. 69 Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Kelapa Sawit	409.838	1.276.981	4.310
2	Karet	269.835	191.593	1.079
3	Kelapa Dalam	40.267	26.811	897
4	Rumbia	6.579	3.836	1.443
5	Aren	2.527	1.967	1.424

Sumber: Dinas Perkebunan Prov Kalsel 2016

➤ Peternakan

Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2. 29 Populasi Ternak Besar dan Kecil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015



Tabel 2. 70 Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008-2015

Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2008	255.228	127.525	39.307.685
2009	262.833	132.575	48.661.987
2010	273.943	136.258	60.769.449
2011	162.755	115.845	62.777.387
2012	178.656	114.512	60.849.131
2013	155.793	72.507	69.497.801
2014	166.865	72.787	75.748.331
2015	175.245	69.456	84.465.566

Sumber Dinas peternakan prov kalsel 2016

Tabel 2. 71 Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2015

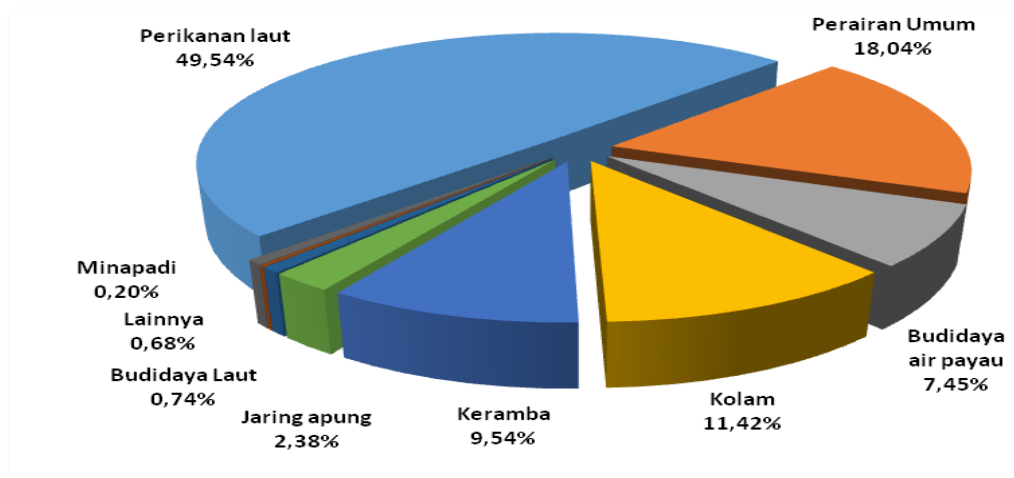
Tahun	Telur Itik	Telur Ayam Buras	Telur Ayam Ras
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	27.733.704	11.161.859	28.990.293
2011	30.672.770	9.782.194	26.826.031
2012	31.640.856	10.511.677	29.219.878
2013	30.105.890	8.192.032	33.947.005
2014	29.489.975	7.509.220	47.650.943
2015	28.677.737	8.088.808	60.261.831

Sumber Dinas Peternakan Prov Kalsel 2016

2) Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2010-2014, secara umum geliat sub sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, perkembangan sub sektor ini di dominasi oleh hasil perikanan laut yaitu sebesar 49,54% dan diikuti oleh subsektor perairan umum sebesar 18,04%.

Gambar 2. 30 Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor (Ton) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014



Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015



Jika dilihat dari produksinya, baik jumlah rumahtangga perikanan, produksi maupun nilainya juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian tertinggi berada pada tahun 2014 dimana jumlah rumah tangga perikanan mencapai 67.487 rumah tangga dengan produksi sebesar 364.794,07 ton dan nilai produksinya mencapai Rp. 6.972.197.094.000,-

Tabel 2. 72 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga, Produksi, dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2014

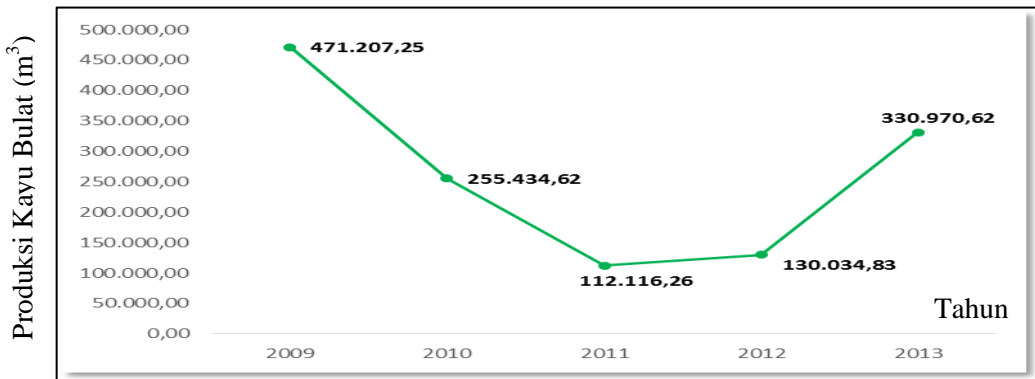
Tahun	Jumlah Ruta (Unit)	Produksi (Ton)	Nilai produksi (000 Rp)
2010	56.744	242.126,30	4.038.067.330
2011	60.919	247.741,10	4.581.337.731
2012	67.095	284.300,70	5.578.497.765
2013	67.191	339.437,28	6.376.406.906
2014	67.487	364.794,07	6.972.197.094
2015	67.980	368.451,70	7.954.889.861

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

3) Kehutanan

Perkembangan produksi kayu bulat yang merupakan salah satu produk unggulan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun produksi kayu yang memang menurun. Namun demikian, subsektor kehutanan terus melakukan perbaikan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan sehingga perkembangannya terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 produksi kayu bulat kembali mencapai 330.970,62 m³.

Gambar 2. 31 Perkembangan Produksi Kayu Bulat (m³) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2013



Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015



4) Energi dan Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang didominasi oleh komoditas Batubara dan Bijih Besi, dimana sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi PDRB yang signifikan bahkan mencapai 22,32 %. Perkembangan produksi batubara pada tahun 2015 sebesar 149.071.520,69 ton, sedangkan produksi bijih besi bulan Januari s/d Maret 2015 sebesar 863.470,00 ton

Tabel 2. 73 Jumlah Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

Izin	Produksi (Ton)	Penjualan (ton)		Jumlah (ton)
		Domestik	Eksport	
PKP2B	91,100,359.54	33,251,060.72	52,052,507.36	85,303,568.08
IUP	57,971,161.15	21,756,591.41	32,954,866.06	54,711,457.47
Jumlah	149,071,520.69	55,007,652.13	85,007,373.42	140,015,025.55

Catatan : Data bulan Januari s/d Desember 2015.

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana jumlah pelanggan keseluruhan mencapai 998.651 pelanggan pada tahun 2015, dimana pada tahun 2014 jumlah pelanggan hanya sebanyak 945.994 pelanggan. Sebagian besar pelanggan adalah rumah tangga sebanyak 923.096 pelanggan, sosial 23.886 pelanggan, kemudian terdapat 44.353 pelanggan untuk bisnis, 527 pelanggan untuk industri, dan 6.790 pelanggan publik.

Tabel 2. 74 Jumlah Pelanggan PT. PLN Persero Kalselteng

PELANGGAN	2011	2012	2013	2014	2015
Sosial (S)	18,188	19,511	21,054	22,350	23,886
Rumah Tangga (R)	711,010	770,506	838,911	875,618	923,096
Bisnis (B)	30,761	33,105	37,130	41,166	44,353
Industri (I)	452	475	492	504	527
Publik (P)	5,060	5,483	5,945	6,356	6,790

Sumber: PLN Kalselteng

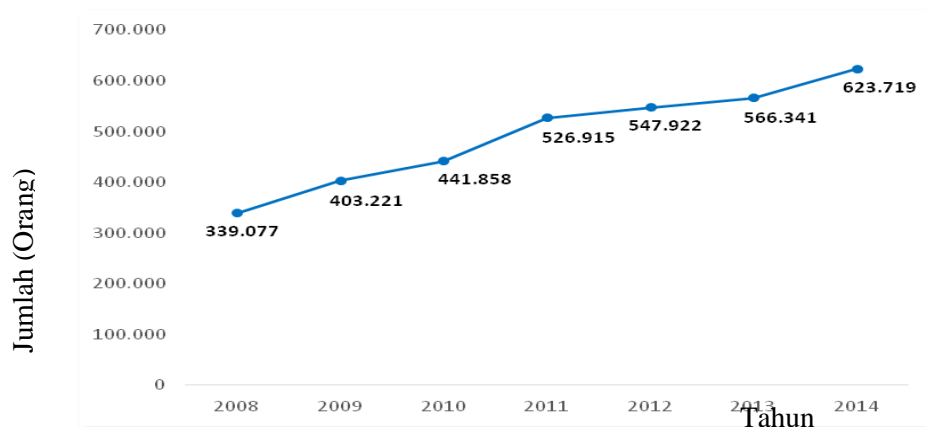
5) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor riil yang memberikan keunggulan lebih dalam pengembangan potensi perekonomian wilayah terutama bagi masyarakat sebagai bagian dari penunjang sektor pariwisata. Adanya



pengembangan pariwisata akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dalam peningkatan perekonomian daerah dengan cara meningkatkan taraf perekonomian rumahtangganya masing-masing. Pengembangan pariwisata juga tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 623.719 wisatawan dimana sebelumnya pada tahun 2008 hanya 339.077 wisatawan saja yang berkunjung dan meningkat cukup signifikan di setiap tahunnya.



Gambar 2. 32 Kunjungan Wisatawan di Provinsi Kalsel Tahun 2008-2014
Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014

6) Perdagangan

Nilai ekspor menjadi salah satu pilihan menarik dalam menumbuhkembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus perekonomian nasional. Pada perkembangannya, komoditas produk tambang mendominasi ekspor di Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2014 sebesar 141.762.270,22 ton dimana angka tersebut memiliki nilai ekspor sebesar US\$8.765.582.970,-.

**Tabel 2. 75** Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2015

No	Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kelapa Sawit	2.002.239.852,00	1.084.130.267,99
2	Karet Alam	97.328.559,60	137.870.804,07
3	Kayu	234.140.681,29	215.210.386,65
4	Rotan	264.855,84	764.828,75
5	Perikanan	2.161.909,96	14.613.271,25
6	Produk Tambang	126.902.728.086,00	4.974.207.261,18
7	Produk Lainnya	2.634.638.780,30	162.821.797,36
Total		131.873.502.724,99	6.589.618.617,25

Sumber: Disperindag prov Kalsel 2016

7) Industri

Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan cukup dominan dimana besarnya mencapai 13,15% distribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Perkembangan sektor dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

Pertumbuhan unit usaha di Kalimantan Selatan sebesar 4,7% pada tahun 2012-2013 menjadi salah satu hasil pembangunan yang positif karena memiliki efek ke beberapa hal seperti peningkatan perekonomian sektor industri pengolahan hingga peningkatan penyerapan tenaga kerja (pengangguran berkurang).

Perkembangan investasi sektor perindustrian di Kalimantan Selatan memiliki nilai investasi yang meningkat dibandingkan tahun 2012 menjadi 11,55 triliun rupiah pada tahun 2013, nilai produksi meningkat menjadi 29,49 triliun rupiah, nilai bahan baku meningkat menjadi 8,77 triliun rupiah, dan nilai tambah yang mencapai 20,72 triliun rupiah.

Tabel 2. 76 Perkembangan Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	Laju Pertumbuhan (%)
1	Unit usaha (buah)	63.554	66.544	70.043	73.825	4,70
2	Tenaga kerja (orang)	184.270	207.773	208.778	209.939	12,75
3	Nilai investasi (Rp. 000)	10.680.798.337	11.550.010.060	11.961.378.449	12.404.005.572	8,14



No	Uraian	2012	2013	2014	2015	Laju Pertumbuhan (%)
4	Nilai produksi (Rp. 000)	26.451.103.404	29.490.437.256	30.897.039.609	32.460.915.030	11,49
5	Nilai bahan baku (Rp. 000)	6.566.759.470	8.768.225.927	8.769.029.228	8.988.254.959	33,52
6	Nilai tambah (Rp. 000)	19.884.343.934	20.722.211.329	22.128.010.381	23.472.660.071	4,21

Sumber: Deperindag Prov.Kalsel, 2016

8) Transmigrasi

Kalimantan Selatan memiliki lokasi yang tersebar di tujuh kabupaten yaitu Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Balangan dan Tabalong.

Dari sejumlah kawasan transmigrasi yang ada terdapat dua Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) memerlukan pembinaan kawasan yakni yang terdapat di kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu sebagai lokasi yang direncanakan. Pembinaan transmigrasi di Tanah Bumbu adalah dalam rangka persiapan lokasi kawasan transmigrasi yang direncanakan mencapai 300 KK.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya yang menjadikan setiap daerah dapat berbeda dalam merencanakan pembangunannya. Terlebih lagi dalam hal daya saing daerah, dimana daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga akan tercapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki.

Terkait dengan aspek daya saing daerah diuraikan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah dimana daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan



ekonomi daerah dimana semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut dengan daerah lain.

- **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

Tabel 2. 77 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

KABUPATEN	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (PPP) (RIBU RUPIAH)		
	2011	2012	2013
KALIMANTAN SELATAN	640,73	643,66	646,77
TANAH LAUT	634,93	638,23	641,54
KOTA BARU	656,99	660,40	663,33
BANJAR	645,99	649,27	652,07
BARITO KUALA	637,93	640,99	643,78
TAPIN	630,54	633,52	636,41
HULU SUNGAI SELATAN	650,70	653,63	656,68
HULU SUNGAI TENGAH	638,16	641,15	644,16
HULU SUNGAI UTARA	635,19	638,34	641,95
TABALONG	641,15	644,97	648,21
TANAH BUMBU	639,13	641,92	644,72
BALANGAN	624,05	626,51	629,42
KOTA BANJARMASIN	648,60	651,44	654,79
KOTA BANJAR BARU	648,59	651,57	655,46

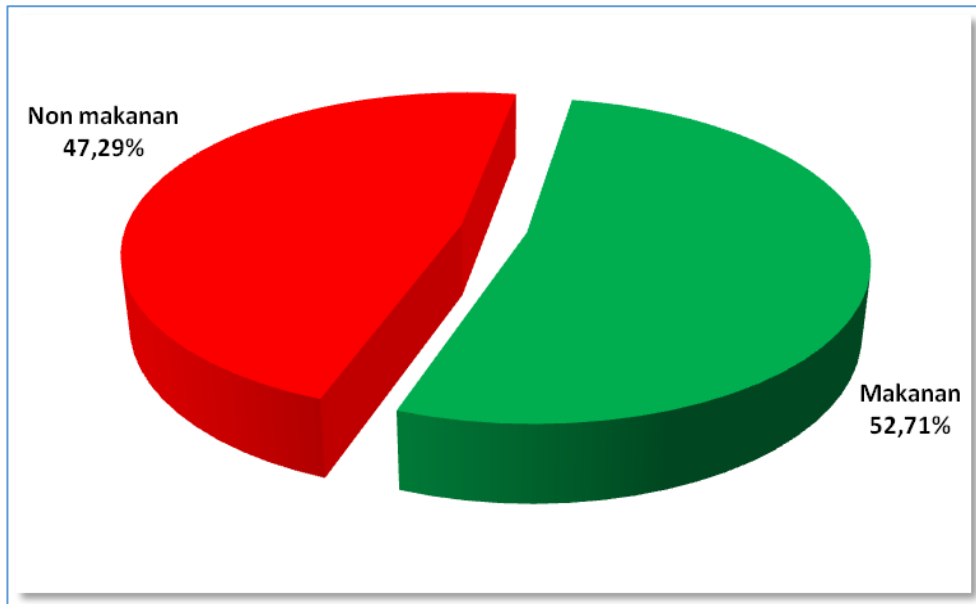
Sumber: BPS

Tabel diatas merupakan pengeluaran informasi perkapita kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran perkapita tertinggi berada di Kabupaten Kotabaru. Sedangkan pada tahun 2014, pengeluaran rata-rata per kapita Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp. 861.577,- dengan rincian sebesar Rp 454.124,- (52,71%) untuk kebutuhan makanan dan Rp. 407.453,- (47,29%) untuk kebutuhan non makanan. Terlihat bahwa sebagian besar



pengeluaran rata-rata per kapita sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih cukup tinggi upayanya dalam memenuhi kebutuhan primer.

Gambar 2. 33 Pengeluaran Rata-rata per Kapita di Provinsi Kalsel Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015

- **Nilai Tukar Petani :**

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Tabel 2. 78 NTP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 (%)

Desember 2011	Desember 2012	Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015
109.56	107.00	100.44	98.47	99.03

Sumber: BRS BPS Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Selatan, 2010-2016



2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

• Penataan Ruang

Sebagai bagian wilayah di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hutan yang sangat luas meskipun setiap tahun mengalami penurunan luas hutan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Meskipun begitu, luas wilayah hutan saat ini mencapai 1.613.431 Ha dengan persentase sebesar 42,99%. Selain itu masih terdapat sawah (11,35%) dan padang (22,01%) pada penggunaan lahan wilayah. Berikut rincian luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2. 79 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

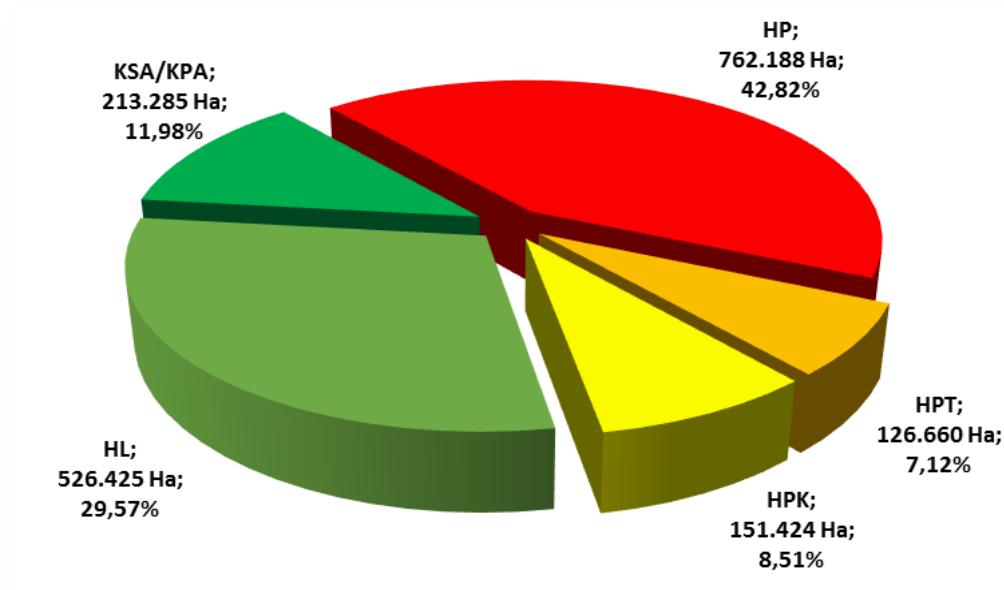
No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kampung	59.690	1,59
2	Industri	2.489	0,07
3	Pertambangan	42.611	1,14
4	Sawah	426.064	11,35
5	Pertanian Tanah Kering Semusim	60.150	1,60
6	Kebun Campuran	171.602	4,57
7	Perkebunan	441.448	11,76
8	Padang	826.130	22,01
9	Hutan	1.613.431	42,99
10	Perairan Darat	45.728	1,22
11	Tanah Terbuka	3.712	0,10
12	Lain-lain	59.997	1,60
Jumlah		3.753.052	100,00

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

Penggunaan kawasan hutan sebagian besar merupakan hutan produksi yang mencapai 762.188 Ha (42,82%) dan diikuti oleh hutan lindung seluas 526.425 Ha (29,57%). Penggunaan kawasan hutan untuk berbagai aktivitas perekonomian harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar terus melakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya eksploitasi hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2. 34 Penggunaan Kawasan Hutan (Ha) di Provinsi Kalsel Tahun 2014



Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

- **Energi**

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana jumlah pelanggan keseluruhan mencapai 946.093 pelanggan pada tahun 2014 dimana enam tahun sebelumnya yakni tahun 2008 jumlah pelanggan hanya sebanyak 609.724 pelanggan. Sebagian besar pelanggan adalah rumah tangga sebanyak 875.618 pelanggan, kemudian terdapat 41.166 pelanggan untuk usaha, 504 pelanggan untuk industri, dan 28.805 pelanggan umum.

Tabel 2. 80 Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan Provinsi Kalimantan Selatan, 2008-2014

Tahun	Rumah Tangga	Usaha	Industri	Umum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008	565.212	24.820	440	19.252	609.724
2009	609.802	25.817	452	20.549	656.620
2010	659.805	27.983	443	21.725	709.956
2011	711.010	30.761	452	23.248	765.471
2012	770.506	33.105	475	26.268	830.354
2013	838.911	37.130	492	28.709	905.242
2014	875.618	41.166	504	28.805	946.093

Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

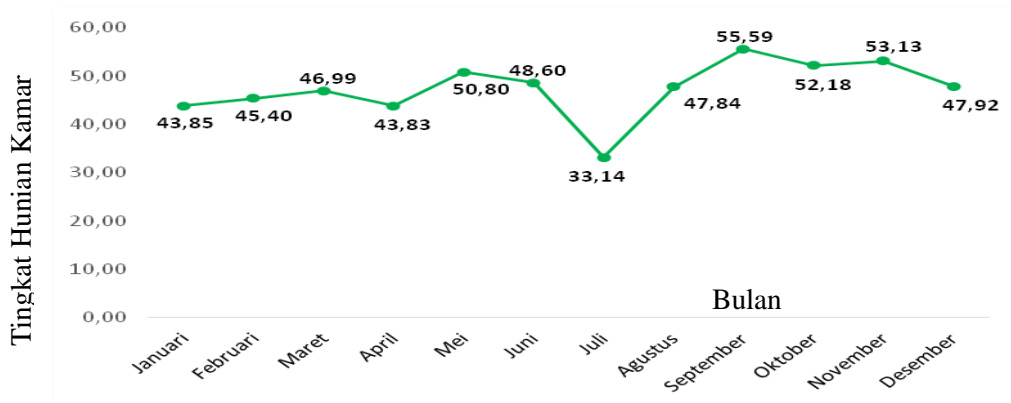


- **Hotel**

Fasilitas akomodasi berupa perhotelan merupakan salah satu sisi strategis pengembangan perekonomian dari sisi jasa yang mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terutama pada daerah perkotaan. Fasilitas perhotelan memiliki daya tarik tersendiri dalam hubungannya dengan aktivitas pembangunan terutama keterkaitannya dengan pihak luar daerah. Selain itu, perhotelan yang berkualitas akan menunjang berbagai sektor lain terutama pariwisata.

Tingkat hunian kamar hotel di Provinsi Kalimantan tahun 2014 secara umum berada di bawah 50% per bulannya. Jika dilihat rangenya, tingkat hunian kamar tertinggi sebesar 55,59% pada bulan September dan terendah sebesar 33,14% pada bulan Juli. Jika dilihat secara total dalam setahun, maka tingkat penghunian kamar di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 47,35%.

Gambar 2. 35 Tingkat Penghunian Kamar per Bulan di Provinsi Kalsel Tahun 2014



Sumber: Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015

2.4.3 Iklim Berinvestasi

- **Kriminalitas**

Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup tinggi dimana selang waktu kejadian antarkasus pidana adalah 37 jam 10 menit 12 detik. Selang waktu kejadian tindak pidana ini jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin yang hanya berselang kisaran satu jam lebih, namun untuk ke depannya peran aparat penegak hukum harus dioptimalkan demi menjaga keamanan dan



kedamaian wilayah. Selain itu, persentase penyelesaian tindak pidana juga hanya sebesar 68,80% yang menunjukkan masih cukup banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan.

Tabel 2. 81 Statistik Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	jumlah tindak pidana	3.580
2	jumlah tindak pidana yang diselesaikan	2.463
3	Persentase tindak pidana diselesaikan	68,80%
4	Jumlah resiko terkena tindak pidana	223
5	Selang waktu terjadi tindak pidana	37 Jam 10 Menit 12 Detik

Sumber: *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2014*

2.4.4 Sumber Daya Manusia

- **Ketenagakerjaan**

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan merupakan suatu indikator yang dapat mengindikasikan suatu wilayah apakah tergolong maju atau tidak dari segi demografi. Rasio ketergantungan menunjukkan ketergantungan antara penduduk produktif terhadap penduduk non produktif.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, rasio ketergantungan pada tahun 2014 mencapai 48,90 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung beban sebanyak 48-49 penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan juga dibagi menjadi dua yakni rasio ketergantungan muda (43,30) dan rasio ketergantungan tua (5,61). Dari kedua rasio tersebut, terlihat bahwa beban tanggungan didominasi terhadap usia non produktif muda yang berumur 0-14 tahun yang mencapai 43-44 penduduk yang harus ditanggung. Sedangkan penduduk usia nonproduktif tua hanya sebanyak 5-6 penduduk saja yang harus ditanggung bebannya oleh 100 penduduk usia produktif.

Tabel 2. 82 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2014

No	Uraian	Nilai
1	Jumlah Penduduk	3.922.790
2	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	2.634.445
3	Penduduk Usia Non Produktif 0-14 tahun	1.140.604
4	Penduduk Usia Non Produktif 65+	147.744
5	Rasio Ketergantungan Muda	43,30
6	Rasio Ketergantungan Tua	5,61
7	Rasio Ketergantungan	48,90

Sumber: *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2015 (diolah)*



2.5 Realisasi Capaian Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan

Selama jangka waktu RPJMD tahun 2011-2015 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja selama 2011-2015 dimana rata-rata menunjukkan angka yang mengembirakan, yang berarti bahwa antara target dan realisasi dapat terealisasi. Hal itu dapat ditunjukkan pada tabel 2.78

Tabel 2. 83 Realisasi Capaian Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
	Urusan Wajib							
1	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf	%	96,73	96,84	96,95	97,50	98,27	Disdik
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,68	7,89	8,01	8,13	8,25	Disdik
1.3	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	99,28	99,38	99,48	99,58	99,69	Disdik
1.4	APK SMP/MTs	%	97,54	98,17	98,80	98,91	99,95	Disdik
1.5	APK SMA/MA/SMK	%	78,25	78,72	79,19	79,46	79,82	Disdik
2	Kesehatan							
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	64,17	64,52	64,82	65,20	67,47	Dinkes
2.2	Angka Kematian Bayi	kasus per 1000 Kh	34	34	44	44	44	Dinkes
2.3	Angka kematian ibu	Kasus	120	123	105	120	89	Dinkes
2.4	Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	%	60	65	66	67	81	Dinkes
2.5	Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100	Dinkes
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Jumlah aturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Buah	NA	1	1	N/A	N/A	Dinas PU
3.2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	81	81	82,39	85,83	N/A	Dinas PU
3.3	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	88,46	87	81,00	82,44	N/A	Dinas PU
3.4	Menurunnya pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas	%	- 9.55	Naiknya pelanggaran > 100% atau dari -	- 213.69	N/A	N/A	Dishubkominfo



BAB II – Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
				352 = (89-441)				
3.5	Kecepatan tempuh rata-rata	Km/Jam	35	40	40	N/A	N/A	Dinas PU
3.6	Luas DI/DR yang dikembangkan	ha	1.500	1.721	3.776	474	N/A	Dinas PU
3.7	Tersedianya data SD Air (WS Barito dan WS Cengal Batulicin)	%	100	90	251,73	N/A	N/A	Dinas PU
3.8	Penanganan pantai	Km	5,00	3,45	2,50	2,00	N/A	Dinas PU
3.9	Persentase tersedianya air baku	%	18,18	18,18	18,18	N/A	N/A	Dinas PU
3.10	Persentasi terbangunnya jaringan irigasi rawa	ha	7.500	10.500	19.628	N/A	N/A	Dinas PU
3.11	Penanganan tebing	Km	2,00	2,02	0,17	9,00	N/A	Dinas PU
3.12	Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa	%	100	150	56	N/A	N/A	Dinas PU
3.13	Persentase panjang pantai yang bebas abrasi	%	100	69	10	N/A	N/A	Dinas PU
3.14	Persentase panjang tebing yang tertangani	%	100	101	1,65	N/A	N/A	Dinas PU
3.15	Jumlah lahan pertanian yang bebas intrusi air laut.	%	N/A	NA	NA	N/A	N/A	Dinas PU
3.16	Jumlah air yang bebas intrusi air laut	%	NA	NA	NA	N/A	N/A	Dinas PU
3.17	Cakupan pelayanan persampahan	%	29,9	48,38	51,25	57,47	N/A	Dinas PU
3.18	Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan	%	21,14	48,38	51,25	N/A	N/A	Dinas PU
3.19	Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih	%	44,55	49,86	46,20	N/A	N/A	Dinas PU
3.20	Jumlah bangunan gendung yang memenuhi standar kualitas dan HSBGN	Unit	9	9	6	N/A	N/A	Dinas PU
3.21	Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang imprastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW	%	NA	NA	10	N/A	N/A	Dinas PU
3.22	Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemda	%	3 / 11,53 %	9 / 34,6%	16.00	N/A	N/A	Dinas PU
4	Lingkungan Hidup							



No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
4.1	Jumlah kota mendapatkan penghargaan Adipura	Kota	1	3	1	3	3	BLHD
4.2	Jumlah perusahaan penyusun AMDAL	Perusahaan	8	7	10	17	N/A	BLHD
4.3	Tingkat Kualitas udara	Kuantitatif	Baik	Baik	Baik	Baik	N/A	BLHD
4.4	Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan limbah cair	Perusahaan	27	12	10	25	N/A	BLHD
4.5	Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya	%	40	40	35	N/A	N/A	BLHD
4.6	Persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya	%	40	40	35	30	N/A	BLHD
4.7	Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya	%	20	20	15	10	N/A	BLHD
4.8	Jumlah titik/kota diuji polusi kendaraan bermotor	Titik	3	3	2	3	N/A	BLHD
4.9	Pola pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pola Pengelolaan	NA	Control Landfill	Control Landfill	Control Landfill	N/A	BLHD
5	Sosial							
5.1	Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Biro Kesra
5.2	Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK)	buah	1	1	4	7	3	Bakesbangpo
5.3	Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif	buah	14	14	14	14	14	Biro Kesra
5.4	Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan	%	60	60	75	80	100	Biro Kesra
5.5	Persentase peningkatan lembaga pendidikan keagamaan	%	4.7	NA	80	70	85	Biro Kesra
5.6	Persentase sarana peribadatan yang difasilitasi pembangunannya	Buah	4.2	NA	NA	1.00		Biro Kesra
5.7	Frekuensi pertemuan antar umat	Kali	1	1	6	4	2	Biro Kesra



BAB II – Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
	beragama							
5.8	Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti	%	60	60	100	100	100	Biro Kesra
5.9	Menurunnya Remaja keluarga Fakir Miskin Penyandang Masalah Sosial	%	1,5	1,5	2,62	3,33	3,82	Dinas Sosial
5.10	Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam kondisi baik	%	30	8,89	7,5	11,36	11,36	Dinas Sosial
5.11	Indeks kepuasan masyarakat panti	Nilai	95	95	75	76	75 ,77	Dinas Sosial
5.12	Persentase remaja keluarga miskin yang sekolah	%	NA	NA	1,49	2,23	47,34	Dinas Sosial
5.13	Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa	%	NA	NA	3,95	5,11	98,65	Dinas Sosial
5.14	Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti	%	0,56	0,56	0,56	11,36	0,89	Dinas Sosial
5.15	Persentase fakir miskin penyandang cacat yang tertangani	%	3,15	2,78	0,71	76,75	1,20	Dinas Sosial
5.16	Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar	Unit	5	5	5	5	5	Dinas Sosial
5.17	Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti	%	97,93	97,93	75,45	76,75	77,87	Dinas Sosial
5.18	Persentase tertanganinya korban bencana	%	100	100	100	100	100	BPBD
5.19	Persentase meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	%	25	30	40	50	60	BPBD
6	Ketenagakerjaan							
6.1	Persentase kelulusan BLK yang bekerja	%	26,8	29,8	10,00	56,25	47,00	Disnakertrans
6.2	Persentase penduduk yang bekerja	%	49,39	49	96,10	95,97	95,17	Disnakertrans
6.3	Persentase angka pengangguran terbuka	%	5,62	4,32	3,91	6,67	4,38	Disnakertrans
6.4	Persentase peningkatan Partisipasi angkatan kerja	%	70,68	71,24	71,90	72,95	73,21	Disnakertrans



BAB II – Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
7	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
7.1	Mekanisme dan Prosedur dan Standar Kerja Perangkat Daerah	%	32	57	57	57	57	Biro Organisasi
7.2	Persentasi instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP	%	35	47	63,93	64.06	75	Biro Organisasi
7.3	Opini atas laporan keuangan	Nilai	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan
7.4	Hasil evaluasi penerapan SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	BB	Inspektorat
7.5	Persentasi Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi minimal Baik	%	14,9	72,34	71,74	66.76	79.00	Inspektorat
7.6	Prosentase peningkatan pengunjung website	%	96,79	103,2	30,67	42,7	21,5	Biro Humas
7.7	Persentase responden pengguna website yang tingkat kepuasan cukup	%	95	95	89,75	52,41	48,7	Biro Humas
7.8	Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO	%	57	60	10	30	30	Biro Organisasi
7.9	Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat penghargaan Pelayanan PRIMA	%	53	26	9,83	N/A	N/A	Biro Organisasi
7.10	Indeks Kepuasan Masyarakat pada instansi pelayanan publik	Nilai	78	80	78,68	75,38	77,58	Biro Organisasi
7.11	Penganduan masyarakat yang ditangani secara tuntas	Kasus	0	0	1	3	21	Inspektorat
7.12	Persentase kasus IUU yg diselesaikan	%	NA	NA	100	N/A	N/A	Diskanlut
8	Kepemudaan dan Olahraga							
8.1	Bertambahnya Fasilitas Olahraga	Buah	0	0	7	4	4	Disporbudpar
9	Pangan							
9.1	Rasio pertanian pangan berkelanjutan	%	15,63	15,84	1,84	N/A	N/A	Dinas Pertanian dan TPH
	Fokus Urusan Pilihan							
1	Pertanian							



BAB II – Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
1.1	Produksi Padi	Ton	2.025.298	2.056.532	1.990.787	1.229.396	2.140.276	Dinas Pertanian dan TPH
1.2	Produksi Jagung	Ton	110.006	111.476	104.401	117.985	128.505	Dinas Pertanian dan TPH
1.3	Produksi Jeruk	Ton	47.126	47.833	102.106	129.526	112.301	Dinas Pertanian dan TPH
1.4	Produksi Sayuran	Ton	114.600	115.764	47.883	47.916	42.036	Dinas Pertanian dan TPH
1.5	Produksi Karet	Ton	141.797	158.193	169.128	181.785	191.593	Dinas Perkebunan
1.6	Produksi Sawit	Ton	757.808	803.171	894.482	1.220.187	1.276.981	Dinas Perkebunan
2	Peternakan							
2.1	Produksi Daging	Ton/Tahun	55,887	63,417	65,651	76,115	N/A	Dinas Peternakan
3	Kehutanan							
3.1	Jumlah pungutan PSDH dan DR	Rp Milyar	3	3	3,013	2,77	N/A	Dinas Kehutanan
		US \$	600.000	773.455,92	505.695,39	465.497	N/A	Dinas Kehutanan
3.2	Bertambahnya Luasan Tanaman Baru Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	ha	370	564,88	2.972	590	N/A	Dinas Kehutanan
3.3	Jumlah Lahan Kritis Yang Berkurang Karena Rehabilitasi Hutan & Lahan	ha	310	283	1,352	N/A	N/A	Dinas Kehutanan
3.4	Persentase Kasus Gangguan Keamanan Hutan dan Hasil Hutan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	N/A	Dinas Kehutanan
3.5	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalsel Yang Terbentuk Telah	Unit	11	11	11	11	N/A	Dinas Kehutanan



BAB II – Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Sumber Data
	Direalisasikan							
4	Pertambangan							
4.1	Pertambangan	%	6,53	2,64	1,67	N/A	N/A	Distamben
5	Pariwisata							
5.1	Meningkatnya event budaya daerah	%	10	10	28,89	22,5	11,3	Disporbudpar
5.2	Meningkatnya kunjungan wisman	%	103	104	100,44	100,66	100,04	Disporbudpar
5.3	Meningkatnya kunjungan wisnus	%	109,07	103,96	101,53	101,96	100,03	Disporbudpar
5.4	Lama Kunjungan Wisman	Hari	3	3	3	3	3	Disporbudpar
5.5	Lama Kunjungan Wisnus	Hari	2	2	3	3	3	Disporbudpar
5.6	Meningkatnya kunjungan ke Museum	%	108,35	98,23	84,30	86,99	98,62	Disporbudpar
6	Perdagangan							
6.1	Perdagangan (PDRB)	%	6,14	7,74	8,25	8,20	7,91	Disperindag
6.2	Persentase peningkatan realisasi ekspor non migas	%	24,60	19,06	-12,68	-7,53	-25	Disperindag
7	Perindustrian							
7.1	Industri pengolahan (PDRB)	%	2,80	5,08	3,67	3,59	3,50	Disperindag
7.2	Persentase industri berbasis agroindustri	%	3,67	5,98	3,96	4,18	4,60	Disperindag



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada Provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1** Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2011	1.868.594	3.148.042	58,02%
2012	2.476.159	4.340.251	59,39%
2013	2.502.279	4.350.810	60,92%
2014	2.898.704	4.793.164	60,74%
2015	2.684.908	4.746.943	60,04%
Rata-rata	2.456.424	4.092.550	59,82%

Sumber: Biro Keuangan (Data yang diolah)

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rata-rata 59,82 persen. Diharapkan di tahun-tahun mendatang, pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
	PENDAPATAN	3,148,042	4,340,251	4,350,810	4,793,164	4,746,943	8.99%
A	Pendapatan Asli Daerah	1,868,594	2,476,159	2,502,279	2,898,704	2,684,908	7.82%
	Pajak Daerah	1,643,513	2,199,594	2,136,882	2,395,925	2,040,580	3.94%
	Hasil Retribusi Daerah	41,134	9,275	20,534	20,001	29,197	-64.96%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	54	63	916	1,116	50,479	55.95%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	183,892	267,227	343,945	481,661	564,651	24.19%
B	Dana Perimbangan	1,195,565	1,845,462	1,505,123	1,523,714	1,576,111	4.29%
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	653,442	84,308	780,058	767,799	940,976	-142.27%
	Dana Alokasi Umum	504,876	652,535	683,511	701,725	571,244	1.73%
	Dana Alokasi Khusus	37,246	38,848	41,553	54,189	6,389	-178.55%
C.	Lain-Lain Pendapatan Sah	83,883	329,627	343,407	370,745	485,923	27.41%
	Pendapatan Hidah	15,349	18,629	3,618	361	35,402	-300.13%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68,532	310,998	307,227	334,645	45,052	-139.47%
D	PEMBIAYAAN	241,761	824,234	1,010,795	746,044	737,981	13.14%
	Penerimaan Pembiayaan	324,878	975,313	1,203,925	863,395	753,331	7.91%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	271,421	92,407	1,160,217	611,531	621,381	-47.46%
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	-	0	130	100.00%
	Penerimaan Kembali Dana Talangan	5,351	6,544	2,138	17,812	971	-458.56%
	Penerimaan Kembali Investasi Daerah	48,105	44,698	41,569	185	978	-5622.70%
	Pengeluaran Pembiayaan	83,117	151,079	193,129	117,351	1,535	-1885.71%



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
	Pembentukan Dana Cadangan		40	40	50	0	-100.00%
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	726	108	150	5,013	1,535	-168.45%
	Dana Talangan	10,517	3,079	3,129	17,221	-	-100.00%

Sumber: Biro Keuangan (Data yang diolah), 2016.

Dari tabel di atas, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 8,99 persen.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015 mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tersebut. Perkembangan Neraca ini terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2011 sampai 2015. Total aset dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami kenaikan dari semula Rp 8.649.363,991.750,91 menjadi Rp 10.116.946.800.000 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Secara rinci pertumbuhan neraca Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3. 3 Rata – rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2014 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	8,594,229.80	9,840,615.80	10,280,018.50	10,728,332.20	10,116,946.80	3.8%
1.1.	ASET LANCAR	1,086,704.00	1,448,360.20	960,762.00	862,193.80	728,260.50	-13.9%
1.1.1	Kas di Kas Daerah				297,698.67	517,458.16	42.5%
1.1.2	Piutang Pajak daerah				335,760.46	162,715.32	-106.3%
1.1.3	Persediaan				27,481.18	26,819.93	-2.5%
1.2.	ASET TETAP	6,302,395.70	6,822,531.40	8,189,667.10	8,756,466.10	8,367,991.30	6.5%
1.2.1	Tanah				355,657.87	2,407,738.85	85.2%
1.2.2	Peralatan dan mesin				954,219.26	765,808.65	-24.6%
1.2.3	Gedung dan bangunan				2,749,102.21	2,235,160.66	-23.0%
1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan				3,345,102.48	2,834,037.04	-18.0%
1.2.5	Aset tetap lainnya				29,940.76	34,352.99	12.8%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan				346,446.73	479,367.98	27.7%
1.3.	ASET LAINNYA	669,585.30	902,465.70	270,027.10	109,289.70	161,815.70	-80.8%



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.1	Aset tak berwujud				7,595.20	6,693.88	-13.5%
1.3.2	Aset Lain lain				100,741.87	157,915.65	36.2%
1.4	Investasi Jangka Panjang				859,310.03	858,879.23	-0.1%
1.5	Dana Cadangan				141,072.54		
2	KEWAJIBAN	544,084.40	333,267.60	328,313.10	372,454.10	319,982.70	-17.3%
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek				372,454.06	319,982.72	-16.4%
3	EKUITAS DANA	8,050,145.30	9,507,348.10	9,951,705.40	10,355,878.20	9,796,964.10	4.5%
3.1.	Ekuitas Dana Lancar				489,739.75	0	-100.0%
3.2.	Ekuitas Dana Investasi				9,725,065.96	0	-100.0%
3.3.	Ekuitas Dana Cadangan				141,072.54		
4	Total Hutang Dan ekuitas Dana	8,594,229.80	9,840,615.80	10,280,018.50	10,728,332.20	10,116,946.80	3.8%

Sumber: Biro Keuangan

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Setiap Perangkat Daerah dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah tersebut bertanggungjawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah, yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2011-2015 telah disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Biro Keuangan yang mengemban fungsi sebagai Perangkat Daerah.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Provinsi Kalimantan Selatan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3. 4** Opini BPK terhadap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Tahun	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Biro Keuangan

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Belanja Tidak langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)	Proporsi BTL thd Total APBD(%)	Proporsi BL thd Total APBD(%)
1	2011	1,195,209.61	1,270,524.10	2,465,733.71	48%	52%
2	2012	2,284,975.68	1,719,292.64	4,004,268.32	57%	43%
3	2013	2,056,784.52	2,693,290.02	4,750,074.54	43%	57%
4	2014	2,242,236.09	2,675,591.54	4,917,827.63	46%	54%
5	2015	2,434,410.88	2,668,454.37	5,102,865.25	48%	52%

Sumber: Biro Keuangan (Data yang diolah), 2016.

Tabel 3. 6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2013	792.981.872.714,00	5.587.377.607.616,00	14%
2	2014	876.704.975.175,00	5.651.126.086.064,00	16%
3	2015	868.580.594.469,00	5.658.801.507.930,00	15%

Sumber: Biro Keuangan (Data yang diolah), 2016.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Provinsi Kalimantan Selatan dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA yang digunakan untuk



membayai belanja Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7 Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.350.810.456.952,25	4.793.164.631.015,94	4.746.943.175.618,91
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	4.750.074.546.751,98	4.917.827.639.756,94	5.102.865.250.356,48
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	193.129.500.000,00	117.351.000.000,00	15.350.000.000,00
	Defisit riil	399.264.089.799,73	124.663.008.741,00	355.922.074.737,57

Sumber: Biro Keuangan (Data yang diolah), 2016.

Tabel 3. 8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	628.642.058.068,86	657.853.706.716,34	699.113.394.588,95
2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	50.000.000.000,00	130.000.000.000,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	916.251.539,00	1.116.057.956,66	50.479.363.967,19
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.203.925.399.363,41	863.395.087.670,66	753.331.195.295,66
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.138.220.222,00	17.812.727.270,00	971.800.788,00
6	Penerimaan Piutang Daerah			

Sumber: Biro Keuangan (Data yang diolah), 2016.

Tabel 3. 9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Uraian	2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	611.531.809.563,58	100,00	621.381.078.929,66	100,00	382.059.120.558,09	100,00
2	Pelampauan penerimaan PAD	148.393.699.162,75	94,40	22.911.001.479,94	100,80	249.262.396.119,09	91,50
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	132.008.338.103,00	109,61	7.600.860.289,00	99,50	101.448.067.450,00	106,88
4	Pelampauan penerimaan	7.701.265.988,00	97,81	8.359.805.325,00	102,31	3.337.075.288,00	100,69



No.	Uraian	2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	lain-lain pendapatan daerah yang sah						
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0,06	100,00	0,32	100,00	0,34	100,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

3.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2016-2021 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/ atau gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kalimantan selatan

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
A	Belanja Tidak Langsung	2,535,891,623,238.00	2,647,254,598,000.00	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	415,555,104,325.00	406,292,477,920.00	-2.3%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	10,701,600,000.00	10,909,022,940.00	1.9%
3	Belanja Bunga	10,000,000,000.00		
4	Belanja Bagi Hasil	775,400,000,000.00	859,701,464,000.00	9.8%
B	Belanja Langsung	2,975,104,462,826.00	3,068,563,124,484.00	3.0%



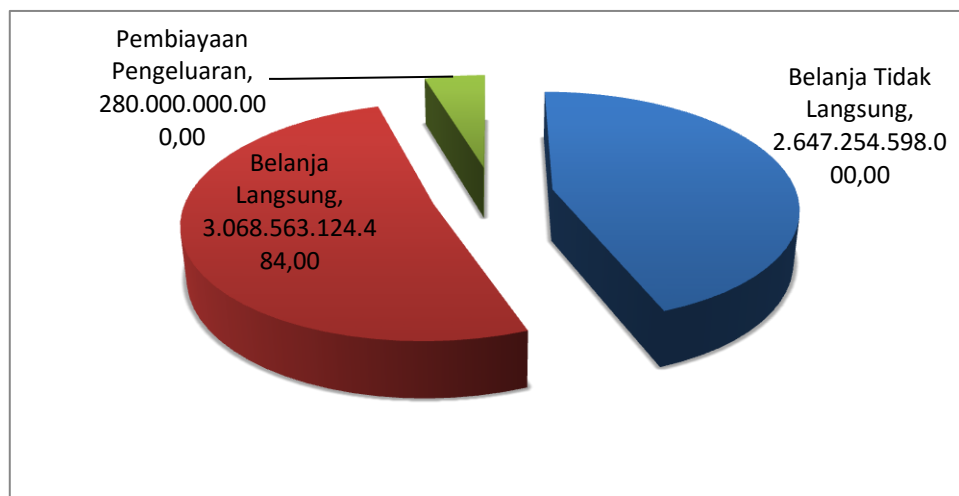
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis,			
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	14,343,200,000.00	8,369,250,000.00	-71.4%
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	189,779,835,374.00	276,652,747,695.00	31.4%
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	9,192,560,500.00	7,221,661,450.00	-27.3%
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1,739,626,000.00	414,290,000.00	-319.9%
C	Pembiayaan Pengeluaran	140,130,000,000.00	28,000,000,000.00	-400.5%
	TOTAL (A+B+C)	5,651,126,086,064.00	5,743,817,722,484.00	1.6%

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Proyeksi Data Masa Lalu dapat dilihat Pada Gambar Berikut:

Tabel 3. 11 Proyeksi Data Masa Lalu

2014(Rp)	2015(Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
5,651,126,086,064.00	5,995,817,722,484.00	5.7%





Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2021 diarahkan pada hal-hal berikut.

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Kalimantan Selatan.
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;



- h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

3.33 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan rumusan total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 3. 12** Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
1	Pendapatan	5,034,045.75	5,174,241.21	5,041,373.56	5,044,545.63	5,046,803.81	5,051,056.50
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran /Penerimaan Pembiayaan	200,000.00	190,000.00	195,000.00	190,000.00	190,000.00	195,000.00
	Total penerimaan	5,234,045.75	5,364,241.21	5,236,373.56	5,234,545.63	5,236,803.81	5,246,056.50
	Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2,507,532.80	2,463,607.65	2,476,590.67	2,469,535.88	2,466,567.20	2,458,850.74
	Belanja Langsung	2,726,512.95	2,900,633.56	2,759,782.89	2,765,009.75	2,770,236.61	2,787,205.76
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4,405,944.08	4,505,630.50	4,370,479.49	4,349,085.05	4,330,422.42	4,317,088.92

**Tabel 3. 13** Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Proyeksi					
		2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)	2018 (Rp.juta)	2019 (Rp.juta)	2020 (Rp.juta)	2021 (Rp.juta)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4,405,944.08	4,505,630.50	4,370,479.49	4,349,085.05	4,330,422.42	4,317,088.92
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	2,726,512.95	2,900,633.56	2,759,782.89	2,765,009.75	2,770,236.61	2,787,205.76
		20%	20%	20%	20%	20%	20%
1	Kalsel Cerdas	1,046,809.15	1,072,848.24	1,047,274.71	1,046,909.13	1,047,360.76	1,049,211.30
		15%	15%	15%	15%	15%	15%
2	Kalsel Sehat	785,205.38	964,142.48	869,452.03	875,338.78	879,750.43	893,379.36
		1%	1%	1%	1%	1%	1%
3	Kalsel Terampil	62,808.55	64,370.89	62,836.48	62,814.55	62,841.65	62,952.68
		0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
4	Kalsel Beriman	26,170.23	26,821.21	26,181.87	26,172.73	26,184.02	26,230.28
		3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%
5	Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik	193,659.69	198,476.92	193,745.82	193,678.19	193,761.74	194,104.09
		1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
6	Kalsel Berbudaya	73,277	75,099	73,309	73,284	73,315	73,445
		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
7	Kalsel Aman	52,340	53,642	52,364	52,345	52,368	52,461
		0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%
8	Kalsel Menuju Tuan Rumah PON	36,638	37,550	36,655	36,642	36,658	36,722
		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
9	Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas	104,681	107,285	104,727	104,691	104,736	104,921
		2.99%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
10	Kalsel Sentra Pangan	156,498	107,285	104,727	104,691	104,736	104,921
		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
11	Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional	52,340	53,642	52,364	52,345	52,368	52,461
		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
12	Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, Dan Jasa	52,340	53,642	52,364	52,345	52,368	52,461
		1.60%	1.60%	1.60%	1.60%	1.60%	1.60%
13	Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas	83,745	85,828	83,782	83,753	83,789	83,937



No	Uraian	Proyeksi					
		2016 (Rp.juta)	2017 (Rp.juta)	2018 (Rp.juta)	2019 (Rp.juta)	2020 (Rp.juta)	2021 (Rp.juta)
II.b	Pembentukan dana cadangan						
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama /Rutin	357,038	375,829	394,620	414,351	435,069	456,822
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama						
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	2,369,475.40	2,524,804.56	2,365,162.44	2,350,658.28	2,335,167.56	2,330,383.26
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	2,507,532.80	2,463,607.65	2,476,590.67	2,469,535.88	2,466,567.20	2,458,850.74
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama /BTL Prioritas	471,064.12	482,781.71	471,273.62	471,109.11	471,312.34	472,145.09
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	2,036,468.68	1,980,825.94	2,005,317.05	1,998,426.77	1,995,254.86	1,986,705.66
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	-	-	-	-	-	-



BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik melalui optimalisasi berbagai pilihan kebijakan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, kualitas analisis permasalahan pembangunan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu poin penting. Terkait dengan hal tersebut, analisis permasalahan pembangunan dapat memberikan petunjuk bagi pemerintah dalam menemukan permasalahan utama yang dihadapi sehingga berbagai program pembangunan yang dirumuskan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Permasalahan pembangunan yang dapat dikaji dan dianalisa dengan baik akan menjadi modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memprediksi berbagai peluang ataupun prediksi ancaman/gangguan/hambatan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal baik skala regional, nasional, maupun internasional.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “kesenjangan” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi yang ada pada saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan adalah sebagai berikut.

- 1. Sumber daya manusia yang belum berdaya saing.**
 - a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia



- b. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
- c. Rata-Rata Lama Sekolah belum merata
- d. Angka Partisipasi Sekolah masih rendah
- e. Angka Harapan Hidup paling rendah se-Regional Kalimantan
- f. Rendahnya daya saing tenaga kerja

2. Belum kuatnya struktur perekonomian daerah.

- a. Belum meratanya penanaman modal di setiap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Realisasi ekspor didominasi produk pertambangan
- c. Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah
- d. Laju Inflasi yang fluktuatif
- e. Pengeluaran konsumsi masyarakat cukup rendah
- f. Tingkat produktivitas dan pengelolaan hasil belum optimal

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal.

- a. Meningkatnya potensi banjir di beberapa wilayah
- b. Menurunnya kualitas air
- c. Meningkatnya kabut asap

4. Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan berkualitas antar wilayah

5. Budaya masyarakat yang belum mencerminkan revolusi mental

- a. Rendahnya upaya mempertahankan karakteristik budaya lokal

6. Belum efektifnya reformasi birokrasi pemerintah daerah.

- a. Belum terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal
- b. Belum terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal
- c. Belum terwujudnya optimalisasi prosedur pengawasan terhadap penyimpangan administrasi
- d. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Negara yang perlu ditingkatkan



4.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan dengan memperhatikan beberapa Isu strategis internasional, nasional dan regional, maka isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdiri atas:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan, yang diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 65,2 (2010) menjadi 67,63 (2014) dengan kategori sedang (dari 4 kategori IPM, yaitu Sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah). Angka IPM Kalimantan Selatan dimaksud berada di bawah angka IPM nasional yang telah mencapai 68,9 (2014).

Kondisi IPM Kalimantan Selatan masih relatif jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Selain berada di bawah angka Nasional, jika dilihat dari posisinya maka provinsi ini juga berada diposisi 25 secara nasional. Secara regional posisinya juga berada di bawah provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

Tertinggalnya angka IPM tersebut terutama disebabkan oleh indikator Angka Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Selatan yang pada Tahun 2014 posisinya masih jauh berada di bawah secara nasional, yaitu sebesar 67,47 tahun dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang sudah mencapai 70,59 tahun. disamping angka Angka Rata-rata Lama Sekolah yang juga masih perlu ditingkatkan, karena sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan SD atau sederajat mencapai 33,42 % dan bahkan yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD mencapai 19,01 %.

Kondisi pencapaian indikator kesehatan dan pendidikan tersebut, antara lain disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat yang relatif kurang mendukung terhadap akselerasi pencapaian IPM Kalimantan Selatan. Pada sisi lain sejalan dengan berjalannya MEA, maka tingkat keterampilan penduduk usia kerja, juga harus mendapatkan perhatian khusus kedepannya, masyarakat kalsel dapat bersaing secara nasional dan ASEAN.

2. Daya Saing Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2011 berada di posisi 8 secara nasional dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,97 %,



di atas angka nasional yang hanya mencapai 6,49 %. Namun dengan terjadinya krisis perekonomian global, yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalsel dimana perlambatan ini terjadi sejak tahun 2012 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015 yang kemudian hanya tumbuh sebesar 3,84 % atau berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,79 %, dengan posisi menurun menjadi ke 27 secara nasional.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh merosotnya harga komoditas ekspor Kalsel, yang didominasi komoditas sektor pertambangan dan perkebunan, sedangkan sektor pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kalsel. Isu peningkatan pertumbuhan perekonomian, seiring dengan perlunya transformasi perubahan struktur perekonomian daerah kedepannya juga menjadi isu penting dalam sektor perekonomian. Selain kondisi perlambatan perekonomian ini, memerlukan perhatian yang serius kedepannya, untuk dapat tumbuh lebih baik lagi, perlu perhatian juga terhadap indikator kemiskinan dan pengangguran, karena kondisi yang ada sekarang telah mulai berdampak terhadap adanya peningkatan angka kemiskinan dan angka pengangguran pada tahun 2015.

3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan

Kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Selatan memerlukan perhatian yang serius, jika dilihat dari indikator angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di posisi 22 secara nasional (walaupun posisi ini telah mengalami perbaikan dari sebelumnya di posisi 24). Indeks ini diukur dari: (a) Tutupan Lahan yang sebelumnya hanya mencapai 39,24 menjadi 41,62; (b) Kualitas Air dari 8,70 menjadi 26,69; (c) Kualitas Udara dari 97,11 menjadi 98,46. Tutupan lahan yang disebabkan oleh pembukaan lahan dari sektor pertambangan, kualitas air disebabkan oleh meningkatnya pencemaran oleh limbah domestik dan akibat aktifitas perekonomian lainnya, sedangkan kualitas udara terutama disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Dasar

Perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat yang telah berkembang pesat, belum sejalan dengan tingkat percepatan pelayanan infrastruktur perekonomian dan dasar yang tersedia. Untuk itu perlu segera peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur perekonomian seperti ketersediaan Energi Listrik dan tingkat pelayanan perhubungan. Ketersediaan



energi listrik jauh berada di bawah dari tingkat kebutuhan untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang ada, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kedepannya, sedangkan perhubungan udara (kondisi kepadatan dan pelayanan bandara), perhubungan darat (tingkat kepadatan lalu lintas yang sudah menurunkan waktu tempuh) dan perhubungan laut (belum mempunyai pelabuhan laut yang representative, yang dapat menghubungkan provinsi ini dengan kapal-kapal besar).

Untuk pelayanan Infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, listrik perdesaan yang memerlukan perhatian serius agar pemerataan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Selain itu pelayanan infrastruktur ini belum merata antar daerah, sehingga isu pemerataan pelayanan infrastruktur juga penting, selain peningkatan pelayanan terhadap daerah yang sudah terlayani.

5. Kinerja Pemerintahan Daerah

Kondisi kinerja pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Selatan, secara umum sudah relatif baik, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti: Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai WTP dalam beberapa tahun terakhir ini, Indikator Kinerja Akuntabilitas (LAKIP) telah mencapai nilai B++ dari sebelumnya pada nilai C. Indikator Kinerja Ketepatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (APBD), selalu Tepat Waktu, Indikator Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah terus mengalami peningkatan Kemandirian dimaksud dapat dilihat dari rasio PAD terhadap Dana Perimbangan yang terus meningkat yaitu pada tahun 2010 dari 54,08 % (PAD) : 44,89 % (Dana Perimbangan) menjadi 63,36 % (PAD) : 29,12 % (Dana Perimbangan) pada tahun 2015.

Namun demikian dengan adanya perlambatan perekonomian Kalimantan Selatan telah berdampak terhadap penurunan Pendapatan Daerah, untuk itu isu tentang peningkatan kapasitas fiskal merupakan salah satu pekerjaan penting bagi pemerintah provinsi, agar pembangunan daerah tetap dapat berlanjut sebagaimana yang diharapkan. Secara umum pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, kedepannya perlu lebih meningkatkan kinerjanya lagi, agar pemerintah provinsi ini lebih akuntabel, transparan dan profesional, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang merupakan kristalisasi, komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agroindustri” dengan misi:

1. **Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM**, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
2. **Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan**, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. **Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan**, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
4. **Mendorong pengelolaan SDA secara efisien**, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. **Menciptakan taat asas dan tertib hukum**, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.

Penyusunan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu: **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**, yang ditempuh dengan sebanyak 7 misi yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya



maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis,



peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1 Visi Pembangunan

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”**.

Visi tersebut bisa digambarkan dalam diagram di bawah ini untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2021. Didalam visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (blue development) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (biodiversity), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa-jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (*blue economy*) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) yang dikenal dengan *the living triangle*.

Gambar 5. 1 Keterkaitan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan
(*Sustainable Development*)



Didalam Ekonomi Biru (*blue economy*) mengandung beberapa prinsip antara lain: (1) Pemerataan distribusi kesejahteraan yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin dan mencapai keadilan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan; (2) Ekuitas dan keadilan ekonomi; (3) Ekuitas antar generasi; (4) Pendekatan pencegahan yaitu melalui identifikasi resiko terhadap lingkungan, dampak lingkungan dan mencegah degradasi lingkungan; (5) Hak untuk berkembang untuk semua komponen; (6) Adanya kerjasama internasional; (7) Informasi, partisipasi dan akuntabilitas; (8) Adanya Konsumsi dan produksi berkelanjutan; (9) Strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan; (10) Mendefinisikan kembali kesejahteraan; (11) Kesetaraan gender; (12). Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan.

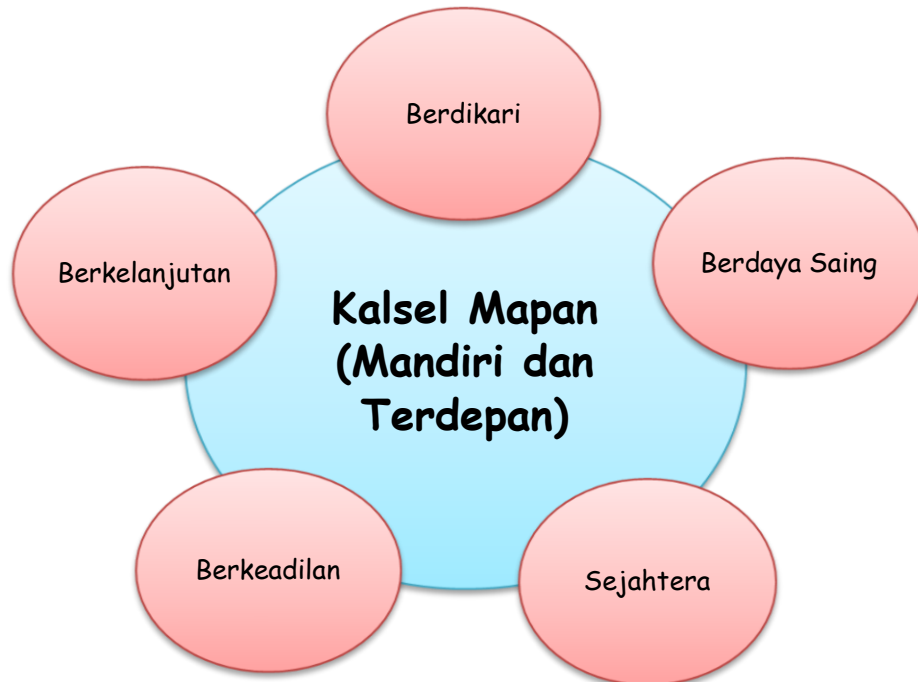
4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 - a. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai



di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

- b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- c. Ketahanan pangan adalah suatu upaya meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan, dan mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

Beberapa prinsip pembangunan yang memperhatikan aspek kesejahteraan, berdaya saing, berdikari, berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan aktualisasi dari visi Kalimantan Selatan MAPAN (Mandiri dan Terdepan) dapat digambarkan sebagai berikut :



Visi “**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing**” tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti



(baik, tidak goyah, stabil). Kondisi Pembangunan yang mapan di suatu daerah/wilayah, adalah Pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. dengan demikian pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya tampung dan daya dukung. Dengan demikian definisi di atas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan keadilan, sedangkan aspek-aspek keamanan tersebut dapat dilihat dari segi: Keamanan Ekonomi, keamanan Ekologi, Keamanan Sosial, Keamanan Budaya, Keamanan Pertanian, Keamanan dalam berpolitik, Keamanan dalam kehidupan beragama, dan sebagainya. Diharapkan Kemandirian dan keterdepanan dimaksud, akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Mapan yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu MANDIRI dan TERDEPAN, yang mengandung pengertian:

1. **MANDIRI:** Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi dan sosial, yang dapat dilihat a.l.: Kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan, Kemandirian dari segi ketahanan pangan, Kemandirian dari segi ketahanan energi.
2. **TERDEPAN,** Kata terdepan mempunyai arti paling muka, paling depan, terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan semangat bagaimana Kalsel yang selama ini di anomimkan dengan kata (kalah selalu), untuk bangkit menjadi salah satu provinsi termaju di regional Kalimantan, bahkan juga tentunya di harapkan secara nasional. Untuk ini diperlukan adanya semangat dan kerja yang luar biasa, dari seluruh komponen aparat pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk secara bersama-sama mendukung. Terdepan dapat diartikan dan dilihat dengan tingkat pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang dapat diraih minimal mendekati rata-rata nasional, dan bahkan diharapkan kedepannya bisa berada di atas rata-rata nasional.

Selanjutnya untuk mendukung Kalimantan Selatan yang Mapan (Mandiri dan Terdepan) dimaksud, terdapat lima elemen utama pembangunan yaitu aspek



berdikari, aspek berdaya saing, aspek sejahtera, aspek berkeadilan, dan aspek berkelanjutan. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Berdikari

Berdikari merupakan kemampuan daerah untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan pangan, energi, air bersih, serta pendidikan, kesehatan. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat dengan alat ukur Mandiri Pengangguran (TPT), kemiskinan (jumlah dan tingkat kemiskinan) dan pemerataan pembangunan (Gini Rasio).

2. Berdaya Saing

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Provinsi Kalimantan Selatan pada periode ketiga RPJPD ingin mengembangkan tentang agrobisnis, hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung padi Nasional. Agrobisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Agrobisnis terbagi dalam dua bidang yaitu peternakan dan budidaya. Di bidang peternakan misalnya, terdapat hewan-hewan yang bisa diambil manfaatnya, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, bebek dan lain-lain. Sementara pada bidang budidaya, banyak jenis tanaman pangan yang dapat dibudidayakan, seperti durian, jeruk, rambutan, pepaya, dan lain-lain. Upaya pengembangan usaha pertanian dan turunannya berorientasi pada peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan kualitas SDM masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang diukur dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan dan non pangan.



3. Berkeadilan

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dikarenakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan masih terpusat di kota Banjarmasin, maka pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan belum dapat dikatakan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Povinsi Kalimantan Selatan. untuk itu wilayah lainnya juga perlu dikembangan eselanjutnya walaupun sektor pertanian mendominasi roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sektor lainnya tetap juga dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja dan berperan serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ditunjang dengan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di semua bidang pembangunan

4. Sejahtera

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Indikator tersebut adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat Inflasi terutama untuk kelompok makanan, gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial.

5. Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Hal tersebut diatas terkandung dua gagasan penting yaitu gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin yang harus diberi prioritas utama dan gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan.



5.2 Misi Pembangunan

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya , maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;**
- 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;**
- 3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;**
- 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;**
- 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia unggul, sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia agamis.



2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi.

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas wilayah, kiranya perlu mengembangkan kebudayaan wilayah sehingga menjadi destinasi yang menarik. Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif.

Kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Dalam hal keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi.



4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya perlu mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan membangun infrastruktur wilayah yang merata dan berkeadilan.

5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan tiga kriteria, yakni kualitas air, kualitas udara, dan luas tutupan hutan.



5.3 Prioritas Pembangunan Kalimantan Selatan

Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu :

1. Kasesel Cerdas
2. Kasesel Sehat
3. Kasesel Terampil
4. Kasesel Beriman
5. Kasesel Dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kasesel Berbudaya
7. Kasesel Aman
8. Kasesel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kasesel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
10. Kasesel Sentra Pangan
11. Kasesel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kasesel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
13. Kasesel Menuju Lingkungan Berkualitas

5.4 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap



sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing misi dan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil dilaksanakan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kassel Cerdas, Prioritas Kassel Sehat, Prioritas Kassel Terampil dan Prioritas Kassel Beriman.

Tujuan pada Misi ini :

a. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja,
- 4) Meningkatnya pemahaman keagamaan
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik dilaksanakan 1 (satu)



prioritas Utama yaitu: Prioritas Kassel dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik.

Tujuan Misi ini : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna mewujudkan sistem pelayanan pemerintahan yang akuntabel, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya Kualitas Layanan publik
- 2) Meningkatnya pendanaan daerah
- 3) Meningkatnya kinerja pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal

Untuk mencapai Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal dilaksanakan 3 (tiga) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kassel Berbudaya, Prioritas Kassel Aman, dan Prioritas Kassel Menuju Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).

Tujuan Misi :

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Daerah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi daerah atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga



kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Sasaran :

- 1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat
- 3) Terselenggaranya PON

b. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal

Budaya adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal atau informal, yang berfungsi untuk mempertahankan diri (perlindungan), memperoleh kepuasan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, mengelola/memanfaatkan LH, sebagai media adaptasi terhadap lingkungan alam, berisi etika sebagai penuntun prilaku dan mengembangkan daya cipta. Dengan demikian hakekat kebudayaan adalah perwujudan dan penyaluran kepribadian manusia, yang sejak dahulu lahir dari suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, untuk itu diperlukan upaya perbaikan tingkah laku, melalui aturan-aturan yang bersikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan –tindakan yang diijinkan

Kearifan budaya lokal harus dilestarikan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi kearifan budaya lokal yang dikaji secara multi disiplin dan transdisiplin dapat dikembangkan dan diterapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sasaran :

- 1) Meningkatkan ketahanan budaya
- 2) Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
- 3) Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
- 4) Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat



4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kassel dengan infrastruktur yang berkualitas.

Tujuan pada Misi ini: **Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang.**

Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pemerataan. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan hanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut tidak lepas dari peran infrastruktur sebagai katalisator baik percepatan pembangunan perekonomian maupun pembangunan sosial yang bersifat pemerataan keseluruhan wilayah. Dengan keberadaan pembangunan infrastruktur diharapkan mendukung secara fisik terhadap pembangunan sektor lainnya.

Lebih lanjut, guna mewujudkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang harus tersedia disetiap individu masyarakat, seperti ketersediaan air minum, ketersediaan prasarana sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat, dan ketersediaan telekomunikasi.

2) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian

Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian seperti ketersediaan sarana prasarana konektivitas antar wilayah, ketersediaan tampungan air dan ketersediaan pembangkit listrik yang memadai.



5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang dilaksanakan dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Sentra Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Salah satu Destinasi Wisata Nasional, Prioritas Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, dan Prioritas Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas.

Tujuan Misi ini:

a. Meningkatkan daya saing Perekonomian

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global. Masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasas “win-win solution”.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya Mandiri Pangan
- 2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian
- 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
- 4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
- 5) Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian

b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Komponen-



komponen di dalam lingkungan hidup yang membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Suatu ekosistem akan menjamin keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme. Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri maka sasaran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5. 1 Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR
			2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil									
Prioritas : Kalsel Cerdas, Kalsel Sehat, Kalsel Terampil dan Kalsel Agamis.									
Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	SD/MI/Paket A	108,81	108,12	108,03	197,98	107,95	107,93	107,92
		SMP/MTs/Paket B	79,52	79,70	79,73	79,74	79,75	79,75	79,75
		SMU/MA/SMK/Paket C	62,14	64,32	65,06	65,42	65,85	66,25	66,63
		SD/MI/Paket A	96,74	97,224	97,335	97,439	97,540	97,643	97,744
		SMP/MTs/Paket B	69,57	74,268	75,886	77,516	79,153	80,796	82,442
		SMU/MA/SMK/Paket C	50,05	57,491	60,032	62,589	65,155	67,728	70,306
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu/1.000 KH	188 (2013)	170	150	135	120	108	90
		Angka Kematian Bayi/100.000 KH	43 (2013)	40	37	33	30	27	24
		AKABA	35 (2013)	30	27	25	20	17	15
		Balita Gizi Buruk	8,20	7,60	7,40	7,29	6,00	5,29	5,00
		Balita Gizi Kurang	19,20	18,77	18,50	18,25	18,00	17,25	16,00
	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	69,31 (2013)	69,72	69,91	70,07	70,22	70,34	70,46
	Meningkatnya Pemahaman Keagamaan	Persentasi Lulusan SMA/MA yang beragama islam khatam Al-Quran	0	10	20	30	40	50	70
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian	42,24	44,00	44,25	44,50	44,75	5,00	4,75
Unneed Need		10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	5	
Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik									
Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik									
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,38	76	78,13	79,5	80,88	82,25	83,63
	Meningkatnya Pendanaan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)	53,24	56,32	58,37	58,33	58,31	58,28	58,95
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka	0%	20%	40%	60%	80%	90%	100%



Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR
			2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Menengah							
	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		LAKIP	BB 76,3	BB 78,52	BB 78,66	A 80,26	A 80,55	A 80,56	A 81,01
Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal									
Prioritas : Kalsel Berbudaya, Kalsel Menuju PON, Kalsel Aman									
Meningkatkan kesejahteraan Sosial masyarakat	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Angka PMKS	194,623	0,39% 193,864	0,39% 193,108	0,39% 192,395	0,39% 192,395	0,39% 190,898	0,39% 190,154
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat	Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
	Terselenggaranya PON	Terbangunnya <i>sport center</i>	5%	25%	45%	60%	80%	90%	100%
Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreativitas, dan Kepedulian	Perubahan perilaku menuju positif	0	0	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
	Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketahanan budaya Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat 	Persentase peningkatan kualitas seni dan budaya	10%	13%	16%	19%	22%	25%	28%
Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya									
Prioritas : Kalsel Kalsel Dengan Infrastruktur yang Berkualitas									
Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	31,16	42,63	54,11	65,58	77,05	88,53	100
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis	44,4	55,63	66,87	78,10	89,33	93,41	97,50



Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR
			2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang.									
Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan									
Prioritas : Kalsel Sentra Pangan, Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa, Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas.									
Meningkatkan daya saing Perekonomian	Terwujudnya Mandiri Pangan	Produksi :							
		- Beras	1.249.716	1.287.208	1.325.824	1.365.599	1.406.567	1.448.764	1.576.839
		- Daging	66.772	68.144	71.551	75.129	78.885	82.829	85.738
		- Ikan	364.395	383.000	389.000	395.000	401.000	408.000	418.000
	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian	LPE Pertanian**	3,7*	4	4	4	4	4	4
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	LPE Industri**	3,6*	4	4	4	4	4	4,5
LPE Perdagangan**		8,2*	8	8	8	8	8	8	
LPE Jasa**		6,9*	10	10	10	10	10	10	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	6,5*	6,7	6,8	7,0	7,2	7,4	7,5	
Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	5.4	7,1	8,1	9,2	10,5	12	12	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	43,66	44	44,5	45	45,5	46	46
		Indeks Kualitas Udara	81,87	83	85	87	88	89	89
		Indeks Kualitas Air	46,16	58	58,5	59	59,5	60	60
		Luas Genangan Banjir (ha)	23.986	22.787	21.587	20.388	19.189	17.990	16.790



5.5 Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan

Pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk Perangkat Daerah) dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021 untuk indikator daerah adalah sebagai berikut.

a. Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota

Target peningkatan IPM Kabupaten/Kota dalam lima tahun mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Trend kenaikan nilai IPM menurut komponen pembentuk IPM tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 2 Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021

Kabupaten/ Kota	Kondisi Awal	Proyeksi IPM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	67,06	67,62	68,18	68,75	69,31	69,87	70,43
2. Kotabaru	66,28	66,80	67,32	67,85	68,37	68,89	69,41
3. Banjar	66,23	66,75	67,27	67,80	68,32	68,84	69,36
4. Barito Kuala	63,17	63,78	64,39	65,01	65,62	66,23	66,84
5. Tapin	67,67	68,35	69,03	69,72	70,40	71,08	71,76
6. Hulu Sungai Selatan	66,08	66,91	67,74	68,58	69,41	70,24	71,07
7. Hulu Sungai Tengah	66,28	67,19	68,10	69,02	69,93	70,84	71,75
8. Hulu Sungai Utara	62,04	62,76	63,48	64,21	64,93	65,65	66,37
9. Tabalong	68,81	69,26	69,71	70,17	70,62	71,07	71,52
10. Tanah Bumbu	67,54	68,14	68,74	69,35	69,95	70,55	71,15
11. Balangan	65,02	65,60	66,18	66,77	67,35	67,93	68,51
12. Banjarmasin	75,46	75,98	76,50	77,03	77,55	78,07	78,59
13. Banjarbaru	77,71	78,11	78,52	78,93	79,33	79,74	80,14
Kalimantan Selatan	67,63	68,88	69,50	70,13	70,75	71,38	71,0-71,8

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya adalah Banjarbaru,



Banjarmasin dan Tabalong. Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki besaran IPM 77,71 untuk Banjarbaru, 75,46 untuk Banjarmasin dan 68,81 untuk Tabalong. Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki target peningkatan IPM pada tahun 2021 sebesar 79,74 (Banjarbaru), 78,07 (Banjarmasin) dan 71,07 (Tabalong). Sedangkan, untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki IPM paling rendah adalah Hulu Sungai Utara dengan IPM sebesar 62,04 yang memiliki target IPM pada tahun 2021 sebesar 65,65.

b. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dalam lima tahun mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021;
- (2) Distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota; dan
- (3) Kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2010-2015.

Tabel 5. 3 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Realisasi		Esti- masi 2015	Perkiraan					
	2013	2014		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	5,50	3,10	5,53	5,57	5,62	5,63	5,68	5,72	5,77
2. Kota Baru	5,20	4,30	5,24	5,28	5,33	5,33	5,38	5,43	5,48
3. Banjar	4,60	5,10	5,12	5,16	5,21	5,21	5,26	5,31	5,36
4. Barito Kuala	4,10	4,50	4,50	4,54	4,59	4,59	4,64	4,69	4,74
5. Tapin	5,70	5,50	5,52	5,56	5,61	5,61	5,66	5,71	5,76
6. Hulu Sungai Selatan	5,70	5,80	5,84	5,88	5,93	5,93	5,98	6,03	6,08
7. Hulu Sungai Tengah	5,90	5,60	5,61	5,65	5,70	5,70	5,75	5,80	5,85
8. Hulu Sungai Utara	5,30	6,00	6,04	6,08	6,13	6,13	6,18	6,23	6,28
9. Tabalong	4,40	4,00	4,40	4,44	4,49	4,49	4,54	4,59	4,64
10. Tanah Bumbu	3,80	3,60	3,67	3,71	3,76	3,76	3,81	3,86	3,91
11. Balangan	8,20	6,20	6,27	6,31	6,36	6,36	6,41	6,46	6,51
12. Kota Banjarmasin	7,20	6,20	6,29	6,33	6,38	6,38	6,43	6,48	6,52
13. Kota Banjar Baru	6,60	6,60	6,69	6,73	6,78	6,78	6,83	6,88	6,92
Kalimantan Selatan	5,36	4,85	3,84	3,28 -	3,53 -	3,78 -	4,03 -	4,28 -	4,50 -
				3,78	4,03	4,28	4,53	4,78	5,03

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten diatas Kalimantan diproyeksikan tumbuh dengan target akhir di Tahun 2021 sebesar 4.50%-5.03%. Distribusi pertumbuhan tertinggi berada di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Sedangkan proyeksi pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu karena kedua daerah ini struktur ekonomi yang bertumpu pada



pertambangan akan dilakukan shifting struktur dan kondisi pertambangan yang lesu.

c. Target Peningkatan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

Target Peningkatan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota 2016-2021 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021;
- (2) Distribusi tenaga kerja menurut Kabupaten/Kota tidak berubah; dan
- (3) Pertumbuhan angkatan kerja baru menurut kabupaten/kota tahun 2010-2015.

Dengan terbukanya kesempatan kerja diharapkan akan menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Berikut merupakan proyeksi angka pengangguran di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Tabel 5. 4 Target Pengangguran Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Realisasi		Esti- masi 2015	Perkiraan					
	2013	2014		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	3,12	2,93	3,96	4,09	4,06	4,03	3,99	3,94	3,88
2. Kota Baru	4,60	3,94	4,67	4,60	4,52	4,44	4,35	4,24	4,13
3. Banjar	2,62	3,29	2,68	2,64	2,65	2,62	2,59	2,55	2,52
4. Barito Kuala	3,40	2,21	3,31	3,28	3,24	3,19	3,13	3,07	2,99
5. Tapin	5,43	5,52	5,49	5,50	5,48	5,46	5,42	5,37	5,32
6. Hulu Sungai Selatan	4,42	2,64	4,82	4,77	4,72	4,57	4,41	4,24	4,07
7. Hulu Sungai Tengah	1,74	4,05	2,77	2,82	2,86	2,85	2,83	2,75	2,67
8. Hulu Sungai Utara	2,83	3,37	3,20	3,25	3,17	3,17	3,16	3,14	3,11
9. Tabalong	2,20	4,12	2,63	2,81	2,76	2,71	2,66	2,59	2,51
10. Tanah Bumbu	7,32	4,76	7,43	7,42	7,40	7,38	7,35	7,30	7,23
11. Balangan	2,82	2,96	3,09	3,18	3,11	3,03	2,95	2,85	2,75
12. Kota Banjarmasin	5,24	6,02	5,26	5,36	5,32	5,29	5,25	5,20	5,14
13. Kota Banjar Baru	2,65	5,35	2,91	3,01	2,89	2,76	2,62	2,48	2,33
Kalimantan Selatan	3,79	3,80	4,83	4,80	4,77	4,70	4,25	4,10	3,60
				–	–	–	–	–	–
				4,78	4,71	4,50	4,20	4,03	4,00

Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi adalah Tanah Bumbu (7,43) yang diproyeksikan pada tahun 2021 menurun menjadi 7,23, Kota Banjarmasin Tabalong (5,26) yang diproyeksikan turun menjadi 5,14.

Peningkatan Kesempatan Kerja adalah bentuk upaya penciptaan lapangan kerja yang didorong oleh peningkatan investasi baik oleh Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat sendiri. Dorongan akan tercipta



apabila didukung oleh kebijakan pengelolaan perekonomian yang berimbang antara daya dukung lingkungan dan kemampuan karya dan cipta SDM yang memadai.

d. Target Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

Target pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2021 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target penurunan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021;
- (2) Distribusi penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota.
- (3) Kinerja pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2010-2015.

Tabel 5. 5 Target Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Realisasi		Esti- masi	Perkiraan					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	4,33	4,29	4,22	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,61
2. Kota Baru	4,73	4,49	4,24	4,02	3,80	3,60	3,40	3,22	3,05
3. Banjar	2,84	2,76	2,68	2,60	2,53	2,45	2,38	2,31	2,25
4. Barito Kuala	5,12	4,97	4,80	4,64	4,48	4,33	4,18	4,04	3,90
5. Tapin	3,41	3,30	3,21	3,11	3,03	2,94	2,86	2,78	2,70
6. Hulu Sungai Selatan	6,67	6,53	6,39	6,26	6,13	6,00	5,88	5,75	5,63
7. Hulu Sungai Tengah	5,57	5,37	5,14	4,93	4,72	4,52	4,33	4,15	3,97
8. Hulu Sungai Utara	6,92	6,60	6,28	5,98	5,69	5,42	5,16	4,91	4,67
9. Tabalong	6,15	5,98	5,80	5,64	5,47	5,32	5,16	5,01	4,87
10. Tanah Bumbu	5,20	4,92	4,72	4,52	4,33	4,14	3,97	3,80	3,64
11. Balangan	6,17	5,96	5,74	5,53	5,33	5,13	4,95	4,77	4,59
12. Kota Banjarmasin	4,21	4,03	3,84	3,65	3,48	3,31	3,15	3,00	2,86
13. Kota Banjar Baru	4,50	4,29	4,14	4,00	3,85	3,72	3,59	3,46	3,34
Kalimantan Selatan	4,76	4,81	4,72	4,68 – 4,66	4,65 – 4,55	4,50 – 4,30	4,25 – 4,05	4,03 – 4,02	3,96 – 4,01

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Hulu Sungai Utara (6,28), Hulu Sungai Selatan (6,53) dan Tabalong (5,98). Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki target penurunan kemiskinan pada



tahun 2021 sebesar 4,67 (Hulu Sungai Utara), 5,63 (Hulu Sungai Selatan) dan 4,87 (Tabalong).

e. Target Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

Indeks gini merupakan sebuah indikator pembangunan yang mengukur ketimpangan pendapatan. Saat ini indeks gini Kalimantan selatan sebesar 0,328 yang berada pada kategori sedang. Dalam lima tahun kedepan diharapkan Indeks Gini Kalimantan Selatan diharapkan berada di kategori rendah yang memiliki kisaran antara 0-0,3 yang memiliki arti bahwa pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan. berikut adalah Target Indeks Gini Kota Kabupaten di Kalimantan Selatan tahun 2016-2021

Tabel 5. 6 Indeks Gini Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal	Proyeksi Indeks Gini					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	0,253	0,244	0,236	0,227	0,219	0,210	0,201
2. Kotabaru	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
3. Banjar	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
4. Barito Kuala	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
5. Tapin	0,263	0,254	0,246	0,237	0,229	0,220	0,211
6. Hulu Sungai Selatan	0,243	0,234	0,226	0,217	0,209	0,200	0,191
7. Hulu Sungai Tengah	0,283	0,274	0,266	0,257	0,249	0,240	0,231
8. Hulu Sungai Utara	0,243	0,234	0,226	0,217	0,209	0,200	0,191
9. Tabalong	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
10. Tanah Bumbu	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
11. Balangan	0,283	0,274	0,266	0,257	0,249	0,240	0,231
12. Banjarmasin	0,353	0,344	0,336	0,327	0,319	0,310	0,301
13. Banjarbaru	0,343	0,334	0,326	0,317	0,309	0,300	0,291
Kalimantan Selatan	0,359	0,328	0,317	0,307	0,296	0,286	0,286

Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki ketimpangan pendapatan terbesar/memiliki indeks gini dengan kategori sedang adalah Kota Banjarmasin (0,353), Kota Banjarbaru (0,343) serta Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki indeks gini yang sama yaitu 0,313. Diharapkan dalam lima tahun kedepan indeks Gini Kota/Kabupaten dalam pembangunan menghasilkan nilai indeks gini dibawah 0,30 yang merupakan kategori ketimpangan rendah.



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Sedangkan, arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kalimantan Selatan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 6. 1 Strategi Pembangunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat dan Terampil				
Prioritas : Kalsel Cerdas, Kalsel Sehat, Kalsel Terampil dan Kalsel Agamis				
1	1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Meningkatkan Akses anak usia sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2. Peningkatan Promosi Kesehatan 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	2. Pengembangan kesadaran pola hidup sehat 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada institusi pelayanan Kesehatan. 4. Peningkatan kesehatan berbasis masyarakat. 5. Meningkatkan penyediaan suply air bersih dan sanitasi layak 6. Fasilitasi Penyediaan Permukiman Sehat
		3. Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	4. Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan	7. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan. 8. Pengembangan sentra pelatihan ketenagakerjaan.
		4. Meningkatkan pemahaman keagamaan	5. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	9. Meningkatkan Pendidikan karater. 10. Fasilitasi pengembangan budaya religious dimasyarakat.
		5. Meningkatkan Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	6. Peningkatan Koordinasi , Sinkronisasi Kebijakan data dan informasi Gender	11. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan diberbagai sektor 12. Pengembangan system informasi kesetaraan gender
Misi 2: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik				
Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik				
2	2. Tata Kelola Pemerintahan	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	7. Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	13. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 14. Pengembangan penghargaan dan hukuman yang konsisten dan bertanggung jawab.
			8. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	15. Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah.
			9. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public	16. Peningkatan kualitas Peraturan Daerah. 17. Peningkatan kualaitas sarana pelayanan publik.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Meningkatnya pendanaan daerah	10.Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	18. Pengembangan sumber-sumber Pendanaan Pembangunan. 19.Mendorong pengembangan sektor-sektor produksi yang berkualitas.
		8. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah	11.Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah	20.Peningkatan kualitas data dan informasi. 21.Pengembangan standarisasi pelaksanaan pembangunan. 22.Mendorong Pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah 23.Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik 24.Percepatan pembangunan kawasan Perkantoran di banjarbaru
Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal				
Prioritas : Kalsel Berbudaya, Kalsel Menuju PON, Kalsel Aman				
3	3. Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat	9. Menurunnya Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12.Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban masyarakat berpenghasilan rendah	25.Pengembangan data dan informasi kesejahteraan sosial. 26.Peningkatan produktivitas dan perlindungan sosial kepada masyarakat berpenghasilan Rendah.
		10. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	13.Peningkatan peran serta masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	27.Peningkatan pembinaan keamanan berbasis masyarakat. 28.Pengembangan system informasi Kamtrantibmas
	4. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal	11. Mempersiapkan terselenggaranya PON di Kalsel	14.Pengembangan Kebijakan pengembangan keolahragaan	29.Terbangunnya sport center dan pembangunan prasarana olahraga berstandar internasional serta Pembangunan prasarana publik
	5. Meningkatkan Kehidupan kualitas masyarakat berbudaya lokal	12. Meningkatkan ketahanan budaya	15.Pembinaan kelembagaan budaya daerah	30.Pemantapan peran Taman Budaya sebagai wadah para seniman dan budayawan untuk meningkatkan ketahanan dan penguatan budaya dan kearifan lokal.
		13. Meningkatnya Etos kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatipitas dan Kepedulian	16.Meningkatkan Mental Masyarakat	31.Meningkatkan integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong yang rendah.
		14. Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	17.Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	32.Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) di masing-masing Kabupaten/Kota.
		15. Meningkatnya Kualitas	18.Peningkatan partisipasi	33.Peningkatan pembinaan budaya daerah



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Budaya Masyarakat	masyarakat dalam pengembangan budaya daerah	
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya				
Prioritas : Kalsel Dengan Infrastruktur yang Berkualitas				
4	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang.	<p>16. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar</p> <p>17. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian</p>	<p>19. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar di Daerah</p> <p>20. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian di Daerah</p>	<p>34. Mendorong Pembangunan pipa saluran air baku dari Waduk Riam Kanan ke Banjarbaru dan Banjarmasin</p> <p>35. Mendorong pemberlakuan tarif subsidi silang untuk keadilan dan pemerataan</p> <p>36. Mendorong PDAM kab/kota untuk pengembangan pelayanan air bersih.</p> <p>37. Mendorong Perkuatan kelembagaan masyarakat pengelola air bersih untuk masyarakat perdesaan.</p> <p>38. Memfasilitasi distribusi air bersih perdesaan.</p> <p>39. Mendorong/Fasilitasi Pengembangan SPAM Regional Lainnya.</p> <p>40. Meningkatkan penyediaan prasarana sanitasi terutama air limbah domestik</p> <p>41. Mendorong Pembangunan Pembangkit baru dan meningkatkan jaringan transmisi, skala besar, yang dapat dilaksanakan oleh BUMN, Swasta, atau pola KPS.</p> <p>42. Pembangunan dan pengembangan skala rumah tangga, dan skala desa, khususnya pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN, melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTS, Biogas, Biomassa dan sebagainya).</p> <p>43. Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan</p> <p>44. Pembangunan Sumur Bor untuk air baku</p> <p>45. Mempertahankan kondisi jalan provinsi agar tetap berada dalam kondisi baik (mantap)</p> <p>46. Meningkatkan konektivitas antara wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industry dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan kuantitas moda lalu lintas</p> <p>47. Membuat system informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan</p>



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				terhadap kondisi dan usulan perbaikan jalan., sehingga perbaikan dapat segera ditangani.
				48.Mendorong Pengembangan System Jaringan Jalan yang merata di antara wilayah pembangunan : a. Untuk wilayah timur Kalsel, berupa: 1) Membangun/Mengkoordinasikan/mendorong penyelesaian Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut. 2) Pembangunan jalan lingkaran pulau laut. 3) Pembangunan Jalan lingkaran Batulicin b. Untuk Wilayah Barat Kalsel: 1) Mendorong/Fasilitasi penyelesaian pembangunan jalan Marabahan-Margasari- Buas-buas-Negara dan Buas-buas Tabatan Baru. 2) Mendorong/Fasilitasi Pembangunan Jembatan Tabukan dan jalan aksesnya c. Untuk wilayah Selatan Kalsel: 1) Penyelesaian Pembangunan Jalan Matraman Sungai Ulin. 2) Peningkatan Jalan Lingkaran Luar Selatan dan Trikora Banjarbaru, serta penyelesaian jalan tembus diantara kedua ruas ajalan tersebut 3) Penyelesaian Jalan Lingkaran Dalam Selatan d. Untuk Penghubung antar wilayah: 1) Mendorong /FasilitasiPeningkatan jalan Kandangan – Lumpangi- Batulicin 2) Mendorong/Fasilitasi Peningkatan Kelas Jalan Nasional dari Kelas III menjadi Kelas II. 3) Pembangunan Ruas jalan Paringin – Halong – Manggalau.
				49.Membangun jalan akses pelabuhan dan bandara.
				50.Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk merealisasikan pembangunan jalan toll ini.
				51.Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan
				52.Membangun moda transportasi masal (Pembangunan BRT)
				53.Mendorong percepatan pembangunan angkutan sistem jaringan (kereta api)



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				54.Mendorong/Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Bandara udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam)
				55.Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah
				56.Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara
				57.Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan di angkutan sungai danau dan Penyeberangan
				58.Mempertahankan cactment area sebagai wilayah tangkapan air yang sangat strategis
				59.Mendorong pembangunan waduk/embung sebagai upaya ketahan air Membangun embung /waduk untuk penyediaan air bersih dan ketahanan air
Misi 5: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Prioritas : Kalsel Sentra Pangan, Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa, Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas				
5	Meningkatkan daya saing Perekonomian	18. Terwujudnya Mandiri Pangan dan kontribusi sektor pertanian	21.Pengembangan Agrobisnis Agro Industri	60.Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk andalan daerah, baik pada sektor pertanian (dalam arti luas); sektor industri (makanan dan minuman) serta ekonomi kreatif.
				61.Menyelesaikan pembangunan daerah irigasi
				62.Penataan lahan berkelanjutan dan luas cadangan
		19. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	22.Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar	63.Meningkatkan investasi dengan meningkatkan peran dan kinerja Penanaman Modal untuk menarik investor ke Kalsel
				64.Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi di atas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi.
				65.Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel.
				66.Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel
				67.Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, melalui pengembangan jaringan infrastruktur.
				68.Mempercepat pembangunan sarana distribusi
				69.Memantapkan Kawasan Industri yang ada di Kalsel, melalui pembenahan dan pengelolaan yang baik.
			70.Pembangunan zona industri	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				71.Pengembangan UKM-K. 72.Menciptakan wira usaha baru 73.Melaksanakan Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan. 74.Memperluas jaringan akses permodalan UKM-K, melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan Bank dan Non Bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UKM-K untuk kelancaran pembiayaan usaha.
	20. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	23.Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan		75.Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan 76.Mempermudah akses ke tempat wisata 77.Meningkatkan promosi Pariwisata ke berbagai media 78.Membenahi dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata berwawasan lingkungan 79.Melibatkan Swasta dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata
	21. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	24.Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan		80.Mengurangi luasan lahan kritis di luar KPH 81.Meningkatkan pengawasan Illegal logging, illegal mining dan illegal Fishing 82.Mengendalikan pencemaran akibat usaha pertambangan 83.Pembinaan dan Pengawasan Investor Tambang dalam proses rehabilitasi pasca tambang 84.Penyelesaian pembangunan kebun raya banua 85.Pengurangan pencemaran kualitas air 86.Mendorong penghapusan jamban terapung. 87.Pembinaan, Pengawasan, Pelestarian dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove dan Terumbu karang 88.Penanggulangan Banjir di Daerah 89.Pengawasan terhadap gas buang 90.Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 91.Penanganan Persampahan



Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan diatas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum merupakan penjabaran dari strategi yang diterjemahkan ke dalam rencana program - program prioritas pembangunan. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan agar selaras dengan strategi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu, kebijakan umum harus disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) masing-masing.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai dengan 2021.

7.1 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi Dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2016-2021 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum.

Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Program-program pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut.



Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAP AI AN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat dan Terampil									
Prioritas: Kalsel Cerdas, Kalsel Sehat, Kalsel Terampil dan Kalsel Agamis									
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Meningkatkan Akses anak usia sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan.	1. Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentasi Lulusan SMP masuk ke SMA	60	90	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA setingkat Guru S2	0,9	6,09	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				3. Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan	Persentase lulusan sekolah melanjutkan pendidikan lebih tinggi	67,0	85	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				4. Peningkatan Kualitas Sekolah	Persentase sekolah yang terakreditasi	6,3	22,09	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				5. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki Sarpras memenuhi standar	6,28	40,7	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				6. Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)	Persentase Anak bisa menamatkan melalui jalur pendidikan non formal dan informal	2,0	8,0	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				7. Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	52,57	57,82	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				8. Program perluasan penyelenggaraan pendidikan	Persentase lulusan sekolah melanjutkan pendidikan lebih tinggi	67	85	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan UPT
				9. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Buku yang dipinjam (4500)	2%	5%	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
				10. Program Pembinaan Perpustakaan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	5%	55%	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. Peningkatan Promosi Kesehatan 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	2. Pengembangan kesadaran pola hidup sehat	11. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyediaan Tenaga Kesehatan	50	85	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
				12. Peningkatan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase penyediaan Tenaga Kesehatan	50	85	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				13. Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentasi Rumah Tangga memiliki tempat Pembuangan Sampah	60	90	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
			3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada institusi pelayanan Kesehatan.	14. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase Penurunan Kasus/Wabah Penyakit menular	2	0	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
				15. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan	50	90	Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT dan Rumah Sakit;
				16. Perbaiki Gizi Masyarakat	Persentase Penurunan Masyarakat Bermasalah Gizi	28	18	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
				17. Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Institusi Kesehatan yang dibina	100	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
				18. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan	Porsentasi Sarana Pelayanan Yang memiliki Rujukan	15	85	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
				19. Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Finansial Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non PBI	Persentase Jaminan kesehatan nasional kesehatan masyarakat (%)	17	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
				20. Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya penggunaan obat Rasional	40	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT dan Rumah Sakit;
				21. pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase Rumah Sakit yang memiliki Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	0	45	Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT dan Rumah Sakit;
				22. Standarisasi & Sertifikasi Layanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	1	3	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
				23. Pelayanan BLUD	Porsentasi Pelayanan BLUD	100	100	Kesehatan	Rumah Sakit
				24. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penurunan Kasus Wabah Penyakit menular	2	0	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT
			25. Program Peningkatan Manajemen Kesehatan	Persentase Institusi Kesehatan yang dibina	100	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT dan Rumah Sakit	



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			4. Peningkatan kesehatan berbasis masyarakat.	26. Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kelembagaan Masyarakat bidang Kesehatan	0	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT	
				27. Kemitraan layanan kesehatan	Persentase Peningkatan jaminan Kesehatan	100	100	Kesehatan	Rumah Sakit	
				28. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	54	100	Kesehatan	Rumah Sakit	
				29. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Penggunaan Air Minum layak	48	60	Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT	
				30. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prosentase Peningkatan jaminan Kesehatan	60	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan, UPT	
			5. Meningkatkan penyediaan suply air bersih dan sanitasi layak	6. Fasilitas Penyediaan Permukiman Sehat	31. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Persentase Rumah Tangga Penggunaan Air Minum yang Aman	61,54	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas PUPR
						Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Air Limbah Domestik	24,14	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas PUPR
						persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	19,13	0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas PUPR
					32. Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi layak	58	70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas PUPR
			3	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	4. Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan	7. Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan.	33. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	50	100
8. Pengembangan sentra pelatihan ketenagakerjaan.	34. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentasi Pencari Kerja Memperoleh Sertifikat Kompetensi				25	55	Tenaga Kerja	Disnakertrans	



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
					Persentase kenaikan jumlah SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	827 org	12%	Tenaga Kerja	Dinas PUPR Disnakertrans
				35. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase penduduk yang bekerja	95,17	100	Tenaga Kerja	Disnakertrans
				36. Padat Karya Produktif	Prosentase Masyarakat Miskin yang bekerja	20	50	Tenaga Kerja	Disnakertrans
4	Meningkatnya pemahaman keagamaan	5. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	9. Meningkatkan Pendidikan karakter.	37. Pendidikan Karakter	Persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan Al. Qur'an	-	70	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				38. Progam Pendidikan Keagamaan disekolah-sekolah	Persentase lulusan SMA/MAN yg khatam Al Qur'an	0	70	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			10. Fasilitasi pengembangan budaya religious dimasyarakat.	39. Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama	Persentase Terbinanya Lembaga FKUB	100	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
				40. Pembinaan Kelembagaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Kelembagaan keagamaan terlibat pada hari-hari besar keagamaan	40	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	6. Peningkatan Koordinasi , Sinkronisasi Kebijakan data dan informasi Gender	11. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan diberbagai sektor	41. keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Porsentasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	75	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK
				42. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Peningkatan Kelembagaan Gender dan Anak	10	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK
				43. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentasi Peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan	63	75	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK
				44. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Peningkatan Peran dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	88,5	89,1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPAK



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
Misi 2: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik										
Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik										
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7. Terwujudnya Kapasitas Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	12. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.	45. Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang memperoleh Pendidikan/Latihan Kedinasan	-	80	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengembangan SDM Daerah	
				46. peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik (69 jenis pelayanan, baru 28 dilaksanakan)	Persentase Peningkatan Layanan yang diberikan kepada masyarakat	40,58	70	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	RS, Perijinan	
				47. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM Aparatur Memperoleh Sertifikat Kompetensi	20	50	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD dan Badan Pengembangan SDM Daerah	
				48. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Informasi Formasi dengan Persyaratan Kompetensi Jabatan	100	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD dan Badan Pengembangan SDM Daerah	
				49. Penataan Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas SDM Aparatur	4		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD dan Setda (Biro Organisasi)	
			13. Pengembangan penghargaan dan hukuman yang konsisten dan bertanggung jawab.	50. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Obrik Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	0	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	
				51. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penurunan Pelanggaran	0	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat	
			8. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	14. Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah.	52. Pengendalian dan pengawasan pembangunan	Persentase Penurunan Pelanggaran	0	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat
			9. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik	15. Peningkatan kualitas Peraturan Daerah.	53. Program evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM	Persentase Perda Kabupaten/Kota yang menghambat pembangunan	100%	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Hukum)



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				54. Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Pembinaan dan Fasilitas Daerah Otonomi Baru	25	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Pemereintahan)
				55. Program Peningkatan Bantuan Hukum Daerah Dan HAM	Tertanganinya Gugatan Terhadap Pemerintah Prov. Kalsel Yang Telah Dikuasakan	100%	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Hukum)
					Prosentase Advice Permohonan Bantuan Masyarakat Miskin Yang Diteruskan Ke OBH	100%	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Hukum)
				56. Program Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Produk Hukum Daerah Yang Ditingkatkan Mutunya	100%	100%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Hukum)
				57. Program Reformasi Regulasi	Prosentase Simplifikasi Produk Hukum Daerah Yang Menghambat Pembangunan	100%	10%	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Hukum)
			16. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik	58. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN	21/47 = 44,7%	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				59. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Persentase terbangunnya Gedung perkantoran	65%	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas PUPR dan Setda (Biro Perlengkapan)
				60. Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Tersedianya pelayanan publik yang berkualitas	5		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektora dan Setda (Biro Pemerintahan dan Biro Organisasi)
				61. Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target RPJMD	60	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAP AI AN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
7	Meningkatnya pendanaan daerah	10. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	17. Pengembangan sumber-sumber Pendanaan Pembangunan. 18. Mendorong pengembangan sector-sektor produksi yang berkualitas.	62. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	100	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				63. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian Anggaran dan Kesesuaian Belanja	80	92	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				64. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah	Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan	75	95	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				65. Peningkatan Realisasi Anggaran (Realisasi / Rencana menurut waktunya)	Persentase Realisasi Anggaran dengan Rencana Belanja	25	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				66. Peningkatan Efektivitas Penganggaran Daerah	Persentase Temuan BPK	0	0	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				67. peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kemandirian Viskal (PAD terhadap APBD)	54%	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
					Persentase kesesuaian Anggaran dan Kesesuaian Belanja	80	92	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
8	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah	11. Peningkatan kualitas system manajemen kinerja Pemerintah Daerah	19. Peningkatan kualitas data dan informasi.	68. Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Litbang yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan	25	80	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Balitbangda
				69. Penguatan Manajemen Kelitbangan	Persentase Kerja sama Penelitian kab/Kota	30	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Balitbangda
				70. Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah	Persentase Tersedianya data dan informasi yang update oleh SKPD	0	100	Fungsi Penunjang Urusan	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
								Pemerintahan	
				71. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Masyarakat miskin	60	90	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bappeda
				72. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Persentase Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	75		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKD
				73. Program Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	0	100	Administrasi Kependudukan	Dinas Admindukcapil dan KB
				74. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB	Persentase Kader GSI Aktif.	0	50	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Admindukcapil dan KB, Dinas PPPAK
				75. Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Persentase BKB dan Sub BKBD Aktif	0	100	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Admindukcapil dan KB, Dinas PPPAK
				76. Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Lahan yang bersertifikat	30	85	Pertanahan	Setda (Biro Perlengkapan)
				77. Program Penyelesaian Perbatasan	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah	60	90	Pertanahan	Setda (Biro Pemerintahan)
				78. Program Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	0	100	Administrasi Kependudukan	Dinas Admindukcapil dan KB
				79. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasis TIK	0	100%	Kearsipan	Dinas Kearsipan
			20. Pengembangan	80. Peningkatan Kerjasama	Porsentasi Peningkatan	7,7	100	Fungsi	Setda (Biro Ekonomi dan



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			standarisasi pelaksanaan pembangunan.	Antar Pemerintah Daerah	Kerjasama Antar Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Pemerintahan) dan Bappeda
				81. peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPR
		21. Mendorong Pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah		82. Program Pengelolaan dan Pengembangan e-Government, Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai dan ranking pemerinkatan e-Government	16	6	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentas Cakupan Informasi komunikasi Publik	Skala 2,00 dari 4	Skala 3,10 dari 4	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
						15,4%	84,6%	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		22. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik		83. Program Pengembangan Teknologi Konstruksi	Prosentase pelayanan pemohon pengujian yang terlayani dengan saran prasarana yang ada	80%	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
		23. Percepatan pembangunan kawasan Perkantoran di banjarbaru		84. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana publik	13	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Perlengkapan)
Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal									
Prioritas: Kassel Berbudaya, Kassel Menuju PON, Kassel Aman									
9	Menurunnya Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	12. Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban masyarakat berpenghasilan rendah	24. Pengembangan data dan informasi kesejahteraan sosial.	85. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	157	100	Sosial	Dinas Sosial
				86. pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase pantisosial yang dibina	125	100	Sosial	Dinas Sosial
			25. Peningkatan produktivitas dan perlindungan social kepada	87. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Persentase PMKS yang tertangani	194,623	45	Sosial	Dinas Sosial



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			masyarakat berpenghasilan Rendah.	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
				88. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Kesejahteraan Sosial yang ditangani	5.740		Sosial	Dinas Sosial dan Pantti
				89. pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar yang ditangani	1250	50	Sosial	Dinas Sosial dan
				90. pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang Cacat yang dibina	85	85	Sosial	Dinas Sosial
				91. pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	1250	100	Sosial	Dinas Sosial dan Pantti
				92. Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi Tentang kepemimpinan Pemuda.	Persentase organisasi pemuda yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan	0	100	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
				93. Program Pengembangan Kemitraan Antar Pemuda Dengan Masyarakat	Persentase peningkatan kemitraan pemuda dengan masyarakat	0	100	Kepemudaan dan Olah Raga	Dispora
10	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	26. Peningkatan pembinaan keamanan berbasis masyarakat.	94. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penurunan tindak kriminal	100	70	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Bakesbangpol, Satpol PP, Dinas PPPAK
				95. Pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase Penurunan PEKAT	0	0	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Satpol PP
				96. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase Penurunan Resiko Bencana	5		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	BPBD



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
								Masyarakat.	
				97. Perencanaan pembangunan daerah Rawan Bencana	Tersedianya Dokumen Pembangunan dan Rekon	1		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	BPBD
				98. Program Keamanan dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan Angka Kriminalitas (2.232 kasus)	0	50	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Satpol PP
			27. Pengembangan system informasi Kamtrantibmas	99. pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat memperoleh pemahaman wawasan kebangsaan	0	10	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Bakesbangpol
				100. Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kasus Gangguan KAMTRANTIBMAS	0	0	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Bakesbangpol; BPBD; dan Satpol PP
11	Mempersiapkan terselenggaranya PON di Kalsel	14. Pengembangan Kebijakan pengembangan keolahragaan	28. Terbangunnya sport center dan pembangunan prasarana olahraga berstandar internasional serta Pembangunan prasarana publik	101. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana Publik sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN	20/36 = 55,6%	100%	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas PUPR dan Dispora
12	Meningkatkan ketahanan budaya	15. Pembinaan kelembagaan budaya daerah	29. Pemantapan peran Taman Budaya sebagai wadah para seniman dan budayawan untuk meningkatkan ketahanan dan penguatan budaya	102. Pengembangan Unsur Budaya	Persentase Unsur2 budaya yang dikembangkan	28	55	Kebudayaan	Disparbud, Taman Budaya



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAP AI AN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			dan kearifan lokal.						
13	Meningkatnya Etos kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatipitas dan Kepedulian	16. Meningkatkan Mental Masyarakat	30. Meningkatkan integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong yang rendah.	103. Pembinaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang dibina	10	70	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				104. Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi	0	8 eks UPT	Transmigrasi	Disnakertrans
				105. Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0	6 UPT	Transmigrasi	Disnakertrans
				106. Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi	Persentase Sumber Daya Transmigrasi	0	6 UPT	Transmigrasi	Disnakertrans
14	Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	17. Meningkatkan Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	31. Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) di masing-masing Kabupaten/Kota.	107. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase sarana keagamaan yang dibina	5	35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
				108. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Persentase Kelembagaan keagamaan terlibat pada hari-hari besar keagamaan	40	100	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
				109. Peningkatan Sarana dan prasarana Keagamaan	Persentase sarana keagamaan yang dibina	5	35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Biro Kesra)
15	Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat	18. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya daerah	32. Peningkatan pembinaan budaya daerah	110. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase swadaya masyarakat untuk Pembiayaan Pembangunan Desa	15	21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				111. Program Pengembangan Potensi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat	40	100	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				112. Penggalian Unsur Budaya	Persentase Unsur Budaya yang ada di Kalsel	10	100	Kebudayaan	Disparbud
				113. Aktualisasi Unsur Budaya	Persentase unsur2 budaya yang menjadi kekayaan budaya	14	56	Kebudayaan	Disparbud



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				114. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pengembangan Kelembagaan Desa	50	80	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya Prioritas : Kalsel Kalsel Dengan Infrastruktur yang Berkualitas									
16	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	19. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar di Daerah	33. Mendorong Pembangunan pipa saluran air baku dari Waduk Riam Kanan ke Banjarbaru dan Banjarmasin	115. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Persentase Rumah Tangga Penggunaan Air Minum yang Aman	61,54	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
17	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	20. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian di Daerah	34. Mendorong pemberlakuan tarif subsidi silang untuk keadilan dan pemerataan						
			35. mendorong PDAM kab/kota untuk pengembangan pelayanan air bersih.						
			36. Mendorong Perkuatan kelembagaan masyarakat pengelola air bersih untuk masyarakat perdesaan.						
			37. Memfasilitasi distribusi air bersih perdesaan.						
			38. Mendorong/ Fasilitasi Pengembangan SPAM Regional Lainnya.						



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			39. Meningkatkan penyediaan prasarana sanitasi terutama air limbah domestik	116. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Air Limbah Domestik	24,14	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR
			40. Mendorong Pembangunan Pembangkit baru dan meningkatkan jaringan transmisi, skala besar, yang dapat dilaksanakan oleh BUMN, Swasta, atau pola KPS.	117. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi	Rasio Elektrifikasi	84,23	87,50	ESDM	Distamben
			41. Pembangunan dan pengembangan skala rumah tangga, dan skala desa, khususnya pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN, melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti PLTS, Biogas, Biomassa dan sebagainya).		presentase Pemakaian energi baru terbarukan	302 unit	192 unit	ESDM	Distamben
			42. Peningkatan jaringan	118. Program Pengelolaan dan Pengembangan e-	Persentasi daerah yang tercover jaringan	7,7	100	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB		
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
			telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan	Government, Komunikasi dan Informasi Publik	komunikasi (jumlah desa yang tercover jaringan komunikasi)						
			43. Pembangunan Sumur Bor untuk air baku	119. Pengembangan sumberdaya mineral, geologi dan air tanah	Luas cekungan air tanah di Kalsel	644.100 ha	744.100 ha	ESDM	Distamben		
					Persentase penyediaan air tanah untuk sumur bor	52 unit	57	ESDM	Distamben		
					Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa sumber daya mineral, geologi dan air tanah	0	80	ESDM	Distamben		
			44. Mempertahankan kondisi jalan provinsi agar tetap berada dalam kondisi baik (mantap)	120. Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dalam Kondisi Baik (%)	83	91	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR Setda (Biro Perlengkapan)		
		45. Meningkatkan konektivitas antara wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industri dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan kuantitas moda lalu lintas	Jembatan dalam Kondisi Baik (%)							82	88
		46. Membuat system informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan terhadap									



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			kondisi dan usulan perbaikan jalan., sehingga perbaikan dapat segera ditangani.						
			47. Mendorong Pengembangan System Jaringan Jalan yang merata di antara wilayah pembangunan						
			48. Membangun jalan akses pelabuhan dan bandara.						
			49. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk merealisasikan pembangunan jalan toll ini.						
			50. Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan						
			51. Membangun moda transportasi masal (Pembangunan BRT)	121. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Prosentase Sarana dan prasarana sistem angkutan masal (%)	0	100	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			52. Mendorong percepatan pembangunan angkutan sistem jaringan (kereta api)						
			53. Mendorong/ Fasilitasi Pengembangan						



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			Pelabuhan dan Bandara udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam)						
			54. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah	122. Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Waktu Tempuh Rata-rata Ruas jalan provinsi (kmh)	60	69	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			55. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara		Persentase penurunan angka kecelakaan diruas jalan provinsi (%)	60	35	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			56. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan di angkutan sungai danau dan penyeberangan		Persentase penurunan angka kecelakaan angkutan sungai danau dan penyeberangan (%)	60	35	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			57. Mempertahankan cactment area sebagai wilayah tangkapan air yang sangat strategis	123. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jumlah Tampung Air Embung, Situ, Waduk yang dibangun (%)	2	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
			58. Mendorong pembangunan waduk/embung sebagai upaya ketahan air Membangun						



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB					
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR							
			embung /waduk untuk penyediaan air bersih dan ketahanan air											
Misi 5: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan														
Prioritas : Kassel Sentra Pangan, Kassel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, Kassel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa, Kassel Menuju Lingkungan Berkualitas														
18	Terwujudnya Mandiri Pangan dan kontribusi sektor pertanian	21. Pengembangan Agrobisnis /Agro Industri	59. Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk andalan daerah, baik pada sektor pertanian (dalam arti luas); sektor industri (makanan dan minuman) serta ekonomi kreatif.	124. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanamam Pangan		Pertanian	Dinas Pertanian TPH, BKP						
					Padi :	3			3					
					Jagung :	4			4					
										Kedelai :	15	15		
										Persentase peningkatan Produksi dan produktivitas Holtikuluta		Pertanian	Dinas Pertanian TPH, BKP	
										Bawang Merah :	10			10
										Cabe :	5			5
										Jeruk :	3	3		
									125. Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura	Persentase peningkatan rendemen gabah-beras 1%/tahun	62	68	Pertanian	Dinas Pertanian TPH
									126. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan luas tambah tanam 2%/thn	2	2	Pertanian	Dinas Pertanian TPH
									127. Peningkatan Kemandirian Pangan	Peningkatan Desa mandiri Pangan	187	257	Pangan	BKP, Dinas Pertanian TPH
										Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat	102	122	Pangan	BKP, Dinas Pertanian TPH
										Peningkatan Skor PPH Ketersediaan	88	90,5	Pangan	BKP
				128. Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn	90	85,8	Pangan	BKP, Dinas Pertanian TPH					
					Peningkatan skor PPH Konsumsi	84,9	90,9	Pangan	BKP					
				129. Program penyadaran Pola Konsumsi pangan sehat	Prosentase masyarakat dengan gizi seimbang	53	80	Pangan	BKP					
				130. Program Pengembangan	Prosentase Cadangan	25	25	Pangan	BKP					



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				Model Distribusi Pangan yang Efisien	Pangan Daerah minimal				
				131. Pemantapan Sistem Penyuluhan	Persentase peningkatan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan petani	5	5	Pertanian	Dinas Pertanian TPH, Dinas Peternakan dan Perkebunan
					Persentase peningkatan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama	4	100	Pertanian	Dinas Pertanian TPH, Dinas Peternakan dan Perkebunan
				132. Peningkatan mutu hasil dan inventasi usaha perkebunan	Persentase Peningkatan kualitas hasil olahan komoditas perkebunan	25	90	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					Persentase penurunan konflik dan gangguan usaha perkebunan	5	5	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				133. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Persentase Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan			Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					Karet :	40	43,12	Pertanian	
					Kelapa Sawit :	30	38,8	Pertanian	
					Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	20	22,56	Pertanian	
				134. Peningkatan Perlindungan dan Prasarana Perkebunan	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	30	70	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					Persentase penurunan gangguan OPT	5,5	2	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
				135. Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Peningkatan Produksi			Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					Daging 5% :	64899	82829	Pertanian	
					Telur 7% :	77410	111132	Pertanian	
					Susu 5% :	57	73	Pertanian	
				136. Program Pengendalian Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan, Penyakit Zoonosa dan Keamanan Pangan	Angka Kematian Ternak (%)			Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					- Sapi, Sapi perah, kerbau dan kambing	3,02	<3	Pertanian	
					- Ayam buras dan itik	4,60	<4	Pertanian	
					- Ayam ras pedaging dan petelur	3,16	<3	Pertanian	



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				137. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	LPE Peternakan			Pertanian	
					- Meningkatnya nilai tambah hasil ternak (%)	41	125	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					- Meningkatnya Revitalisasi lembaga pemasaran ternak 5 % per tahun	29	37	Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					- Meningkatnya pemasaran ternak keluar daerah :			Pertanian	Dinas Peternakan dan Perkebunan
					a. Sapi potong, kerbau & kambing (ekor)	4600	5000	Pertanian	
					b. Ayam ras pedaging, ayam buras & itk (ekor)	1416000	2280482	Pertanian	
					c. Day old chicken (DOC) & Day Old Duck (DOD), (ekor)	2687345	4327996	Pertanian	
				138. Pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	130.000	155.000	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut
				139. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan (Kg/kapita/thn)	47,43	55,20	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut
				140. Pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	248.000	260.000	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut
				141. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pelaku usaha yang patuh (%)	30	81	Kelautan dan Perikanan	Diskanlut
				142. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	LPE PDRB Kehutanan	-0,65	0,5	Kehutanan	Dinas Pertanian TPH; BLHD



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
19	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	22. Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar	60. Menyelesaikan pembangunan daerah irigasi	143. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Irigasi dan Rawa dalam Kondisi Baik (%)	39,5	80	Pangan	Dinas Pertanian TPH; Dinas PUPR
					Persentase Luas DI dan DR yang dikembangkan (%)	49	100	Pangan	Dinas Pertanian TPH; Dinas PUPR
			61. Penataan lahan berkelanjutan dan luas cadangan /LP2B	144. Program Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Ruang (%)	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR, Bappeda, Diskanlut, Dishut, BLHD
			62. Meningkatkan investasi dengan meningkatkan peran dan kinerja Penanaman Modal untuk menarik investor ke Kalsel	145. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-36,5	15	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			63. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi di atas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi.	146. Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Tersedianya SOP Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perijinan	5 (3000 Izin)	25 (3750 izin)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			64. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalsel.	147. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana investasi PMA dan PMDN	5	56	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	65. Membuat Rencana Tindak Peningkatan Investasi di Kalsel								
	66. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa, melalui	148. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Persentase Peningkatan bersih nilai ekspor	0	>40	Perdagangan	Disperindag	



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			pengembangan jaringan infrastruktur.		Persentase Pertumbuhan ekspor non tambang	5	5	Perdagangan	Disperindag
			67. Mempercepat pembangunan sarana distribusi	149. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi sektor PDRB Perdagangan	8	8	Perdagangan	Disperindag
			68. Memantapkan Kawasan Industri yang ada di Kalsel, melalui pembenahan dan pengelolaan yang baik.	150. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan barang beredar sesuai dengan ketentuan	40	65	Perdagangan	Disperindag
			69. Pembangunan zona industri	151. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan Menengah	3,6	5	Perindustrian	Disperindag
				152. Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Persentase penambahan jumlah sentra industri baru	4	5	Perindustrian	Disperindag
				153. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi industri	0,5	0,5	Perindustrian	Disperindag
			70. Pengembangan UKM-K.	154. Pengembangan & Penataan Organisasi, Tatalaksana & Administrasi Badan Hukum Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas (unit)	132	132	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Jumlah Koperasi aktif (unit)	45	45	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Jumlah UKM melembaga dlm Koperasi dan Asosiasi (unit)	3000	3000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			71. Menciptakan wira usaha baru	155. Peningkatan SDM KUMKM melalui jalur diklat dan Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM (Jalur Non Diklat), Promosi, Kemitraan & Jaringan KUMKM	Nilai transaksi promosi (Rp.M)	9,3	10,45	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
					Wirausaha baru (orang)	250	250	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					UK menjadi usaha Mikro	100	100	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Rasio alumni Diklat yang mampu menerapkan hasil diklat ditempat kerjanya (orang)	2000	2000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			72. Melaksanakan Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses permodalan.	156. Peningkatan Pengawasan & Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Serta Perwujudan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan KUMKM.	Koperasi patuh pada peraturan (unit)	350	375	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Koperasi dan UKM yg tersedia informasi kinerjanya (unit)	2000	2045	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Koperasi yg memiliki akuntabilitas (unit)	350	375	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
			73. Memperluas jaringan akses permodalan UKM-K, melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan Bank dan Non Bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UKM-K untuk kelancaran pembiayaan usaha.	157. Pengembangan Usaha, Permodalan / Pembiayaan & Legalitas Usaha KUMKM	Nilai Bisnis Koperasi, UK (Rp.M)	700	1025	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Aset Koperasi, UK (Rp.M)	589	1016	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
					Koperasi dan UK yg memiliki Legalitas (unit)	3275	34000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
20	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	23. Pengembangan Kawasan Pariwisata	74. Pengembangan Kawasan Pariwisata	158. Program Pengembangan Pariwisata	Persentase Kenaikan Jumlah Wisnus%	627.859 org	100 (1.312.778)	Pariwisata	Disparbud



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
		Unggulan	Unggulan						
			75. Mempermudah akses ke tempat wisata		Persentase Kenaikan Jumlah Wisman %	26,975	50% (39.584)	Pariwisata	Disparbud
			76. Meningkatkan promosi Pariwisata ke berbagai media		Lama Tinggal Wisnus (hari)	3	5	Pariwisata	Disparbud
			77. Membenahi dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata		Lama Tinggal Wisnus (hari)	3	5	Pariwisata	Disparbud
			78. Melibatkan Swasta dan masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata		Persentase pembangunan jumlah objek/daya tarik pariwisata (%)	20	80	Pariwisata	Disparbud, Dinas PUPR
					Persentase Peningkatan jumlah kelompok sadar wisata (%)	102 klpk	120%	Pariwisata	Disparbud, BPMPD
					Persentase Peningkatan jumlah usaha dibidang wisata (%)	1410 usaha	45%	Pariwisata	Disparbud, DiskopUKM,
21	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	79. Mengembangkan KalSel Hijau	159. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan SDA dan LH	Indeks Tutupan Lahan	43,66	51	Lingkungan Hidup	BLHD;Dishut
			80. Mengurangi luasan lahan kritis di luar KPH		Berkurangnya luas lahan kritis	357.523 ha/5.582 ha=1,56%	8.582	Kehutanan	Dishut;BLHD
			81. Meningkatkan pengawasan illegal logging, illegal mining dan illegal Fishing		Persentase penurunan kasus illegal logging	48 Kasus	34 kasus	Lingkungan Hidup	BLHD ;Dishut; Diskanlut
					Persentase penurunan kasus illegal minning	14 Kasus	8 Kasus	Lingkungan Hidup	BLHD ;Dishut; Diskanlut
					Persentase penurunan kasus illegal fishing	23 kasus	16 kasus	Lingkungan Hidup	BLHD ;Dishut; Diskanlut
			82. Mengendalikan pencemaran akibat usaha pertambangan	160. Program Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup, dan Pengusahaan Bidang Pertambangan	Persentase Luas Lahan terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi (%)				
			83. Pembinaan dan Pengawasan Investor Tambang dalam proses rehabilitasi pasca tambang			63,1	75	ESDM	Distamben; BLHD



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			84. Penyelesaian pembangunan kebun raya banua	161. Program Konservasi Sumber daya Alam Kebun Raya	Persentase terbangunnya kawasan kebun raya	20%	75%	Lingkungan Hidup	Kebun raya Banua
			85. Pengurangan pencemaran kualitas air	162. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air (%)	46,16	61	Lingkungan Hidup	Diskanlut;BLHD
			86. Mendorong penghapusan jamban terapung.						
			87. Pembinaan, Pengawasan, Pelestarian dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove dan Terumbu karang	163. Program Pengelolaan Ruang Laut	Kawasan Terumbu Karang yang Terehabilitasi (Ha)	5	14	Lingkungan Hidup	Diskanlut;BLHD
					Kawasan Mangrove yang Terehabilitasi (Ha)	54	69	Lingkungan Hidup	Diskanlut;BLHD
			88. Penanggulangan Banjir di Daerah	164. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	28	100	Lingkungan Hidup	Diskanlut;BLHD
			89. Pengawasan terhadap gas buang	165. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (%)	81,83	90	Lingkungan Hidup	BLHD
			90. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	166. Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Prosentase Penurunan frekuensi terjadinya kebakaran hutan	483 kali	60%	Lingkungan Hidup	Dishut; BLHD, BPBD
			91. Penanganan Persampahan	167. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	35%	70%	Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BLHD
					Cakupan Pelayanan Pengangkutan Persampahan	46,95%	60%	Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BLHD



7.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan potensi wilayah, rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2031, maka berikut ini strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

7.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Laut

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, Kabupaten Tanah Laut diarahkan menjadi salah satu pusat kegiatan lokal (PKL) di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai peran sebagai pusat pelayanan regional industri, perdagangan dan jasa pertanian dan sumberdaya alam dan sumberdaya mineral.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut diarahkan pada:

- 1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- 2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- 3) Kawasan budidaya perikanan dan kelautan: (a) perikanan tangkap di kawasan Laut Kintap - Asam-asam dan kawasan Laut Aluh-Aluh, (b) perikanan tangkapan nener dan benur di Sungai Cuka, (c) daerah pendaratan ikan, (d) budidaya perikanan, (d) budidaya tambak, (e) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- 4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- 5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan



- non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- 6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata bahari, (c) wisata budaya, (d) wisata pantai, (e) wisata buatan, (f) wisata religius, (g) wisata sejarah.
 - 7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
 - 8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Laut RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan									
Pusat Kegiatan	Prioritas														
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran 									
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 					<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 						
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 								<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 			
	4. Budidaya Kehutanan												<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> •
	5. Budidaya Perikanan dan Kelautan														



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
				Pemasaran Produk Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan iklim usaha dan investasi Pembangunan prasarana dan sarana pendukung Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Dinas PU Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none">
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Wisata alam Wisata seni dan budaya Wisata kuliner Wisata Olahraga Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan tempat wisata Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya Peningkatan sumber daya manusia Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">



7.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kotabaru

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Kotabaru diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW), yaitu pusat layanan regional perikanan laut, perkebunan, kehutanan, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral pusat. Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Kotabaru diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (b) kawasan pertanian tadah hujan.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan dan kelautan: (a) perikanan tangkap di kawasan Pulau Laut, (b) daerah pendaratan ikan, (c) budidaya perikanan, (d) budidaya tambak, (e) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata bahari, (c) wisata budaya, (d) wisata pantai, (e) wisata buatan, (f) wisata religius, (g) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas,



dan keramik, (f) industri galangan kapal, (g) industri semen, bahan kimia dan agroindustri,

- (9) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kotabaru dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kotabaru RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	2. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	3. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	4. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
		<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Bukan Ras • Itik 			Industri dan Koperasi	
	5. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Budidaya Perikanan dan Kelautan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan Kelautan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	7. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	8. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banjar

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Banjar diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW), yaitu pusat layanan pendidikan keagamaan pondok pesantren, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan sentra industri dan perdagangan batu permata, pusat layanan industri pariwisata religius dan pariwisata sungai, serta pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral, perkebunan, pertanian dan hortikultura.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Banjar diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) sentra produksi pangan, (e) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan dan kelautan : (a) daerah pendaratan ikan, (b) budidaya perikanan, (c) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pengembangan unggas, (b) pengembangan ternak kambing, dan (c) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata sungai, (c) wisata budaya, (d) wisata buatan, (e) wisata religius, dan (f) wisata sejarah.
- (6) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (7) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik.
- (8) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas



Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Banjar RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
		<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Bukan Ras • Itik 			Industri dan Koperasi	
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan dan kelautan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan kelautan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Barito Kuala

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW), yaitu pusat layanan regional peternakan, perikanan, pertanian dan hortikultura lahan rawa, pusat layanan industri perkayuan dan industri kerajinan rumah tangga

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan dan kelautan: (a) pembenihan dan budidaya ikan air tawar dan laut.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata bahari, (c) wisata budaya, (d) wisata pantai, (e) wisata buatan, (f) wisata religius, (g) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri



pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.

**Tabel 7. 4** Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Barito Kuala RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan		
Pusat Kegiatan	Prioritas							
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran 		
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 					<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 					<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi
	4. Budidaya Kehutanan						<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
	5. Budaya Perikanan dan Kelautan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan Kelautan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Tapin diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat layanan regional pertanian dan hortikultura lahan rawa, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Tapin diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan : (a) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (d) wisata religius, (e) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik



- (9) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
		<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat layanan regional industri rumah tangga, pusat layanan wisata alam pegunungan dan budaya lokal Suku Dayak, pusat layanan perkebunan, pertanian dan hortikultura, perikanan air tawar, pusat layanan jasa perdagangan sumberdaya mineral.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan: (a) budidaya perikanan, (b) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (d) wisata religius, (w) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah



- hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik, (f) industri semen, bahan kimia dan agroindustri,
- (9) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut



Tabel 7. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat pelayanan regional industri, perdagangan dan jasa pertanian serta sumberdaya mineral.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan: (a) budidaya perikanan, (b) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (d) wisata religius, (e) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik.



Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan	
Pusat Kegiatan	Prioritas						
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran 	
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW), yaitu pusat layanan regional untuk industri kerajinan rumah tangga, pusat layanan pendidikan pondok pesantren, pusat layanan pariwisata kerbau rawa, pusat layanan peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan hortikultura lahan rawa.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan : (a) budidaya perikanan, (b) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (d) wisata religius, (e) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,



- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 8 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> •Padi •Hortikultura •Karet •Kelapa Dalam •Kelapa Sawit •Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis daerah agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> •
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> •



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> •
	5. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> •
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> •
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •



7.2.9 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tabalong

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Tabalong diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat layanan regional untuk industri kehutanan, perkebunan, perikanan air tawar, pusat layanan perdagangan dan jasa di daerah perbatasan Kalimantan Selatan bagian utara dengan Kalimantan Timur bagian selatan.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Tabalong diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan : (a) budidaya perikanan, (b) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (f) wisata religius, (g) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan



minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik.

- (9) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tabalong dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 9 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tabalong RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan indutsri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan Kelautan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.10 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat pelayanan regional industri, perdagangan dan jasa pertanian dan sumberdaya alam dan sumberdaya mineral.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan dan kelautan: (a) budidaya perikanan dan kelautan (b) pembenihan dan budidaya ikan air tawar dan laut.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata bahari, (c) wisata budaya, (d) wisata pantai, (e) wisata buatan, (f) wisata religius, (g) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan



- minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik, (f) industri semen, bahan kimia dan agroindustri,
- (9) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 10 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
		<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Bukan Ras • Itik 			Industri dan Koperasi	
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan dan Kelautan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan Kelautan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.11 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kabupaten Balangan diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat layanan regional perdagangan dan jasa kehutanan, perkebunan dan sumberdaya mineral.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kabupaten Balangan diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura; (c) kawasan pertanian tadah hujan, (d) kawasan transmigrasi, (e) sentra produksi pangan, (f) sentra agribisnis hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan komoditas unggulan: karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar dan lainnya, dan (b) kawasan perkebunan lahan basah dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan: (a) budidaya perikanan, (b) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pembibitan ternak sapi, (b) pengembangan unggas, (c) pengembangan ternak kambing, dan (d) pengembangan ternak sapi.
- (5) Kawasan budidaya kehutanan: (a) hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, (b) sentra penghasil hasil hutan kayu, (c) sentra penghasil hutan non kayu, (d) sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), dan (e) pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
- (6) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (d) wisata religius, (g) wisata sejarah.
- (7) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (8) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan



minuman, (e) industri pengolah hasil tambang, batubara, minyak dan gas, dan keramik, (f) industri semen, bahan kimia dan agroindustri

- (9) Kawasan pertambangan: (a) mineral dan batubara, (b) minyak dan gas bumi, (c) air tanah, dan (d) energi gas

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Balangan dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 11 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Batubara 	Pengembangan Pertambangan Berkelanjutan dan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan • Pengendalian kegiatan pertambangan ilegal • Reklamasi dan revegetasi hutan dan lahan di kawasan bekas pertambangan • Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa Sawit • Kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Karet • Kelapa Dalam • Kelapa • Sawit • Kopi 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sapi • Kerbau • Kambing • Ayam Ras 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, 	



Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
		<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Bukan Ras • Itik 			Industri dan Koperasi	
	4. Budidaya Kehutanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	6. Pengembangan Kawasan Industri		Pengembangan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	
	7. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas PU • Dinas Perhubungan 	



7.2.12 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Banjarmasin

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kota Banjarmasin diarahkan menjadi pusat kegiatan nasional (PKN), yaitu pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional industri, perdagangan dan jasa, pusat layanan kesehatan, pusat layanan jasa perbankan tingkat regional, nasional dan internasional.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kota Banjarmasin diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan lahan basah dengan komoditas unggulan padi dan hortikultura, (b) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering komoditas unggulan kelapa sawit dan kelapa dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan: (a) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pengembangan unggas.
- (5) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata sungai, (d) wisata buatan, (e) wisata religius, (f) wisata sejarah.
- (6) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (7) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, (b) industri pengolah hasil peternakan, (c) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarmasin dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut.



Tabel 7. 12 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Banjarmasin RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	3. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	4. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	5. Pengembangan Kawasan Industri			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi • Dinas PU • Dinas Perhubungan
	6. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 		



7.2.13 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Banjarbaru

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pengembangan wilayah Kota Banjarbaru diarahkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL), yaitu pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat regional yang merupakan simpul utama pusat layanan administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan pusat layanan pendidikan perguruan tinggi tingkat regional dan nasional.

Dengan keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam, pengembangan wilayah Kota Banjarbaru diarahkan pada:

- (1) Kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura: (a) kawasan pertanian lahan kering dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Kawasan budidaya perkebunan: (a) kawasan perkebunan lahan kering dengan teknik budidaya berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya perikanan: (a) pembenihan dan budidaya ikan air tawar.
- (4) Kawasan budidaya peternakan: (a) pengembangan unggas, (b) pengembangan ternak kambing.
- (5) Kawasan budidaya pariwisata: (a) wisata alam, (b) wisata budaya, (c) wisata buatan, (d) wisata religius, (e) wisata sejarah.
- (6) Kawasan permukiman: (a) pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, (b) pusat perdagangan, transportasi dan jasa,
- (7) Kawasan industri: (a) industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, (b) industri pengolah hasil hutan, perabot kayu dan rotan, (d) industri makanan dan minuman.

Dengan memperhatikan sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan, penyerap tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah, dan juga komoditas utama yang dihasilkan, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru dalam lima tahun tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut



Tabel 7. 13 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Banjarbaru RPJMD Kalimantan Selatan 2016-2021

Fungsi Kawasan		Komoditas Utama	Strategi	Kebijakan	Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan
Pusat Kegiatan	Prioritas					
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Padi • Hortikultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Pertanian • Pengembangan Industri Pengolahan (Hilirisasi) Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis dan agroindustri tanaman pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Disperindag dan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peyediaan benih/bibit unggul • Penyediaan akses permodalan • Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian • Pengendalian hama penyakit • Penyediaan peralatan pertanian • Pembangunan prasarana pertanian • Pengembangan pemasaran
	2. Budidaya Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa Dalam 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan • Dinas PU • Disperindag dan Koperasi 	
	3. Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kambing • Ayam Ras • Ayam Bukan Ras • Itik 		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agribisnis peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Peternakan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 	
	4. Budidaya Perikanan			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan budidaya dan perikanan tangkap • Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan • Dinas PU • Dinas Perhubungan • Disperindag dan Koperasi 	
	5. Pengembangan Kawasan Industri			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan iklim usaha dan investasi • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 	
	6. Pengembangan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata alam • Wisata seni dan budaya • Wisata kuliner • Wisata Olahraga • Wisata Religius 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pariwisata berstandar nasional dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan tempat wisata • Penyelenggaraan kegiatan wisata: festival seni dan budaya, turnamen olah raga, wisata kuliner dan lainnya • Peningkatan sumber daya manusia • Pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata • Pengembangan kerjasama swasta dan pemerintah 		



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Gubernur, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermula pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih lengkapnya, program prioritas selama lima tahun beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 8.1 dalam Lampiran 1.



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.



9.1 Indikator Kinerja Makro Daerah

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 dapat diuraikan dalam tabel 9.1 sebagai berikut:



Tabel 9. 1 Indikator Kinerja Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Peningkatan IPM	67,63	68,88	69,50	70,13	70,75	71,38	71,0-71,8
	• Angka Rata-Rata Lama Sekolah							
	- Target Kalsel	7,6 (2014)	7,7	7,79	7,88	7,97	8,06	12
	- Target Agregasi Nasional		N/A	N/A	N/A	8,8	N/A	8,8
	• Angka Harapan Lama Sekolah	11,96 (2014)	N/A	12,54	12,83	13,12	13,41	13,7
	• Usia Harapan Hidup	67,47 (2014)	67,66	68,19	68,55	68,92	69,28	69,64
2	Angka Pengangguran							
	Target Kalsel	4,83 (2015)	4.8 - 4.78	4.77 - 4.71	4.7 - 4.5	4.25 - 4.20	4.10 - 4.03	3.6 - 4
	Target RPJMN Buku III		3,9	3,7	3,6	3,4	N/A	3,4
	Target Agregasi Nasional		5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0	N/A	4,0-5,0
3	Pertumbuhan Ekonomi							
	Target Kalsel	3,84	3.28 - 3.78	3.53 - 4.03	3.78 - 4.28	4.03 - 4.53	4.28 - 4.78	4.50 - 5.03
	Target RPJMN Buku III		6,2	6,8	7,6	8,6	N/A	8,6
	Target Agregasi Nasional		6,6	7,1	7,5	8,0	N/A	8,0
4	Angka Kemiskinan							
	Target Kalsel	4.72 (2015)	4.68 - 4.66	4.65 - 4.55	4.50 - 4.30	4.25 - 4.05	4.03 - 4.02	3.96 - 4.01
	Target RPJMN Buku III		4,20	3,80	3,50	3,20	N/A	3,20
	Target Agregasi Nasional		9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0	N/A	7,0-8,0
5	Indeks Gini							
	Target Kalsel	0,359	0,328	0,317	0,307	0,296	0,286	0,286
	Target Target Agregasi Nasional		N/A	N/A	N/A	0,36	N/A	0,36
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
	Target Kalsel	55,86 (2014)	58	59	60	61	63	65
	Target Target Agregasi Nasional		N/A	N/A	N/A	66,5-68,5	N/A	66,5-68,5
7	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,87	1,76	1,7	1,64	1,56	1,48	1,38



9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada Tabel 9.2.



Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,84	3.28 - 3.78	3.53 - 4.03	3.78 - 4.28	4.03 - 4.53	4.28 - 4.78	4.50 - 5.03
1.2	Indeks Gini	Indeks	0,359	0,328	0,317	0,307	0,296	0,286	0,286
1.3	Persentase penduduk miskin	%	4.72 (2015)	4.68 - 4.66	4.65 - 4.55	4.50 - 4.30	4.25 - 4.05	4.03 - 4.02	3.96 - 4.01
1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,63	67.7 - 67.70	67.75-67.80	67.85 - 67.9	68 - 68.5	69 -69.30	71-71.8
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	Pelayanan Urusan Wajib Dasar								
2.1	PENDIDIKAN								
2.1.1	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	67,63	67.7 - 67.70	67.75-67.80	67.85 - 67.9	68 - 68.5	69 -69.30	71-71.8
2.1.2	APK	%	62,14	64,32	65,06	65,42	65,85	66,25	66,25
2.1.3	APM SMA/MA/SMK/MAK	%	50,05	57,491	60,032	62,589	65,155	67,728	70,306
2.1.4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,96	N/A	12,54	12,83	13,12	13,41	13,7
2.2	KESEHATAN								
2.2.1	Angka kematian ibu/1.000 KH	/1000KH	188 (2013)	170	150	135	120	108	90
2.2.2	Angka kematian bayi/100.000 KH	/1000KH	43 (2013)	40	37	33	30	27	24
2.2.3	AKABA	/1000KH	35 (2013)	30	27	25	20	17	15
2.2.4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,47 (2014)	67,66	68,19	68,55	68,92	69,28	69,64
2.2.5	Status gizi balita								
	· Balita gizi buruk		8,20	7,60	7,40	7,29	6,00	5,29	5,00
	· Balita gizi kurang		19,20	18,77	18,50	18,25	18,00	17,25	16,00
2.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
2.3.1	Presentase penyediaan prasarana air baku	%	38	13	22	31	40	49	57
2.3.2	Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana Publik	%	20/36 = 55,6%	58,3%	72,3%	86,1%	94,4%	97,2%	1
2.3.3	Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana Aparatur perkantoran	%	44,7	53,2%	74,5%	83	91,5%	97,9%	1



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.4	Persentase Luas Irigasi dan Rawa dalam Kondisi Baik	%	39,5	11	16,9	22,8	28,7	34,6	40,5
2.3.5	Persentase Luas jaringan irigasi/rawa yang dikembangkan	%	49	7	27	51	51	51	51
2.3.6	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	28	40	52	64	76	88	100
2.3.7	Jalan dalam Kondisi Baik	%	85	85,5	86	87	88	88	91
2.3.8	Jembatan dalam Kondisi Baik	%	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85
2.4	PERMUKIMAN RAKYAT DAN PERUMAHAN								
2.4.1	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Air Limbah Domestik yang memadai	%	28,5	33,83	38,74	44,12	100	100	100
2.4.2	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	9,2	7,7	6,2	4,7	0	0	0
2.4.3	Cakupan Pelayanan Pengangkutan Persampahan	%	46,95	47,13	49,23	51,27	54,91	57,12	60
2.4.4	Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi layak	%	58	60	62	64	66	68	70
2.5	KETENTERAMAN UMUM, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
2.5.1	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70,84	71,49	72,02	72,75	73,31	74,18	74,96
2.5.2	Persentase penurunan Angka Kriminalitas (2.232 kasus)	%	0	100	90	80	70	60	50
2.5.3	Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0
2.6	SOSIAL								
2.6.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	194,623	7,5	15	22,5	30	37,5	45
3	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar								
3.1	TENAGA KERJA								
3.1.1	Angka Pengangguran	%	4,83 (2015)	4.8 - 4.78	4.77 - 4.71	4.7 - 4.5	4.25 - 4.20	4.10 - 4.03	3.6 - 4
3.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
3.2.1	Indeks Pembangunan Gender	Indek	88,55	88,64	88,74	88,83	88,92	89,02	89,11
3.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indek	69,42	70,64	71,88	73,14	74,43	75,74	77,07
3.2.3	Persentase Peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan	%	63	65	67	69	71	73	75



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
3.2.4	Persentase Peningkatan Kelembagaan Gender dan Anak	%	10	15	25	50	100	100	100
3.3	PANGAN								
3.3.1	Peningkatan Skor PPH Ketersediaan	Skor	88	88	88,5	89	89,5	90	90,5
3.3.2	Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn	%	90	90	89,5	89,1	88,6	86,7	85,8
3.3.3	Peningkatan skor PPH Konsumsi	Skor	84,9	84,9	85,9	86,9	87,9	89,9	90,9
3.4	PERTANAHAN								
3.4.1	Persentase Lahan yang bersertifikat	%	30	35	45	55	65	75	85
3.4.2	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah	%	60	65	70	75	80	85	90
3.5	LINGKUNGAN HIDUP								
3.5.1	Indeks Tutupan Hutan	indeks	43,66	45	45,5	46	46,5	47	47,5
3.5.2	Indeks Kualitas air	indeks	46,16	58	58,5	59	59,5	60	60,5
3.5.3	Indeks Kualitas Udara	indeks	81,83	85	86	87	88	89	90
3.5.4	Persentase Pengelolaan Sampah	%	46,95%	47,13%	49,23%	51,27%	54,91%	57,12%	0,6
3.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
3.6.1	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	0	0	20	40	60	80	100
3.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
3.7.1	Persentase swadaya masyarakat untuk Pembiayaan Pembangunan Desa	%	15	16	17	18	19	20	21
3.7.2	Persentase Pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat	%	40	50	60	70	80	90	100
3.8	PENGENDALLIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
3.8.1	Persentase Kader GSI Aktif.	%	0	0	10	20	30	40	50
3.8.2	Persentase BKB dan Sub BKBD Aktif	%	0	0	20	40	60	80	100
3.9	PERHUBUNGAN								
3.9.1	Prosentase jumlah halte BRT yang terbangun	%	0	5	30	60	60	80	100
3.9.2	Waktu Tempuh Rata-rata Ruas jalan provinsi	KmH	60	62	65	65	67	67	69



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
3.9.3	Persentase penurunan angka kecelakaan diruas jalan provinsi	%	60	60	55	50	40	35	35
3.9.4	Persentase penurunan angka kecelakaan angkutan sungai danau dan penyeberangan	%	60	60	55	50	40	35	35
3.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
3.10.1	Nilai dan ranking pemeringkatan e-Government	peringkat	16	13	10	8	8	6	6
3.10.	Persentas Cakupan Media Informasi komunikasi Publik	%	15,4	30,8	46,2	55,2	61,5	76,9	84,6
3.10.	Persentasi daerah yang tercover jaringan komunikasi (jumlah desa yang tercover jaringan komunikasi)	%	7,7	23,1	38,5	53,9	69,3	84,7	100
3.11	PENANAMAN MODAL								
3.11.1	Persentase Peningkatan Rencana investasi PMA dan PMDN	%	41	15	15	15	15	15	15
3.12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				20	40	60	80	100
3.12.1	Persentase organisasi pemuda yang terlibat dalam pembinaan kepemimpinan	%	0	0	20	40	60	80	100
3.12.2	Persentase peningkatan kemitraan pemuda dengan masyarakat	%	0	0	20	40	60	80	100
3.13	KEBUDAYAAN								
3.13.1	Persentase Unsur2 budaya yang dikembangkn	%	28	30	35	40	45	50	55
3.13.2	Persentase Unsur Budaya yang ada di Kalsel	%	10	20	30	40	60	80	100
3.13.3	Persentase unsur2 budaya yang menjadi kekayaan budaya	%	14	20	25	30	35	40	45
3.14	PERPUSTAKAAN								
3.14.1	Persentase Peningkatan Buku yang dipinjam (4500)	%	0,02	0,02	0,026	0,032	0,038	0,044	0,05
3.14.2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan	%	0,05	5	15	25	35	45	55
3.15	KEARSIPAN								
3.15.1	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasis TIK	%	0	0	20	40	60	80	100



No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	
4	Pelayanan Urusan Pilihan								
4.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
4.1.1	Konsumsi ikan	(Kg/ kapita/ thn)	47,43	48,50	49,50	50,50	51,50	52,50	55,20
4.2	PARIWISATA								
4.2.1	Persentase Kenaikan Jumlah Wisnus	%	0 % (627.859 org)	10	10	20	20	20	20
4.2.2	Persentase Kenaikan Jumlah Wisman	%	0 % (26.975 org)	5	5	10	10	10	10
4.2.3	Lama Tinggal Wisnus	hari	3	3	3	4	4	5	5
4.2.4	Persentase pembangunan jumlah objek/daya tarik pariwisata	%	20	30	40	50	60	70	80
4.2.5	Persentase Peningkatan jumlah kelompok sadar wisata	%	102 klpk	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.2.6	Persentase Peningkatan jumlah usaha dibidang wisata	%	1410 usaha	0,05	0,05	0,07	0,08	0,1	0,1
4.3	PERTANIAN								
4.3.1	Persentase peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanamam Pangan Padi :	%	3	3	3	3	3	3	3
4.4	PERDAGANGAN								
4.4.1	Persentase Kontribusi sektor PDRB Perdagangan	%	8	8	8	8	8	8	8
4.5	TRANSMIGRASI								
4.5.1	Persentase Pengembangan Desa Eks Kawasan Transmigrasi	%							
4.5.2	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	0	1 UPT	2 UPT	3 UPT	4 UPT	5 UPT	6 UPT
4.5.3	Presentase Sumber Daya Transmigrasi	%	0	1 UPT	2 UPT	3 UPT	4 UPT	5 UPT	6 UPT
	ASPEK DAYA SAING								
5	Rasio Elektrifikasi			84,23	85	85,50	86	86,50	87



9.3 Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan dengan melihat kondisi, permasalahan, dan sumber daya yang terbatas, maka perlu diprioritaskan program pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini telah ditetapkan 13 prioritas pembangunan yang akan dicapai. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut maka indikator kinerja prioritas pembangunan ditetapkan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 9. 2 Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan

MISI	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI	TARGET
MISI I	1	Kalsel Cerdas	ARLS	8,01 (2014)	12 Tahun
	2	Kalsel Sehat	UHH	67,47 (2013)	69,64 Tahun
	3	Kalsel Terampil	Sertifikasi Naker	10% dari pencarikerja	50% dari pencari kerja
	4	Kalsel Beriman	Jumlah Siswa yang khatam Al-Quran	N/A	100%
MISI II	5	Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik	LKPD dan LAKIP	WTP dan BB	WTP dan A
MISI III	6	Kalsel Berbudaya	Perubahan Perilaku Menuju Positif	Negatif	Positif
	7	Kalsel Aman	Konflik Sosial	0	0
	8	Kalsel Menuju Tuan Rumah PON	Terbangunnya Sport centre	5%	100%
MISI IV	9	Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas	Terfasilitasinya Pembangunan Infrastruktur dasar dan penggerak	10%	100%
MISI V	10	Kalsel Sentra Pangan	Surplus	Import	Kebutuhan Lokal Terpenuhi
	11	Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional	Peringkat Kunjungan Wisata Nasional	Peringkat: 14	Peringkat: 10
	12	Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, Dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	33,67% (2014)	50%
	13	Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas	Peringkat dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	26 (2014) 57,05	20 67,00



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 yang menjabarkan visi dan misi pembangunan selama lima tahun ke depan ini, selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021.

10.1 Pedoman Transisi

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, dan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan dengan setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 merupakan dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk



menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Pedoman masa transisi tersebut bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan periode RPJMD ini berakhir, sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masa transisi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan baru yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun mendatang, yang didalamnya memuat strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah. Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur Kalimantan Selatan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat
- b. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
- c. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, yang memuat program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang diamanatkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sesuai tujuan dan sasaran



capaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Renstra-PD tersebut dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

- d. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Provinsi Kalimantan Selatan dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 agar arah kebijakan tahunan yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan dapat dicapai;
- e. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
- f. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2016-2021.
- g. Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk menyusun kegiatan Rencana strategis PD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- h. Dalam rangka terwujudnya segala dokumen perencanaan daerah yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.
- i. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD